

Pengantar
**TEORI
EKONOMI
MAKRO**



Dr. Didit Darmawan, S.T., S.E., M.M



PENGANTAR TEORI EKONOMI MAKRO

Dr. Didit Darmawan, S.T., S.E., M.M



PENGANTAR

TEORI EKONOMI MAKRO

Penulis :

Dr. Didit Darmawan, S.T., S.E., M.M

Diterbitkan Oleh :



PT. REVKA PETRA MEDIA

Anggota IKAPI No. 157/JTI/2014

Jl. Pucang Anom Timur No. 5 Surabaya

Telp. 031 – 5051711 ; Fax. 031 – 5016848

Email: revkapetra.media@yahoo.com

Juli 2018

ISBN :

Dicetak oleh PT. REVKA PETRA MEDIA

Perpustakaan Nasional : katalog dalam terbitan (KDT)

Darmawan, Didit

Pengantar Teori Ekonomi Makro/Didit Darmawan

Edisi Pertama

---Surabaya : Revka Petra Media, 2018

1. Jil., vii

ISBN :

1. Ekonomi 2. Pengantar Teori Ekonomi Makro

I. Judul II. Didit Darmawan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002

Tentang Hak Cipta :

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang. Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini ke dalam bentuk apapun, secara elektronik maupun mekanis, termasuk fotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya, tanpa izin tertulis dari penerbit, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Bab XII Ketentuan Pidana, Pasal 72, AYAT (1), (2) DAN (6)

KATA PENGANTAR

Secara umum pengertian ekonomi makro adalah studi tentang ekonomi secara keseluruhan di masyarakat, perusahaan dan pasar melalui berbagai kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Ekonomi makro sebagai cabang dari ilmu teori ekonomi. Permasalahan kebijakan ekonomi makro mencakup masalah-masalah yang berhubungan dengan pengelolaan dan pengendalian perekonomian secara umum. Tugas pengendalian ekonomi makro adalah mengusahakan agar perekonomian dapat bekerja dan tumbuh secara seimbang, terhindar dari keadaan-keadaan yang dapat mengganggu keseimbangan umum tersebut. Dua masalah ekonomi utama yang dihadapi setiap masyarakat di suatu negara adalah pengangguran dan inflasi. Kedua masalah ekonomi ini dapat menyebabkan berdampak terhadap stabilitas ekonomi dan pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Ada beberapa variabel dari ekonomi makro yang akan dibahas di buku ini, yaitu tingkat pendapatan nasional, konsumsi rumah tangga, investasi, tingkat tabungan, belanja pemerintah, tingkat harga-harga umum, jumlah uang yang beredar (Inflasi), tingkat bunga, kesempatan kerja, Anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), neraca pembayaran (ekspor dan import) serta perdagangan internasional.

Pada dasarnya ekonomi makro memiliki beberapa kebijakan sebagai landasan untuk mengatasi dan menganalisis permasalahan-permasalahan ekonomi yang memiliki ruang lingkup besar. Dua kebijakan dari pemerintah yang dibahas di buku ini adalah kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang bertugas untuk mengatur tentang pendapatan dan pengeluaran dari pemerintahan. Kebijakan moneter merupakan langkah-langkah yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia dengan tujuan untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar dalam masyarakat. Kebijakan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan menjaga untuk tetap sesuai dengan tujuan mensejahterakan kehidupan bangsa dan negara di bidang ekonomi.

Teori ekonomi makro yang sangat luas pembahasannya tidak dapat diwakili oleh buku ini. Harapan dari terbitnya buku ini adalah menjadi bahan pendukung dari matakuliah ekonomi makro. Penulis berusaha menekankan pondasi dasar melalui buku ini sebelum para pembaca menyerap pengetahuan lanjutan tentang ekonomi mikro. Dengan segala kekurangannya, semoga buku ini memberikan manfaat bagi para pembacanya. Terima Kasih.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB 1 KEBIJAKAN PEMERINTAH DI BIDANG EKONOMI	
1.1 Perbedaan Ilmu Ekonomi Mikro dan Ekonomi Makro	2
1.2 Sejarah Teori Ekonomi Makro	3
1.3 Permasalahan yang Dihadapi Pemerintah di Bidang Ekonomi	7
1.4 Kebijakan Pemerintah untuk Mengatasi Masalah Ekonomi	13
Ikhtisar	15
BAB 2 PENDAPATAN NASIONAL	
2.1 Konsep Pendapatan Nasional	18
2.2 Manfaat Perhitungan Pendapatan Nasional	24
2.3 Faktor-faktor Yang Memengaruhi Tabungan, Konsumsi, dan Investasi	29
2.4 Inflasi	31
2.5 Indeks Harga dan Peranannya dalam Ekonomi	38
Ikhtisar	42
BAB 3 UANG, PERBANKAN DAN KEBIJAKAN MONETER	
3.1 Uang	44
3.2 Permintaan dan Penawaran Uang	48
3.3 Lembaga Keuangan Perbankan	51
3.4 Lembaga Keuangan Bukan Bank	59
3.5 Kebijakan Moneter	63
Ikhtisar	68
BAB 4 KETENAGAKERJAAN DAN PENGANGGURAN	
4.1 Penduduk sebagai Sumber Daya di Pembangunan Ekonomi	70
4.2 Kesempatan Kerja	71
4.3 Angkatan Kerja	72
4.4 Jenis Pengangguran	73
4.5 Penyebab Pengangguran	75
4.6 Dampak Pengangguran	76
4.7 Cara Mengatasi Pengangguran	77
4.8 Indikator Ketenagakerjaan	79
4.9 Sistem Upah	80
Ikhtisar	83
BAB 5 KEBIJAKAN FISKAL	
5.1 Keuangan Negara	86
5.2 APBN	88
5.3 APBD	94
5.4 Kebijakan Fiskal	99
Ikhtisar	104

BAB 6	PASAR MODAL	
6.1	Pengertian Pasar Modal	106
6.2	Bentuk Pasar Modal	106
6.3	Para Pelaku Pasar Modal	109
6.4	Lembaga yang Terlibat di Pasar Modal	112
6.5	Manfaat dari Keberadaan Pasar Modal	114
6.6	Produk di Pasar Modal	114
6.7	Mekanisme Kerja Pasar Modal	121
	Ikhtisar	124
BAB 7	PERDAGANGAN INTERNASIONAL	
7.1	Globalisasi Ekonomi	126
7.2	Manfaat dan Faktor Pendorong terjadinya Perdagangan Internasional	127
7.3	Teori Perdagangan Internasional	130
7.4	Kebijakan Perdagangan Internasional	134
7.5	Pembayaran Internasional	138
7.6	Valuta Asing	139
7.7	Neraca Pembayaran	144
	Ikhtisar	146
	DAFTAR PUSTAKA	148

BAB 1

KEBIJAKAN PEMERINTAH DI BIDANG EKONOMI

KOMPETENSI DASAR

Mendeskripsikan kebijakan - kebijakan yang dikeluarkan pemerintah di bidang ekonomi untuk mengatasi masalah – masalah di bidang ekonomi.

INDIKATOR

1. Mahasiswa menjelaskan perbedaan antara ekonomi mikro dan ekonomi makro
2. Mahasiswa menjelaskan sejarah teori ekonomi makro
3. Mahasiswa menjelaskan masalah-masalah yang dihadapi pemerintah di bidang ekonomi.
4. Mahasiswa menjelaskan berbagai kebijakan pemerintah di bidang ekonomi

Di suatu ketika, seseorang sering dihadapkan pada suatu pilihan. Semisal, di saat seseorang menginginkan membeli rumah atau mobil dan hanya memiliki uang untuk membeli salah satunya, saat itulah diperlukan tindakan memilih. Mungkin juga keputusan yang diambil tidak kedua-duanya. Mungkin saja uang yang ada dipilih untuk disimpan saja tanpa melakukan tindakan konsumtif. Apapun keputusannya, orang tersebut telah membuat suatu kebijakan kecil di perekonomian hidupnya. Sedangkan di tingkatan yang lebih luas di kehidupan bernegara, kebijakan ekonomi diputuskan oleh pemerintah. Pembahasan selanjutnya adalah bagaimana kebijakan pemerintah diambil di bidang ekonomi.

Sebelumnya pembaca perlu diingatkan bahwa ilmu ekonomi mempelajari bagaimana manusia melakukan pembagian sumber daya yang tersedia secara efisien untuk memenuhi kebutuhannya. Untuk melakukan hal tersebut, manusia terkendala oleh waktu, keterbatasan sumber daya, keinginan manusia yang tak terbatas, dan ketidakpastian.

1.1 Perbedaan Ilmu Ekonomi Mikro dan Ekonomi Makro

Berdasarkan ruang lingkupnya, ilmu ekonomi dikelompokkan menjadi dua kelompok besar. Dua kelompok tersebut adalah ilmu ekonomi mikro dan ilmu ekonomi makro.

Ilmu ekonomi mikro mempelajari variabel-variabel ekonomi di lingkup yang kecil seperti rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, dan struktur industri. Di ekonomi mikro dipelajari tentang bagaimana individu menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk memenuhi kebutuhannya sehingga tercapai tingkat kepuasan yang optimal. Selain itu, kajian ekonomi mikro mencakup perilaku produsen dan konsumen saat berinteraksi di pasar. Secara teori, tiap individu yang melakukan kombinasi konsumsi atau produksi yang optimal bersama dengan individu-individu lain akan menciptakan keseimbangan dalam skala makro; dengan asumsi bahwa semua hal lain tetap sama (*ceteris paribus*).

Ilmu ekonomi makro mempelajari perilaku ekonomi sebagai agregat (keseluruhan) tentang kehidupan ekonomi. Istilah agregat menjelaskan bahwa yang menjadi pembahasan di ekonomi makro adalah variabel-variabel total, seperti pendapatan total, produksi total, konsumsi, tabungan, investasi serta ekspor impor total. Materi-materi tentang ekonomi moneter, perdagangan internasional, ekonomi pembangunan, masuk dalam kelompok ekonomi makro. Ilmu ekonomi makro membahas aktivitas ekonomi secara keseluruhan, terutama mengenai pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, berbagai kebijakan perekonomian yang berhubungan, serta pengaruhnya terhadap beragam tindakan pemerintah (misalnya perubahan tingkat pajak) terhadap hal-hal tersebut. Ilmu ekonomi makro mengarah kepada analisis terhadap keseluruhan kegiatan perekonomian yang bersifat global dan tidak memperhatikan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh unit-unit kecil perekonomian. Analisis dijalankan terhadap keseluruhan produsen dan konsumen dalam perekonomian.

Meskipun pembahasan ekonomi dikelompokkan menjadi dua yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro, namun pembagian ini tidaklah mutlak. Sebagai contoh bila mempelajari tentang variabel pendapatan total (agregat), variabel ini akan masuk di kelompok makro. Sebenarnya pendapatan total adalah akumulasi dari pendapatan sektor rumah tangga. Demikian pula variabel harga yang menjadi variabel penting di kelompok ekonomi mikro, juga dipelajari di kelompok ekonomi makro, tetapi dengan pembahasan yang lebih luas yaitu secara agregat.

Tabel 1.1 Perkembangan Variabel Makro Indonesia 2011 - 2018

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017 ¹	2018 ¹
• PDB (% perubahan tahunan)	6.2	6.0	5.6	5.0	4.8	5.0	5.1	5.3
• Inflasi (% perubahan tahunan)	5.4	4.3	8.4	8.4	3.4	3.0	3.5	3.5
• Hutang Pemerintah (% dari PDB)	23.1	23.0	24.9	24.7	27.4	28.3		
• Nilai Tukar (IDR/USD)	8,773	9,419	11,563	11,800	13,389	13,309	13,400	
• Neraca Transaksi Berjalan (% dari PDB)	0.2	-2.8	-3.3	-3.1	-2.1	-1.8	-1.6	-1.8
• Penduduk (dalam juta)	245	248	251	254	258	261	264	267
• Kemiskinan (% dari populasi)	12.5	11.7	11.5	11.0	11.1	10.9		
• Pengangguran (% dari tenaga kerja)	6.6	6.1	6.3	5.9	6.2	5.6		
• Cadangan Devisa (dalam miliar USD)	110.1	112.8	99.4	111.9	105.9	116.4		

¹ menunjukkan prognosis

Sumber: Bank Dunia, Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia dan IMF

1.2 Sejarah Teori Ekonomi Makro

Di rentang waktu tahun 1920 dan 1930 terjadi kemunduran kegiatan perekonomian yang sangat serius di berbagai negara di dunia terutama di negara-negara industri terkemuka seperti Amerika Serikat dan Inggris. Kemerosotan ekonomi di Amerika Serikat sebagai indikasi awal terjadinya hal ini. Amerika Serikat menghadapi gejolak ekonomi yang parah. Nilai saham anjlok, kredit macet, perusahaan bangkrut, hingga ketidakmampuan masyarakat untuk memenuhi tabungan atau menyusun rencana di masa depan. Sebagai akibat dari kondisi tersebut maka pengangguran yang sangat tinggi berlaku dan industri-industri beroperasi jauh di bawah kapasitas normal. Sumber dari kemunduran ekonomi ini adalah kekurangan permintaan dalam masyarakat.

Akibat dari kejadian dari kemunduran ekonomi itu telah mendorong seorang ahli ekonomi Inggris yaitu John Maynard Keynes untuk mengevaluasi pandangan-pandangan ahli ekonomi klasik seperti pasca teori Adam Smith. Berdasarkan evaluasinya Keynes pada tahun 1936 menerbitkan suatu buku yang berjudul *The General Theory of Employment, Interest, and Money*. Buku ini merupakan landasan dari teori ekonomi makro yang terdapat pada masa ini. Buku ini antara lain mengkritik pandangan ahli ekonomi klasik yang berkeyakinan bahwa perekonomian cenderung untuk mencapai tingkat kesempatan kerja penuh (yaitu tenaga kerja yang tersedia sepenuhnya digunakan). Kritik tersebut menunjukkan kelemahan dari pandangan yang menjadi landasan pada keyakinan para ahli ekonomi klasik bahwa penggunaan tenaga kerja penuh dan pertumbuhan ekonomi yang kuat selalu dicapai. Keynes juga menjelaskan faktor utama yang akan menentukan prestasi kegiatan ekonomi suatu negara. Keynes menilai pengeluaran agregat yaitu perbelanjaan masyarakat terhadap barang dan jasa adalah faktor utama yang menentukan tingkat kegiatan ekonomi yang dicapai suatu negara. Dalam sistem pasar bebas penggunaan tenaga kerja penuh tidak selalu tercipta dan diperlukan usaha dan kebijakan pemerintah untuk menciptakan tingkat penggunaan tenaga kerja penuh dan pertumbuhan ekonomi yang kuat.

Solusi yang dikemukakan Keynes adalah pemerintah harus menjalankan kebijakan defisit anggaran dan melakukan pengeluaran untuk kerja publik yang akan menaikkan permintaan dan memulihkan kepercayaan. Hal tersebut menunjukkan bahwa Keynes menolak doktrin *Laissez-faire* yaitu doktrin yang tidak menginginkan intervensi pemerintah dalam perekonomian atau yang lebih dikenal dengan pasar bebas.

Secara lebih ekstrem, Keynes menyatakan bahwa pemerintah boleh melakukan pengeluaran yang tidak produktif seperti pembangunan monumen atau bahkan untuk biaya perang. Pengeluaran tersebut dapat meningkatkan permintaan agregat dan membantu pemulihan ekonomi. Argumen Keynes ini terbukti benar ketika Amerika Serikat ikut terlibat dalam Perang Dunia ke-2 di saat pengeluaran dan pembiayaan defisit naik secara drastis, dari 15% menjadi 46% terhadap GNP. Hasilnya, pengangguran mencapai titik terendah, 1,2%, dan tingkat output ekonomi naik tajam. Keynes juga beranggapan bahwa mencoba dengan kebijakan fiskal seperti mengubah pengeluaran dan pajak akan lebih efektif dibandingkan kebijakan moneter seperti mengubah persediaan uang dan suku bunga.

Pandangan yang berbeda dengan pendapat John Maynard Keynes muncul 30 tahun kemudian. Milton Friedman, ekonom peraih Nobel, yang menulis buku monumental berjudul *A Monetary History of the United States*. Menurut Friedman, tahun 1930-an merupakan saksi tragis bagi pentingnya faktor moneter untuk menghasilkan depresi ekonomi. Pemerintah telah bertindak tidak tepat untuk membalikkan resesi dan bahkan memperparah depresi. Friedman menilai bahwa depresi terjadi karena intervensi The Fed yang mengendalikan jumlah uang beredar di pasar. Dari tahun 1929 sampai tahun 1933, stok uang turun sampai lebih dari sepertiga yang berimbas pada perlambatan ekonomi. Friedman berbeda pendapat dengan Keynes saat merumuskan penyebab depresi ekonomi. Keynes menyebut kegagalan pasar (market failure) sebagai penyebab depresi ekonomi. Friedman menunjuk penyebabnya adalah kegagalan pemerintah (government failure).

Meski demikian teori yang disampaikan oleh Keynes dalam bukunya yang menunjukkan bahwa pengangguran dapat terjadi dan bahkan untuk jangka waktu yang tidak terbatas, telah diterima oleh para ahli ekonomi. Kelompok yang menerima pendapat Keynes ini disebut dengan *Keynesian Economist* yang sampai sekarang diterima sebagai teori yang benar dan dipraktikkan di banyak negara.

Dengan demikian sesuai dengan pengertian makro yang berarti besar maka teori ekonomi makro menganalisis kegiatan perekonomian secara keseluruhan. Analisisnya bersifat global dan tidak memerhatikan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh unit-unit kecil dalam perekonomian. Misalnya, untuk menganalisis mengenai kegiatan pembeli (konsumen), yang dianalisis bukanlah mengenai perilaku seorang pembeli saja, tetapi keseluruhan pembeli yang ada di pasar. Sama halnya dengan menganalisis perilaku produsen, yang diamati bukanlah kegiatan seorang produsen, tetapi kegiatan seluruh produsen dalam perekonomian.

Analisis dari teori ekonomi makro berusaha memberi jawaban pada pertanyaan-pertanyaan yang dikemukakan, yaitu:

- a. mengapa pertumbuhan ekonomi tidak selalu kuat?
- b. mengapa kegiatan ekonomi tidak berkembang dengan stabil?
- c. faktor-faktor apakah yang menentukan tingkat kegiatan suatu perekonomian?
- d. mengapa pengangguran dan kenaikan harga-harga selalu berlaku?

Selain menjelaskan faktor-faktor yang menentukan tingkat kegiatan ekonomi negara dan keadaan-keadaan yang menciptakan berbagai masalah, ekonomi makro juga menjelaskan tahapan yang dapat digunakan pemerintah untuk masalah-masalah tersebut. Berikut ini adalah aspek-aspek yang dibahas dalam ekonomi makro.

1. Penentuan Kegiatan Ekonomi

Analisis mengenai penentuan tingkat kegiatan yang dicapai suatu perekonomian merupakan bagian terpenting dari analisis ekonomi makro. Berdasarkan pandangan Keynes, analisis ekonomi makro menunjukkan bahwa tingkat kegiatan perekonomian ditentukan oleh pengeluaran agregat dalam perekonomian. Komponen pengeluaran agregat dibedakan menjadi empat golongan, yaitu pengeluaran konsumsi rumah tangga, investasi perusahaan-perusahaan, pengeluaran konsumsi dan investasi pemerintah, dan ekspor.

2. Masalah Pengangguran dan Inflasi

Teori ekonomi makro dilengkapi pula dengan analisis yang lebih mendalam mengenai bentuk masalah yang akan timbul bila pengeluaran agregat akan mencapai tingkat yang diperlukan untuk mewujudkan kesempatan kerja penuh tanpa inflasi. Tujuan ini sukar untuk dicapai. Pada umumnya pengeluaran agregat yang sebenarnya adalah lebih rendah daripada yang diperlukan untuk mencapai kesempatan kerja penuh. Keadaan ini menyebabkan kenaikan harga atau inflasi. Kedua masalah tersebut (pengangguran dan inflasi) menimbulkan dampak yang tidak baik pada masyarakat dan pada kegiatan perekonomian dalam jangka panjang. Kedua masalah tersebut harus dihindari atau keseriusan masalahnya dikurangi.

3. Peranan Kebijakan Pemerintah

Salah satu aspek penting dari ciri kegiatan perekonomian yang menjadi titik awal analisis di teori ekonomi makro adalah pandangan bahwa sistem pasar bebas tidak selalu dapat mewujudkan penggunaan tenaga kerja penuh, kestabilan harga-harga, dan pertumbuhan ekonomi yang kuat. Langkah-langkah pemerintah yang utama untuk mengatasi masalah pengangguran dan inflasi dibedakan menjadi dua bentuk kebijakan, yaitu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kebijakan fiskal adalah upaya pemerintah mengubah struktur serta jumlah pajak dan pengeluarannya dengan tujuan memengaruhi tingkat kegiatan perekonomian. Kebijakan moneter adalah langkah-langkah pemerintah untuk memengaruhi jumlah uang di perekonomian atau mengubah suku bunga dengan tujuan untuk mengatasi masalah perekonomian yang dihadapi. Tujuan utama dari kebijakan moneter adalah menjaga stabilitas ekonomi dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.

1.3 Permasalahan yang Dihadapi Pemerintah di Bidang Ekonomi

Ekonomi makro, yang merupakan salah satu cabang ilmu, ekonomi dapat membantu memecahkan permasalahan kebijakan ekonomi secara makro. Permasalahan kebijakan ekonomi makro mencakup masalah-masalah yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengendalian perekonomian secara umum. Tugas pengendalian ekonomi makro adalah mengusahakan agar perekonomian dapat bekerja dan tumbuh secara seimbang, terhindar dari keadaan-keadaan yang dapat mengganggu keseimbangan umum tersebut. Dua masalah ekonomi utama yang dihadapi setiap masyarakat di suatu negara adalah pengangguran dan inflasi. Kedua masalah ekonomi ini dapat menyebabkan dampak negatif yang bersifat ekonomi, politik, dan sosial. Untuk menghindari berbagai dampak negatif yang mungkin timbul berbagai kebijakan ekonomi perlu dijalankan. Berikut ini masalah-masalah utama yang akan selalu dihadapi suatu negara.

1. Masalah Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator utama untuk mengetahui kinerja perekonomian. Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi jika jumlah produksi barang dan jasa meningkat daripada tahun sebelumnya. Besarnya produksi barang dan jasa ini disebut dengan Produk Domestik Bruto (PDB).

Jadi, yang disebut sebagai "pertumbuhan ekonomi" tidak lain adalah peningkatan nilai total barang dan jasa yang diproduksi dalam sebuah perekonomian.

Pemerintah dalam hal ini berkepentingan memantau perkembangan pertumbuhan PDB baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Mengapa demikian? Dengan PDB, pemerintah dapat mengukur besarnya dampak, efektivitas, dan efisiensi campur tangan pemerintah terhadap perekonomian.

Indonesia pernah mengalami masa pertumbuhan ekonomi tinggi pada rentang tahun 1970–1980. Pada saat itu pertumbuhan ekonomi mencapai rata-rata 8% per tahun. Pada masa krisis multidimensional tahun 1997 terjadi sebaliknya. Krisis moneter yang tidak hanya terjadi di Indonesia telah menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di titik terendah. Rata-rata pertumbuhan ekonomi antara tahun 2001 hingga 2005 hanya sebesar 4,7% (tidak lebih dari 5% per tahun). Rendahnya pertumbuhan ekonomi ini mengakibatkan menurunnya tingkat kesejahteraan rakyat dan munculnya berbagai masalah sosial yang mendasar misalnya pengangguran.

2. Masalah Inflasi

Inflasi merupakan salah satu masalah ekonomi yang banyak dialami oleh hampir semua negara. Inflasi menunjukkan gejala kenaikan harga yang bersifat umum dan terus-menerus. Naiknya harga beras tidak akan memicu inflasi jika harga komoditas-komoditas lain tidak naik, dan atau jika kenaikan harga beras tidak terjadi terus-menerus. Dari sisi teori ekonomi, gejala inflasi menunjukkan terjadinya kelebihan permintaan (*excess demand*) di tingkat makro. Dalam arti, dari gejala inflasi dapat disimpulkan bahwa seluruh atau hampir seluruh industri dalam perekonomian mengalami kelebihan permintaan. Selain tekanan permintaan, inflasi dapat terjadi karena dorongan biaya, yaitu kenaikan biaya produksi yang berdampak pada naiknya harga barang dan jasa. Oleh sebab itu, kondisi semacam itu dianggap sebagai masalah dan memerlukan kebijakan khusus untuk mengatasinya. Walaupun tidak secara otomatis menurunkan standar hidup, inflasi tetap merupakan masalah, karena dapat mengakibatkan redistribusi pendapatan di antara anggota masyarakat, dapat menyebabkan penurunan efisiensi ekonomi, dan dapat menyebabkan perubahan output dan kesempatan kerja di masyarakat.

Berdasarkan sumber dan penyebab kenaikan harga-harga yang berlaku, inflasi dibedakan menjadi tiga bentuk yaitu inflasi tarikan permintaan, inflasi desakan biaya, dan inflasi diimpor.

a. Inflasi Tarikan Permintaan

Inflasi ini biasanya terjadi pada masa perekonomian berkembang dengan pesat. Kesempatan kerja yang tinggi menciptakan tingkat pendapatan yang tinggi dan selanjutnya menimbulkan pengeluaran yang melebihi kemampuan ekonomi mengeluarkan barang dan jasa. Pengeluaran yang berlebihan ini akan menimbulkan inflasi. Selain dalam masa perekonomian berkembang pesat, inflasi tarikan permintaan juga dapat berlaku pada masa perang atau ketidakstabilan politik yang terus menerus. Dalam masa ini, pemerintah membelanjakan jauh melebihi pajak yang dipungutnya. Untuk membiayai kelebihan pengeluaran tersebut pemerintah terpaksa mencetak uang atau meminjam dari bank sentral. Pengeluaran pemerintah yang berlebihan tersebut menyebabkan permintaan agregat akan melebihi kemampuan ekonomi tersebut untuk menyediakan barang dan jasa sehingga keadaan ini akan mewujudkan inflasi.

b. Inflasi Desakan Biaya

Inflasi ini juga terjadi pada masa perekonomian berkembang dengan pesat ketika tingkat pengangguran sangat rendah. Apabila perusahaan-

perusahaan masih menghadapi permintaan yang bertambah, mereka akan berusaha menaikkan produksi dengan cara memberikan gaji dan upah yang lebih tinggi pada pekerjanya dan mencari pekerja baru dengan tawaran pembayaran yang lebih tinggi ini. Langkah ini mengakibatkan biaya produksi meningkat, yang akhirnya menyebabkan kenaikan harga-harga berbagai barang.

c. Inflasi Diimpor

Inflasi diimpor bersumber dari kenaikan harga-harga barang yang diimpor. Inflasi ini akan terjadi apabila barang-barang impor yang mengalami kenaikan harga mempunyai peran yang penting di kegiatan pengeluaran perusahaan-perusahaan.

Inflasi yang terjadi di berbagai negara diakibatkan oleh banyak faktor. Pada umumnya inflasi berasal dari salah satu atau gabungan dari dua masalah berikut ini.

a. Adanya Tuntutan dari Pekerja untuk Menaikkan Upah

Apabila pengusaha mengalami kesulitan untuk mencari tambahan pekerja untuk menambah produksinya, pekerja yang ada akan terdorong untuk menuntut kenaikan upah. Jika tuntutan kenaikan upah dipenuhi maka akan terjadi kenaikan biaya produksi dari barang dan jasa yang dihasilkan. Kenaikan biaya produksi tersebut akan mendorong perusahaan-perusahaan untuk menaikkan harga-harga barang yang dihasilkannya. Selain itu inflasi dapat pula sebagai akibat dari kenaikan harga-harga barang impor, penambahan penawaran uang yang berlebihan tanpa diikuti oleh pertambahan produksi dan penawaran barang serta adanya kekacauan politik dan ekonomi

b. Tingkat Pengeluaran Agregat yang Melebihi Kemampuan Perusahaan untuk Menghasilkan Barang dan Jasa

Keinginan untuk mendapatkan barang yang mereka butuhkan akan mendorong para konsumen meminta barang itu pada harga yang lebih tinggi sehingga permintaan yang meningkat akan memengaruhi tingkat harga pula. Sebaliknya, para pengusaha akan menahan barangnya dan hanya akan menjual barangnya pada setiap pembeli yang bersedia membayar pada harga yang lebih tinggi sehingga kecenderungan-kecenderungan ini akan menyebabkan kenaikan harga. Perubahan yang terjadi pada permintaan dan penawaran menyebabkan perubahan pada tingkat harga pula.

Inflasi secara nyata memberikan dampak negatif bagi individu, masyarakat, dan kegiatan perekonomian secara keseluruhan. Pada umumnya inflasi memberikan pengaruh pada menurunnya taraf kemakmuran masyarakat. Sebagian besar masyarakat memiliki gaji tetap. Sedangkan inflasi biasanya terjadi lebih cepat dari kenaikan upah pekerja sehingga upah pekerja mengalami penurunan. Dengan demikian kemakmuran masyarakat pun mengalami penurunan. Inflasi yang semakin meningkat akan mengurangi investasi, mengurangi ekspor, dan menaikkan impor. Hal ini dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi.

3. Masalah Pengangguran

Industrialisasi yang melanda negara-negara berkembang saat ini, selain menciptakan suatu keberhasilan juga menimbulkan berbagai dampak yang sulit, yaitu masalah pengangguran dan kesempatan kerja. Tidak hanya negara maju yang menghadapi masalah pengangguran dan kesempatan kerja, hampir semua negara di dunia termasuk Indonesia belum mampu menyediakan lapangan kerja yang cukup memadai. Kurangnya lapangan kerja merupakan masalah yang harus ditangani dengan sungguh-sungguh oleh pemerintah.

Pengangguran terjadi karena jumlah tenaga kerja atau angkatan kerja melebihi tingkat kesempatan kerja yang tersedia. Berdasarkan tingkat pengangguran, dapat diketahui apakah perekonomian berada pada tingkat kesempatan kerja penuh (full employment) atau tidak. Secara teoretis perekonomian dianggap mencapai tingkat kesempatan kerja penuh apabila tenaga kerja yang tersedia seluruhnya digunakan. Di Indonesia, upaya untuk menekan tingkat pengangguran dilakukan melalui pengendalian tingkat pertumbuhan penduduk. Program keluarga berencana merupakan salah satu alternatif untuk menekan laju pertumbuhan penduduk. Hal ini disebabkan pembangunan ekonomi tidak mempunyai arti bila diikuti dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang terlalu tinggi.

Masalah pengangguran tidak hanya dalam konteks nasional, tetapi dalam konteks internasional yang memandang negara-negara yang sedang berkembang sebagai bagian peningkatan independensi (saling ketergantungan) yang sangat timpang di sistem ekonomi dunia. Di negara maju, titik berat strategi pembangunan lebih ditekankan pada upaya untuk mengalihkan pertumbuhan menuju ke usaha-usaha yang berhubungan dengan kualitas hidup. Usaha-usaha tersebut diwujudkan secara prinsip dalam perubahan keadaan lingkungan hidup.

Masalah pengangguran tidak jauh dari masalah kemiskinan. Keduanya selalu beriringan, karena dampak dari pengangguran adalah kemiskinan. Dengan demikian problem pengangguran, kemiskinan, dan distribusi pendapatan menjadi sama-sama penting dalam pembangunan negara. Dengan demikian, tepat sekali apabila inti pokok sasaran pembangunan terfokus pada pemberantasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang diwujudkan dengan pembagian pendapatan secara adil dan merata.

Sebagai upaya untuk mencapai sasaran pembangunan tersebut, pemerintah perlu membuat kebijakan-kebijakan untuk mengatasi masalah pengangguran yang bersifat ekonomis. Kebijakan-kebijakan yang bersifat ekonomis antara lain:

a. Menyediakan Lowongan Pekerjaan

Kebijakan pemerintah untuk mengatasi pengangguran merupakan usaha yang terus menerus, dalam arti usaha jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam jangka panjang usaha mengatasi pengangguran diperlukan karena jumlah penduduk yang terus menerus meningkat. Untuk menghindari masalah pengangguran yang semakin serius, tambahan lowongan pekerjaan yang cukup, perlu disediakan dari tahun ke tahun. Dalam jangka pendek pengangguran dapat menjadi bertambah serius, yaitu ketika berlaku kemunduran atau pertumbuhan ekonomi yang lambat. Dalam masa seperti itu kesempatan kerja bertambah dengan lambat dan pengangguran meningkat. Untuk menghadapi keadaan yang seperti ini, usaha-usaha pemerintah untuk mengatasi pengangguran perlu ditingkatkan melalui berbagai tindakan nyata.

b. Meningkatkan Taraf Kemakmuran Rakyat

Kenaikan kesempatan kerja dan pengurangan pengangguran sangat berhubungan dengan pendapatan nasional dan tingkat kemakmuran masyarakat. Kenaikan kesempatan kerja menambah produksi nasional dan pendapatan nasional. Perkembangan ini selanjutnya akan menambah kemakmuran masyarakat. Ukuran kasar dari kemakmuran masyarakat adalah pendapatan perkapita yang diperoleh dengan cara membagikan pendapatan nasional dengan jumlah penduduk. Dengan demikian kesempatan kerja yang semakin meningkat dan pengangguran yang semakin berkurang bukan saja menambah pendapatan nasional, tetapi juga meningkatkan pendapatan perkapita. Pada akhirnya dampak dari perubahan ini adalah kemakmuran masyarakat akan meningkat pula.

c. **Memperbaiki Pembagian Pendapatan**

Pengangguran yang semakin tinggi memunculkan dampak yang buruk kepada kesamarataan pembagian pendapatan. Pekerja yang menganggur tidak memperoleh pendapatan sehingga pengangguran yang terlalu besar cenderung untuk menurunkan upah golongan berpendapatan rendah. Sebaliknya, pada kesempatan kerja yang tinggi tuntutan kenaikan upah akan semakin mudah diperoleh. Dari keadaan ini dapat disimpulkan bahwa usaha menaikkan kesempatan kerja dapat juga digunakan sebagai alat untuk memperbaiki pembagian pendapatan dalam masyarakat.

4. Masalah Kemiskinan dan Pemerataan Distribusi Pendapatan

Pemerintah selalu berupaya agar alokasi sumber daya dapat dinikmati oleh seluruh anggota masyarakat. Meski demikian karena keadaan masyarakat sangat beragam dan tingkat kemajuan ekonomi yang masih lemah maka sering muncul masalah kesenjangan distribusi pendapatan.

a. **Kemiskinan**

Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan antara lain tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi, dan kondisi di mana seseorang atau masyarakat tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.

Bagaimana untuk mengidentifikasi kondisi kemiskinan di sekitar? Pertama-tama dengan mengukur kemiskinan absolut. Kemiskinan absolut menunjukkan keadaan seseorang yang memiliki pendapatan di bawah garis kemiskinan (poverty line), yaitu besarnya nilai rupiah yang harus dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal. Kedua, dengan mengukur kemiskinan relatif, yaitu orang yang mempunyai tingkat pendapatan relatif lebih rendah dibanding masyarakat di sekitarnya. Berikut adalah karakteristik dari kondisi masyarakat yang miskin.

- a) Terbatasnya kecukupan dan mutu pangan.
- b) Beban tanggungan yang tinggi karena banyaknya jumlah anak di keluarga.
- c) Terbatasnya akses dan rendahnya mutu kesehatan.
- d) Terbatasnya akses terhadap perumahan sehat, air bersih, dan sanitasi.
- e) Terbatasnya kesempatan kerja dan berusaha.

b. **Kesenjangan Distribusi Pendapatan**

Kesenjangan distribusi pendapatan menunjukkan adanya perbedaan yang mencolok antara golongan masyarakat yang berpenghasilan tinggi dengan

masyarakat yang berpenghasilan rendah. Tinggi rendahnya kesenjangan pendapatan dapat diukur melalui kriteria bank, yaitu :

- a) Apabila kelompok 40% penduduk termiskin memperoleh pendapatan lebih kecil dari 12% dari keseluruhan pendapatan nasional maka dinyatakan ketimpangan pendapatannya tinggi.
- b) Apabila kelompok 40% penduduk termiskin memperoleh pendapatan 12–7% dari keseluruhan pendapatan nasional maka dinyatakan ketimpangannya sedang (moderat).
- c) Apabila kelompok 40% penduduk termiskin memperoleh pendapatan lebih dari 17% dan keseluruhan pendapatan nasional maka dinyatakan bahwa tingkat ketimpangannya rendah.

1.4 Kebijakan Pemerintah untuk Mengatasi Masalah Ekonomi

Berbeda dengan ekonomi mikro, dalam ekonomi makro pembahasan pemerintah dalam perekonomian mempunyai porsi yang relatif besar. Pemerintah berperan penting untuk mengatasi masalah ekonomi melalui kebijakan-kebijakannya.

1. Sasaran Kebijakan Ekonomi

Untuk menghadapi tantangan ekonomi Indonesia saat ini, pemerintah menetapkan tiga tujuan utama yang menjadi fokus kerja ekonomi pemerintah.

a. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi

Bagi suatu negara yang sedang membangun, pertumbuhan ekonomi sangat penting dan dibutuhkan. Hal ini karena tanpa pertumbuhan tidak akan terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat, kesempatan kerja, produktivitas, dan distribusi pendapatan. Pertumbuhan ekonomi juga penting untuk mempersiapkan perekonomian menjalani tahapan kemajuan selanjutnya.

b. Meningkatkan Kualitas Pertumbuhan Ekonomi

Dengan jumlah pengangguran yang semakin bertambah, kualitas pertumbuhan perlu ditingkatkan agar kegiatan ekonomi dapat menciptakan lapangan kerja yang lebih besar dan mengurangi penduduk miskin.

c. Menjaga Stabilitas Ekonomi Makro

Kestabilan ekonomi makro menyangkut tiga elemen, yaitu tingkat bunga, tingkat inflasi, dan nilai tukar. Ketiga elemen tersebut saling memengaruhi satu sama lain. Ketiga elemen tersebut selain harus tetap stabil juga harus berada dalam tingkat kewajaran. Artinya, ketiganya mampu menggerakkan roda perekonomian secara sehat.

2. Alat-Alat Kebijakan Ekonomi Makro

Pencapaian tujuan kebijakan ekonomi makro sangat ditentukan oleh bagaimana memilih cara terbaik untuk melaksanakan. Alat-alat kebijakan ekonomi makro menyangkut perubahan beberapa variabel ekonomi yang secara langsung atau tidak langsung akan memengaruhi tujuan ekonomi. Alat kebijakan ekonomi makro yang diterapkan pemerintah untuk berbagai kondisi ekonomi antara lain:

a. Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang mengatur tentang penerimaan dan pengeluaran negara. Dua elemen kebijakan fiskal adalah pengeluaran pemerintah dan pajak. Sumber-sumber penerimaan negara antara lain dari pajak, penerimaan bukan pajak serta bantuan/pinjaman dari luar negeri. Selain itu, pengeluaran dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu pengeluaran yang bersifat rutin seperti membayar gaji pegawai, belanja barang serta pengeluaran yang bersifat pembangunan. Dengan demikian, kebijakan fiskal merupakan kebijakan pengelolaan keuangan negara dan terbatas pada sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran negara yang tercantum dalam APBN.

b. Kebijakan Moneter

Kebijakan Moneter adalah kebijakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang dilakukan antara lain melalui pengendalian jumlah uang beredar dan atau suku bunga. Contohnya kebijakan moneter seperti upaya pemerintah untuk menambah atau mengurangi jumlah uang beredar. Kebijakan moneter dapat berupa kebijakan uang ketat (tight money) atau kebijakan uang longgar (easy money). Kebijakan uang ketat berarti pemerintah ingin menurunkan jumlah uang beredar dan sebaliknya, kebijakan uang longgar berarti pemerintah ingin menaikkan jumlah uang beredar. Beberapa kebijakan fiskal dan moneter yang diambil pemerintah pada saat krisis untuk merespons turunnya nilai rupiah adalah sebagai berikut.

a) Kontraksi rupiah secara besar-besaran melalui kebijakan fiskal (APBN) dengan cara menekan pengeluaran dan menunda pembayaran-pembayaran yang tidak mendesak.

b) Bank Indonesia meningkatkan suku bunga sehingga suku bunga SBI (Sertifikat Bank Indonesia) mencapai 70% dengan maksud membatasi ekspansi kredit perbankan yang dikonversikan ke dalam SBI pada Bank Indonesia.

- c) Bank Indonesia melakukan intervensi pasar dengan menjual Dollar pada saat diperlukan jika rupiah menunjukkan tanda-tanda yang benar-benar mengkhawatirkan.
 - d) Pembatalan dan penundaan berbagai mega proyek pemerintah untuk memperketat pengeluaran melalui APBN serta menguarangi laju impor barang agar cadangan devisa tidak semakin terkuras. Demikian pula pihak swasta dihimbau untuk menunda berbagai proyek yang bernilai besar agar impor dapat dikurangi untuk membantu cadangan devisa nasional.
- c. Kebijakan Penetapan Harga
- Kebijakan penetapan harga adalah kebijakan untuk menentukan harga-harga pada tingkat tertentu terhadap komoditas yang menguasai hajat hidup orang banyak. Hal ini bertujuan untuk menstabilkan harga dan mengendalikan inflasi. Misalnya, harga sembilan bahan pokok, barang-barang strategis seperti semen dan pupuk, tarif dasar listrik, ataupun beberapa jenis BBM.
- d. Kebijakan Ekonomi Internasional
- Dalam hal ini pemerintah dan Bank Indonesia dapat mengintervensi kegiatan perdagangan internasional. Kebijakan-kebijakan tersebut biasanya juga dapat digunakan untuk mempertahankan keseimbangan pasar valuta asing. Hal ini tercermin dari kebijakan pemerintah untuk mengatur nilai tukar mata uang asing terhadap nilai mata uang di dalam negeri. Hal ini cuma sebagai bentuk intervensi pemerintah, namun mekanisme tetap mengikuti mekanisme pasar. Selain itu untuk memantau keadaan neraca pembayaran untuk memengaruhi nilai tukar. Hal tersebut berhubungan dengan kegiatan ekspor dan impor. Contohnya adalah peningkatan ekspor nonmigas, pembatasan, dan pengawasan perdagangan, penentuan tarif impor, atau subsidi ekspor, mendorong industri kecil di Indonesia untuk melakukan kegiatan ekspor-impor. Dengan semakin terbukanya perekonomian dunia berarti semakin besar dan pentinglah arti kebijakan ekonomi internasional.

IKHTISAR

1. Ilmu ekonomi mempelajari bagaimana manusia melakukan pembagian sumber daya yang tersedia secara efisien untuk memenuhi kebutuhannya. Untuk melakukan hal tersebut, manusia terkendala oleh waktu, keterbatasan sumber daya, keinginan manusia yang tak terbatas, dan ketidakpastian.
2. Ilmu ekonomi mikro mempelajari variabel-variabel ekonomi di lingkup yang kecil seperti rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, dan struktur

industri. Di ekonomi mikro dipelajari tentang bagaimana individu menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk memenuhi kebutuhannya sehingga tercapai tingkat kepuasan yang optimal serta bagaimana perilaku produsen dan konsumen saat berinteraksi di pasar.

3. Ilmu ekonomi makro mempelajari perilaku ekonomi sebagai agregat (keseluruhan) tentang kehidupan ekonomi. Analisis dijalankan terhadap keseluruhan produsen dan konsumen dalam perekonomian, terutama tentang pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, berbagai kebijakan perekonomian yang berhubungan, serta pengaruhnya terhadap beragam tindakan pemerintah (misalnya perubahan tingkat pajak) terhadap hal-hal tersebut.
4. Masalah pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, kemiskinan dan pemerataan distribusi pendapatan adalah permasalahan yang dihadapi pemerintah di bidang ekonomi. Upaya pemerintah untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi tersebut melalui kebijakan fiskal, kebijakan moneter, kebijakan penetapan harga, dan kebijakan ekonomi internasional.

BAB 2

PENDAPATAN NASIONAL

KOMPETENSI DASAR

Menjelaskan konsep pendapatan nasional, inflasi dan indeks harga

INDIKATOR

1. Mahasiswa menjelaskan konsep pendapatan nasional
2. Mahasiswa menyebutkan manfaat perhitungan pendapatan nasional
3. Mahasiswa menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi tabungan, konsumsi, dan investasi
4. Mahasiswa menjelaskan penyebab dan cara mengatasi inflasi
5. Mahasiswa menjelaskan indeks harga dan peranannya dalam ekonomi

Kegiatan ekonomi seperti produksi di pabrik dalam sebuah negara atau wilayah akan memberikan kontribusi terhadap pendapatan nasional. Pendapatan nasional merupakan masalah pokok dalam pembahasan ekonomi makro. Salah satu tolok ukur keberhasilan perekonomian negara diukur dari pendapatan nasionalnya. Meskipun bukan merupakan satu-satunya ukuran untuk menilai keberhasilan perekonomian suatu negara, namun cukup representatif dan lazim digunakan. Dengan mengetahui besarnya pendapatan nasional maka akan diketahui seberapa efisien sumber daya atau faktor produksi digunakan untuk memproduksi barang dan jasa. Pendapatan nasional merupakan gambaran tentang masalah-masalah yang sedang dihadapi suatu perekonomian. Pendapatan nasional bukan hanya berguna untuk menilai perkembangan ekonomi suatu negara dari waktu ke waktu, tetapi juga dapat digunakan untuk membandingkannya dengan negara lain. Dari rincian secara sektoral dan angka pendapatan nasional dapat diterangkan struktur perekonomian negara yang bersangkutan, pertumbuhan ekonomi, dan pendapatan perkapita.

2.1 Konsep Pendapatan Nasional

Setiap kegiatan ekonomi di suatu negara pasti berkaitan pendapatan nasional. Usaha-usaha pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh setiap negara pasti diarahkan untuk meningkatkan untuk menstabilkan pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam periode tertentu yang dihitung berdasarkan nilai pasar. Setiap negara memiliki suatu sistem perhitungan pendapatan nasional. Sistem tersebut merupakan suatu cara mengumpulkan informasi perhitungan terhadap hal-hal sebagai berikut.

- a. Nilai berbagai ibarang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara
- b. Nilai berbagai jenis pengeluaran atas produk nasional
- c. Jumlah pendapatan yang diterima oleh berbagai faktor produksi yang digunakan untuk menciptakan produk nasional tersebut.

Berikut beberapa konsep tentang pendapatan nasional dalam sistem perekonomian di Indonesia.

1. Produk Domestik Bruto (PDB)/Gross Domestic Product (GDP)

Produk Domestik Bruto (PDB)/Gross Domestic Product (GDP) merupakan salah satu instrumen penting untuk dapat menghitung pendapatan nasional. Berdasarkan metode ini pendapatan nasional adalah barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam periode tertentu. Dengan metode ini, pendapatan nasional dihitung dengan menjumlahkan setiap nilai tambah (value added) proses produksi di dalam masyarakat (warga negara asing dan penduduk) dari berbagai lapangan usaha suatu negara dalam kurun waktu satu periode (biasanya satu tahun). Dengan demikian, PDB merupakan nilai dari akhir keseluruhan barang/jasa yang dihasilkan oleh semua unit ekonomi dalam suatu negara, termasuk barang dan jasa yang dihasilkan warga negara lain yang tinggal di negara tersebut. Penghitungan nilai PDB dapat dilakukan atas dua macam dasar harga yaitu :

- a. PDB atas dasar harga berlaku, merupakan PDB yang dihitung dengan dasar harga yang berlaku pada tahun tersebut. PDB atas dasar harga berlaku, berfungsi untuk melihat dinamika/perkembangan struktur ekonomi yang riil pada tahun tersebut.
- b. PDB atas dasar harga konstan, merupakan PDB yang dihitung dengan dasar harga yang berlaku pada tahun tertentu. PDB atas dasar harga konstan, berfungsi untuk melihat pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. Contohnya jika ingin mengetahui berapa persen kenaikan PDB dari tahun

2016, 2017 dan tahun 2018, karena nilai/harga suatu produk tiap tahun berubah-ubah maka kita harus mengubah nilai PDB tahun 2016 dan 2017 dengan dasar harga tahun 2018 sehingga akan terlihat dengan jelas besaran kenaikan dari tiap tahunnya.

2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Pembangunan suatu daerah dapat berhasil dengan baik bila didukung oleh perencanaan yang tepat sebagai dasar penentuan strategi, pengambilan keputusan dan evaluasi hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai. Untuk menyusun perencanaan pembangunan yang baik perlu memberdayakan data statistik yang memuat informasi tentang kondisi riil suatu daerah pada saat tertentu sehingga kebijakan dan strategi yang telah atau akan diambil dapat dimonitor dan dievaluasi hasil-hasilnya. Salah satu indikator ekonomi makro yang biasanya digunakan untuk mengevaluasi hasil-hasil pembangunan di suatu daerah dalam lingkup kabupaten dan kota adalah Produk Domestik Regional Bruto atau PDRB kabupaten/kota menurut lapangan usaha (Industrial Origin). Penghitungan PDRB diperoleh melalui tiga pendekatan yang dijelaskan sebagai berikut.

1) Pendekatan Produksi

Dalam pendekatan ini PDRB adalah jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (satu tahun). Unit produksi dalam penyajiannya dikelompokkan dalam sembilan sektor atau lapangan usaha yaitu:

- (1) Pertanian.
- (2) Pertambangan dan Penggalian.
- (3) Industri Pengolahan.
- (4) Listrik, Gas, dan Air Bersih.
- (5) Bangunan.
- (6) Perdagangan, Hotel, dan Restoran.
- (7) Pengangkutan dan Komunikasi.
- (8) Jasa Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan.
- (9) Jasa-jasa.

2) Pendekatan Pendapatan

Menurut pendekatan pendapatan, PDRB adalah penjumlahan semua komponen permintaan terakhir, yaitu:

- a. Pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta yang tidak mencari untung.
- b. Konsumsi pemerintah.
- c. Pembentukan modal tetap domestik bruto.
- d. Perubahan stok.
- e. Ekspor neto, dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Ekspor neto adalah ekspor dikurangi impor.

3) Pendekatan Pengeluaran

Menurut pendekatan pengeluaran, PDRB merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor produksi yang ikut serta di proses produksi di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan. Semua hitungan tersebut sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam pengertian PDRB kecuali faktor pendapatan, termasuk pula komponen penyusutan dan pajak tidak langsung neto. Jumlah semua komponen pendapatan ini menurut sektor disebut sebagai nilai tambah bruto sektoral. Produk domestik bruto merupakan jumlah dari nilai tambah bruto seluruh sektor (lapangan usaha).

Dari tiga pendekatan tersebut secara konsep jumlah pengeluaran tadi harus sama dengan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan dan harus sama pula dengan jumlah pendapatan untuk faktor-faktor produksinya. Selanjutnya produk domestik regional bruto yang telah diuraikan sebelumnya disebut sebagai Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Pasar, karena mencakup komponen pajak tidak langsung neto.

3. Produk Nasional Bruto (PNB)/Gross National Product (GNP)

Produk Nasional Bruto (PNB)/Gross National Product (GNP) adalah jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh faktor-faktor produksi milik warga negara yang tinggal di dalam negeri maupun di luar negeri, tetapi tidak termasuk warga negara asing yang tinggal di negara tersebut, atau dengan kata lain PNB/GNP adalah jumlah Produk Domestik Bruto ditambah dengan pendapatan neto dari luar negeri (penghasilan neto) adalah penghasilan dari warga negara yang bekerja di luar negeri dikurangi penghasilan warga negara lain yang bekerja di dalam negeri. Hal ini dapat dirumuskan sebagai berikut.

PNB = PDB + Pendapatan Neto dari luar negeri

di mana,

PNB = Produk Nasional Bruto/Gross National Product (GNP)

PDB = Produk Domestic Bruto/Gross Domestic Product (GDP)

Pendapatan Neto = Pendapatan dari warga negara yang tinggal di luar negeri
dikurangi pendapatan warga negara asing yang bekerja
di dalam negeri

Contoh :

Mr. Irfan warga negara Indonesia, bekerja di Indonesia dengan pendapatan Rp 4.000.000,00. Mr. Sam Soul, warga negara asing tinggal dan bekerja di Indonesia, pendapatan Rp 6.000.000,00. Mr. Arrouf, warga negara Indonesia tinggal dan bekerja di luar negeri dengan pendapatan Rp 2.000.000,00. Berdasarkan hal tersebut maka perhitungan PNB sebagai berikut.

$$\begin{aligned} \text{PDB (GDP)} &= \text{pendapatan Mr. Irfan} + \text{pendapatan Mr. Sam Soul} \\ &= \text{Rp } 4.000.000,00 + \text{Rp } 6.000.000,00 \\ &= \text{Rp } 10.000.000,00 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Penghasilan Neto} &= \text{pendapatan Mr. Arrouf} - \text{pendapatan Mr. Sam Soul} \\ &= \text{Rp } 2.000.000,00 - \text{Rp } 6.000.000,00 \\ &= - \text{Rp } 4.000.000,00 \end{aligned}$$

dengan menerapkan rumus sebelumnya dapat diketahui nilai PNB adalah

$$\begin{aligned} \text{PNB (GNP)} &= \text{PDB} + \text{Penghasilan Neto} \\ &= \text{Rp } 10.000.000,00 + (-\text{Rp } 4.000.000,00) \\ &= \text{Rp } 6.000.000,00 \end{aligned}$$

4. Produk Nasional Neto (PNN)/Net National Product (NNP)

Produk Nasional Neto atau Net National Product atas dasar harga pasar yaitu GNP dikurangi depresiasi/penyusutan atas barang modal di proses produksi selama satu tahun. Persamaan matematikanya adalah

$$\text{NNP} = \text{GNP} - \text{Depresiasi}$$

Contoh:

Pada tahun 2003 GNP Indonesia atas dasar harga berlaku 2.007.191,1 miliar rupiah dan depresiasi/penyusutan sebesar 104.337,9 miliar maka:

$$\begin{aligned} \text{NNP} &= 2.007.191,1 - 104.337,9 \\ &= 1.902.853,2 \text{ miliar} \end{aligned}$$

5. Pendapatan Nasional Neto/Net National Income (NNI)

Pendapatan Nasional Neto merupakan pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Besarnya NNI dapat diperoleh dari NNP dikurang pajak tidak langsung yang dipungut pemerintah. Yang dimaksud pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain seperti pajak penjualan, pajak hadiah, dan sebagainya. NNI dirumuskan sebagai berikut.

$$\text{NNI} = \text{GNP} - \text{Depresiasi} - \text{Pajak tidak langsung}$$

Contoh:

Pada tahun 2003 GNP Indonesia atas dasar harga berlaku 2.007.191,1 miliar rupiah, sedangkan depresiasi/penyusutan sebesar 104.337,9 miliar dan pajak tidak langsung dikurangi subsidi sebesar 85.272,2 miliar maka:

$$\begin{aligned} \text{NNI} &= 2.007.191,1 - 104.337,9 - 85.272,2 \\ &= 1.817.519 \text{ miliar} \end{aligned}$$

6. Pendapatan Perseorangan/Personal Income (PI)

Personal Income adalah pendapatan yang diterima oleh setiap lapisan masyarakat dalam satu tahun. Pendapatan nasional tidak semuanya diterima oleh pemilik faktor produksi karena ada sebagian pendapatan yang tidak dibagikan antara lain: laba yang ditahan, pajak perseorangan, iuran jaminan sosial dan transfer payment/bantuan sosial. Transfer payment adalah penerimaan-penerimaan yang bukan merupakan balas jasa produksi tahun ini, melainkan diambil dari sebagian pendapatan nasional tahun lalu, contoh pembayaran dana pensiunan, tunjangan sosial bagi para pengangguran, bekas pejuang, bunga utang pemerintah, dan sebagainya. Untuk mendapatkan jumlah pendapatan perseorangan, NNI harus dikurangi dengan pajak laba perusahaan (pajak yang dibayar setiap badan usaha kepada pemerintah), laba yang tidak dibagi (sejumlah laba yang tetap ditahan di

dalam perusahaan untuk beberapa tujuan tertentu misalnya keperluan perluasan perusahaan), dan iuran pensiun (iuran yang dikumpulkan oleh setiap tenaga kerja dan setiap perusahaan dengan maksud untuk dibayarkan kembali setelah tenaga kerja tersebut tidak lagi bekerja). Rumusan untuk menghitung PI adalah:

$$\mathbf{PI = NNI - (Laba ditahan + pajak perseorangan + iuran jaminan sosial + transfer payment)}$$

7. Pendapatan Disposibel/Disposable Income (DI)

Pendapatan yang siap dibelanjakan (Disposable Income) adalah Personal Income setelah dikurangi pajak langsung (misalnya pajak bumi dan bangunan, pajak kendaraan bermotor dan sebagainya). Disposable income merupakan pendapatan yang siap digunakan untuk keperluan konsumsi maupun ditabung. Rumusan untuk menghitung DI adalah:

$$\mathbf{DI = PI - Pajak Langsung}$$

Tabungan (saving) yang disimpan di lembaga keuangan resmi (Bank) akan dapat menambah pendapatan nasional karena, saving ini akan dimanfaatkan untuk investasi, lewat investasi inilah pendapatan nasional dapat meningkat. Dengan demikian konsep pendapatan nasional dapat diurutkan seperti berikut.

$$\mathbf{GDP > GNP > NNP > NNI > PI > DI}$$

Perbandingan mengenai indikator pendapatan nasional akan lebih jelas bila diterapkan dalam angka seperti berikut.

1. GDP		Rp. 200.000,00
Pendapatan Neto dari Luar Negeri		Rp. 20.000,00
2. GNP		Rp. 180.000,00
Depresiasi/Penyusutan		Rp. 10.000,00
3. NNP		Rp. 170.000,00
Pajak tidak langsung		Rp. 6.000,00
4. NNI		Rp. 164.000,00
Laba ditahan	Rp. 15.000	
PPh Persh.	Rp. 5.000	
Iuran Sosial	Rp. 2.000 +	Rp. 22.000,00
5. PI		Rp. 142.000,00
Pajak Langsung		Rp. 10.000,00
6. DI		Rp. 132.000,00
Konsumsi		Rp. 94.000,00
Tabungan (saving)		Rp. 38.000,00

2.2 Manfaat Perhitungan Pendapatan Nasional

Selanjutnya akan dijelaskan manfaat yang dapat diperoleh dari mempelajari pendapatan nasional. Adapun manfaat tersebut sebagai berikut:

- a. Dapat mengetahui/menganalisis struktur ekonomi suatu negara;
- b. Dapat membandingkan perekonomian suatu negara, masyarakat bahkan keluarga dari suatu waktu ke waktu lainnya;
- c. Dapat membandingkan perekonomian antardaerah;
- d. Dapat menghitung atau memperkirakan pendapatan pribadi atau keluarga dalam satu periode tertentu.

Selain itu tujuan mempelajari perhitungan pendapatan nasional adalah sebagai berikut:

- a. Untuk melihat kemajuan masyarakat dan negara di bidang perekonomian serta melihat pemerataan pembangunan untuk mencapai keadilan dan kemakmuran;
- b. Untuk memperoleh taksiran akurat tentang nilai barang dan jasa yang dihasilkan suatu masyarakat dalam satu tahun;
- c. Untuk mengkaji dan mengendalikan faktor-faktor yang memengaruhi tingkat perekonomian suatu negara;
- d. Untuk membantu perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan berjangka untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.

Negara Indonesia adalah negara yang luas, subur dan kaya akan sumber daya alam (SDA) dan juga sumber daya manusia (SDM). Meski demikian hal tersebut belum menunjukkan bahwa Indonesia mempunyai pendapatan yang besar dan termasuk negara yang kaya. Jepang adalah negara kecil yang lebih sedikit sumber daya alamnya dan dukungan jumlah sumber daya manusianya, namun bukan berarti mempunyai pendapatan yang lebih kecil. Hal ini karena pendapatan nasional sangat berguna untuk mengetahui kondisi dan potensi ekonomi dalam suatu negara dalam periode waktu tertentu. Dalam konsep pendapatan nasional terdapat beberapa konsep yang akan dibahas satu persatu seperti berikut. Pendapatan Nasional (National Income) dapat ditinjau dari tiga pendekatan, yaitu pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran, dan pendekatan pendapatan.

1. Pendekatan Produksi

Berdasarkan pendekatan produksi, pendapatan nasional adalah barang dan jasa yang diproduksi di suatu negara dalam suatu periode tertentu, biasanya satu tahun. Dengan pendekatan ini, pendapatan nasional dihitung dengan

menjumlahkan setiap nilai tambah dari setiap proses produksi di dalam masyarakat (warga negara asing dan penduduk) dari berbagai lapangan usaha (sektor) dalam suatu negara untuk kurun waktu satu periode (biasanya satu tahun). Ada sebelas lapangan usaha yang memengaruhi pendapatan nasional dilihat dari pendekatan produksi, yaitu:

- (1) pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan;
- (2) pertambangan dan penggalian;
- (3) industri pengolahan;
- (4) listrik, gas dan air minum;
- (5) bangunan;
- (6) perdagangan, hotel dan restoran;
- (7) pengangkutan dan komunikasi;
- (8) bank dan lembaga keuangan lainnya;
- (9) sewa rumah;
- (10) pemerintahan dan pertahanan; dan
- (11) jasa-jasa.

Maksud dari pendekatan produksi ini, jumlah seluruh hasil produksi (output) suatu negara dalam satu tahun dikalikan harga satuan masing-masing sehingga bila dituliskan dalam rumus seperti sebagai berikut:

$$\mathbf{PDB/Y = \{(Q1 \cdot P1) + (Q2 \cdot P2) + \dots + (Qn \cdot Pn)\}}$$

Keterangan:

Y	=	Pendapatan Nasional (PDB)
Q1	=	Jumlah barang ke-1
P1	=	Harga barang ke-1
Q2	=	Jumlah barang ke-2
P2	=	Harga barang ke-2
Qn	=	Jumlah barang ke-n
Pn	=	Harga barang ke-n

Hasil perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan produksi ini dinamakan Produk Domestik Bruto (PDB) atau Gross Domestic Product (GDP). Untuk tingkat provinsi di Indonesia disebut Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Misalnya:

-	Nilai tambah sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan (1 th)	RpXXX
-	Nilai tambah sektor pertambangan dan penggalian (1 th)	RpXXX
-	Nilai tambah sektor industri pengolahan (1 th)	RpXXX
-	Nilai tambah sektor lain (1 th)	RpXXX

	Pendapatan Nasional/Produk Domestik Bruto	RpXXX

Dalam perhitungan GDP ada beberapa kegiatan produksi yang tidak masuk dalam perhitungan. Beberapa kegiatan tersebut sebagai berikut.

- Pembayaran transfer/pindahan, yaitu pemindahan sejumlah uang dari kantong yang satu ke kantong yang lain tanpa disertai produksi. Misalnya pembayaran pensiun, subsidi, undian, bunga atas utang negara, hadiah, warisan, dan sumbangan bencana alam.
- Kenaikan dan penurunan nilai barang-barang modal karena inflasi atau depresiasi. Transaksi saham dan obligasi juga tidak diperhitungkan dalam GDP karena tidak berhubungan dengan produksi baru.
- Kegiatan-kegiatan ilegal, antara lain penyelundupan barang-barang dagang, produksi ganja, dan heroin, serta kegiatan-kegiatan terlarang lainnya.
- Perdagangan barang-barang bekas, yang berarti tidak ada penciptaan produk baru. Misalnya seseorang membeli komputer bekas, sepeda bekas, dan lain sebagainya. Yang masuk dalam perhitungan pendapatan nasional adalah produksi baru.
- Kegiatan-kegiatan yang memang tidak dihitung, misalnya jasa ibu rumah tangga yang mencuci pakaian, memasak, dan membersihkan rumah, namun bila ibu rumah tangga tersebut mencuci pakaian ke tukang cuci serta membayar upahnya maka perbuatan tersebut dihitung dalam perhitungan sektor jasa.

2. Pendekatan Pengeluaran

Berdasarkan pendekatan pengeluaran, pendapatan nasional adalah jumlah pengeluaran secara nasional untuk membeli barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu periode, biasanya satu tahun. Jadi, berdasarkan metode pengeluaran, pendapatan nasional adalah penjumlahan seluruh pengeluaran yang dilakukan seluruh rumah tangga pelaku ekonomi (Rumah Tangga Konsumen, Rumah Tangga Produsen, Rumah Tangga Pemerintah dan Rumah Tangga Masyarakat Luar Negeri)

di suatu negara selama periode tertentu biasanya setahun. Hasil perhitungannya dinamakan Produk Nasional Bruto (PNB) atau Gross National Product (GNP). Pengeluaran-pengeluaran yang dimaksud adalah

Tabel 2.1 Pengeluaran Produk Nasional Bruto

No.	Rumah Tangga	Pengeluaran untuk	Lambang
1.	Konsumen	Konsumsi (<i>Consumption</i>)	C
2.	Produsen	Investasi (<i>Investment</i>)	I
3.	Pemerintah	Pengeluaran Pemerintah (<i>Government Expenditure</i>)	G
4.	Masyarakat Luar	Ekspor - Impor (<i>Export-Import</i>) (X - M)	(X - M)

Dari tabel tersebut, bila ditunjukkan dalam bentuk rumus maka akan seperti sebagai berikut.

$$\mathbf{PNB/Y = C + I + G + (X - M)}$$

Bila PNB (GNP) dibagi dengan jumlah penduduk akan menghasilkan pendapatan per kapita. Selain menggunakan pendapatan nasional, tingkat kemakmuran rakyat dapat diukur dari pendapatan perkapita. Besarnya pendapatan perkapita, sangat erat kaitannya dengan penambahan penduduk. Pendapatan perkapita menunjukkan kemampuan yang nyata dari suatu bangsa untuk menghasilkan barang dan jasa dan kenikmatan yang diperoleh setiap penduduk. Hasil penghitungan pendapatan perkapita sebenarnya tidak dapat secara langsung digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran dan kesejahteraan suatu negara. Hal ini disebabkan pendapatan perkapita kurang memerhatikan aspek distribusi pendapatan. Misalnya dua negara mempunyai pendapatan nasional yang sama besarnya, namun belum tentu kesejahteraan penduduk negara-negara tersebut sama. Misalkan pada tahun tertentu diketahui bahwa pendapatan nasional negara A dan pendapatan nasional negara B sama, yaitu Rp200 juta. Jumlah penduduk negara A adalah 200 jiwa sedangkan jumlah penduduk negara B adalah 400 jiwa. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa pendapatan rata-rata penduduk negara A adalah Rp200 juta dibagi 200 maka hasilnya Rp1.000.000,00 sedangkan pendapatan rata-rata penduduk B adalah Rp200 juta dibagi 400 adalah Rp500.000,00. Dengan demikian terlihat bahwa

pendapatan rata-rata penduduk di negara A lebih besar dibandingkan di negara B. Penduduk di negara A belum tentu lebih makmur dari negara karena bagaimana pendistribusian pendapatan di negara A atau B belum diketahui. Berdasarkan contoh tersebut, pendapatan rata-rata penduduk negara A sebesar Rp1.000.000,00, artinya nilai barang dan jasa yang dapat diperoleh masing-masing penduduk sebesar Rp1.000.000,00. Dengan demikian pendapatan perkapita adalah pendapatan rata-rata penduduk suatu negara selama satu periode tertentu. Pendapatan perkapita dapat juga diartikan sebagai nilai atau jumlah suatu barang dan jasa rata-rata yang tersedia bagi setiap penduduk suatu negara selama satu periode tertentu. Secara matematis, besarnya pendapatan perkapita dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut.

$$\text{Pendapatan perkapita (PDB)} = \frac{\text{Pendapatan Nasional Bruto (PNB)}}{\text{Jumlah penduduk}}$$

atau

$$\text{Pendapatan perkapita (PDB)} = \frac{\text{Pendapatan Domestik Bruto (PDB)}}{\text{Jumlah penduduk}}$$

Adapun Bank Dunia mengelompokkan negara-negara di dunia berdasarkan pendapatan perkapitanya menjadi lima kelompok.

- a. Kelompok negara berpendapatan rendah (*low income economies*), yaitu negara-negara yang memiliki PNB perkapita lebih kecil dari US \$ 520
- b. Kelompok negara berpendapatan menengah bawah (*low middle income economies*), yaitu negara yang memiliki PNB perkapita sekitar US \$ 1740.
- c. Kelompok negara berpendapatan menengah (*middle income economies*), yaitu negara yang memiliki PNB berkcapita sekitar US \$ 2990.
- d. Kelompok negara berpendapatan menengah atas (*upper-middle income economies*), yaitu negara yang mempunyai PNB perkapita sekitar US \$ 4870.
- e. Kelompok negara berpendapatan tinggi (*high income economies*), yaitu negara yang memiliki PNB perkapita sekitar US \$ 25.480.

3. Pendekatan Pendapatan

Menurut pendekatan pendapatan, pendapatan nasional adalah seluruh pendapatan yang diterima oleh pemilik faktor produksi yang disumbangkan kepada Rumah Tangga Produsen selama satu tahun. Pendapatan nasional berdasarkan pendekatan atau metode pendapatan merupakan hasil penjumlahan dari sewa, upah, bunga modal dan laba yang diterima masyarakat pemilik faktor produksi selama satu tahun. Untuk lebih jelasnya, perhatikan tabel berikut.

Tabel 2.2 Faktor Produksi dan Penerimaannya

No.	Pemilik Faktor Produksi	Penerimaan	Lambang
1.	Alam	Sewa (<i>rent</i>)	r
2.	Tenaga Kerja	Upah/Gaji (<i>wage</i>)	w
3.	Modal	Bunga (<i>interest</i>)	i
4.	Skill	Laba (<i>profit</i>)	p

Hasil perhitungan pendapatan nasional dengan menggunakan pendekatan atau metode pendapatan ini dinamakan pendapatan nasional (PN) atau National Income (NI). Dengan demikian bila rumus dari pendapatan nasional adalah seperti berikut.

$$PN / Y = r + w + i + p$$

2.3 Faktor-faktor Yang Memengaruhi Tabungan, Konsumsi, dan Investasi

Untuk melaksanakan kebijakan ekonomi melalui upaya meningkatkan pendapatan nasional suatu negara, perlu diketahui terlebih dahulu faktor-faktor yang memengaruhi masing-masing komponen pendapatan nasional. Berikut akan dibahas aliran penggunaan pendapatan oleh rumah tangga-rumah tangga suatu negara dalam perekonomian tertutup sederhana. Perekonomian suatu negara dikatakan tertutup bila tidak mengenal hubungan dengan luar negeri sehingga tidak terdapat transaksi ekspor impor. Sedangkan perekonomian suatu negara dikatakan sederhana bila tidak mengenal transaksi ekonomi yang dilakukan pemerintah. Dalam perekonomian tertutup sederhana, pendapatan nasional yang diterima oleh rumah tangga digunakan untuk membeli barang dan jasa, yang disebut dengan pengeluaran konsumsi (C); dan menabung, yang disebut dengan saving (S). Secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut.

$$Y = C + S$$

Keterangan:

Y = pendapatan nasional

C = konsumsi

S = tabungan

Dari rumus tersebut diketahui bahwa pendapatan hanya digunakan untuk belanja atau ditabung. Bagian pendapatan yang tidak dibelanjakan akan digunakan untuk menabung. Jumlah pendapatan yang digunakan untuk konsumsi, antara lain, tergantung pada hal berikut.

- a. Besarnya pendapatan rumah tangga setelah dikurangi pajak penghasilan dan potongan-potongan.
- b. Komposisi rumah tangga (jumlah dan umur anggota rumah tangga).
- c. Tuntutan lingkungan.

Selain itu dari jumlah pendapatan yang akan ditabung tergantung pada hal berikut.

- a. Jumlah pendapatan yang diterima dan besarnya bagian yang akan dikeluarkan untuk konsumsi.
- b. Jumlah pendapatan yang ingin disimpan untuk tujuan berjaga-jaga dan menghadapi keadaan mendadak di waktu yang akan datang.
- c. Tingkat bunga. Bila tingkat bunga bank naik, orang cenderung mengurangi bagian pendapatan untuk tujuan konsumsi dan meningkatkan tabungan atau investasi.

Dalam jangka panjang, tabungan akan digunakan untuk pengeluaran investasi, tentunya setelah dikurangi dengan pengeluaran-pengeluaran mendadak. Oleh karena itu didapatkan rumus-rumus sebagai berikut:

$$Y = C + S \quad \text{dan} \quad Y = C + I$$

$$\text{Sehingga } I = S$$

Adapun faktor yang memengaruhi besarnya investasi antara lain sebagai berikut.

- a. Tingkat bunga (tingkat bunga merupakan harga modal). Tingkat bunga yang tinggi menyebabkan perusahaan kurang berminat melakukan investasi, demikian pula sebaliknya.

- b. Kekuatan permintaan konsumen akan barang dan jasa. Permintaan konsumen yang kuat menyebabkan meningkatnya laba dan mendorong perusahaan untuk melakukan lebih banyak investasi pabrik dan mesin untuk memenuhi permintaan konsumen.

2.4 Inflasi

Kenaikan harga barang dapat bersifat sementara atau berlangsung terus-menerus. Ketika kenaikan tersebut berlangsung dalam waktu yang lama dan terjadi hampir pada seluruh barang dan jasa maka gejala ini disebut inflasi. Jadi, kenaikan harga pada satu atau dua jenis barang tidak dapat dikategorikan sebagai inflasi. Dengan demikian, inflasi (inflation) adalah kenaikan harga barang-barang yang bersifat umum dan terus-menerus. Lawan dari inflasi adalah deflasi (deflation), yaitu kondisi di mana tingkat harga mengalami penurunan terus-menerus. Dari penjelasan tersebut, ada tiga komponen yang menjadi indikasi kenaikan harga hingga dikategorikan sebagai inflasi, yaitu adanya kenaikan harga, kenaikan harga tersebut bersifat umum dan berlangsung terus-menerus.

a. Kenaikan Harga

Harga suatu komoditas dikatakan naik jika harga menjadi lebih tinggi daripada periode sebelumnya. Misalnya, harga 1 buku tulis yang berisi 100 lembar sebesar Rp7.500,00. Beberapa hari kemudian naik menjadi Rp8.000,00. Hal ini berarti telah terjadi kenaikan harga buku tulis. Perbandingan tingkat harga dapat dilakukan pada periode yang lebih panjang yaitu seminggu, sebulan, triwulan, dan setahun.

b. Bersifat umum

Kenaikan harga suatu komoditas belum dapat dikatakan terjadi inflasi bila kenaikan tersebut tidak menyebabkan harga-harga komoditas lainnya secara umum naik. Misalnya kenaikan harga 1 buku tulis yang berisi 100 lembar terjadi pada saat tahun ajaran baru sehingga permintaan terhadap buku tulis meningkat namun bila kenaikan harga buku tulis tersebut tidak menimbulkan kenaikan-kenaikan harga komoditas lain maka tidak terjadi inflasi.

c. Berlangsungnya Terus Menerus

Kenaikan harga-harga yang bersifat umum, bila terjadinya hanya sesaat, belum dikategorikan terjadi inflasi sehingga perhitungan inflasi dilakukan dalam rentang waktu minimal bulanan. Jika pemerintah melaporkan bahwa inflasi tahun ini sebesar 8% per tahun, berarti akumulasi inflasi adalah 8% per tahun. Inflasi triwulan rata-rata 2% ($8\% : 4$) dan inflasi bulanan rata-rata 0,66% ($8\% : 12$)

Jenis-jenis inflasi dapat dibedakan menjadi:

1. Berdasarkan Tingginya Inflasi

Berdasarkan tingginya inflasi per tahun, inflasi digolongkan menjadi inflasi ringan (di bawah 10% per tahun), sedang (10% hingga 25%), berat (25% hingga 100%), dan hiperinflasi (lebih dari 100%).

2. Berdasarkan Sumber Penyebab

Berdasarkan sumber penyebabnya, inflasi digolongkan menjadi inflasi tekanan permintaan (demand full inflation) dan inflasi dorongan biaya (cost push inflation). Inflasi tekanan permintaan terjadi karena meningkatnya permintaan atau pembelian masyarakat terhadap barang dan jasa. Sedangkan inflasi dorongan biaya bersumber dari kenaikan biaya produksi, misalnya kenaikan harga bahan baku, energi, atau upah pekerja. Inflasi juga dapat terjadi karena kedua sebab tersebut (inflasi campuran).

3. Berdasarkan Asalnya

Berdasarkan asalnya, inflasi digolongkan menjadi inflasi dari dalam negeri (domestic inflation) dan inflasi dari luar negeri (imported inflation).

Gejala-gejala inflasi dapat dijelaskan dengan teori-teori inflasi.

1. Teori Kuantitas

Teori kuantitas tergolong teori inflasi yang paling awal. Meskipun demikian, masih dapat digunakan untuk menjelaskan proses inflasi pada zaman modern saat ini. Teori ini dipelopori oleh Irving Fisher. Teori ini menekankan bahwa inflasi dipengaruhi oleh penambahan jumlah uang beredar dan anggapan masyarakat terhadap kenaikan harga-harga (faktor psikologis). Menurut teori kuantitas, apabila penawaran uang bertambah maka tingkat harga umum juga akan naik. Hubungan langsung antara harga dan kuantitas uang seperti yang digambarkan oleh teori kuantitas uang sederhana dapat digunakan untuk menerangkan situasi inflasi.

2. Teori Keynes

Menurut Keynes, inflasi terjadi karena ada sebagian masyarakat yang ingin hidup di luar batas kemampuan ekonominya. Proses inflasi merupakan proses perebutan bagian rezeki di antara kelompok-kelompok sosial yang menginginkan bagian lebih besar dari yang dapat disediakan oleh masyarakat tersebut. Proses perebutan ini terlihat pada keadaan di mana permintaan masyarakat terhadap barang-barang selalu melebihi jumlah barang yang tersedia. Hal ini menimbulkan apa yang disebut celah inflasi atau inflationary gap.

Celah inflasi timbul karena golongan-golongan masyarakat berhasil mewujudkan keinginan mereka menjadi permintaan efektif (permintaan berdaya beli) terhadap barang-barang dan jasa. Golongan masyarakat tersebut adalah pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja. Pemerintah berusaha memperoleh pendapatan yang besar dengan cara mencetak uang baru. Pengusaha melakukan investasi dengan modal yang diperoleh dari kredit bank. Sedangkan pekerja berusaha memperoleh kenaikan upah/gaji agar dapat lebih banyak membeli barang dan jasa. Inflasi akan terus berlangsung selama jumlah permintaan efektif dari semua golongan masyarakat tersebut melebihi jumlah output yang dihasilkan.

3. Teori Strukturalis

Teori strukturalis disusun berdasarkan pada pengalaman di negara-negara Amerika Latin. Teori ini memberikan perhatian besar terhadap struktur perekonomian di negara berkembang. Inflasi di negara berkembang terutama disebabkan oleh faktor-faktor struktur ekonominya. Menurut teori ini, kondisi struktur ekonomi negara berkembang yang dapat menimbulkan inflasi adalah:

a. Ketidakelestarian Penerimaan Ekspor

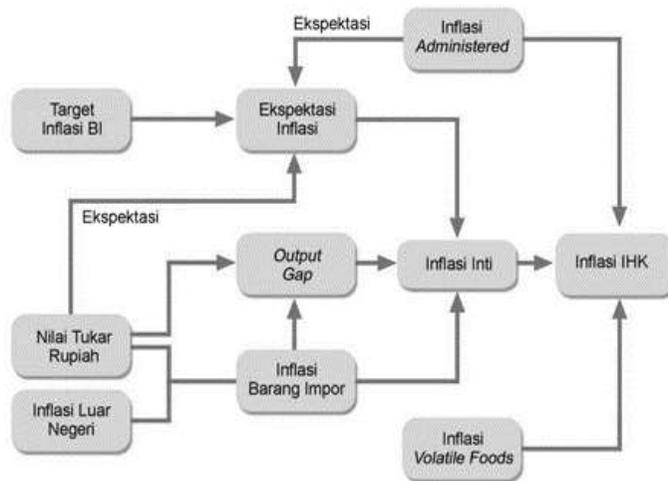
Nilai ekspor di negara berkembang tumbuh secara lamban dibandingkan pertumbuhan sektor-sektor lain. Adapun penyebabnya adalah harga produk-produk pertanian yang tidak stabil atau rendah dan produksi barang-barang ekspor tidak mampu mengikuti perubahan harga.

b. Ketidakelestarian Penawaran atau Produksi Makanan di Dalam Negeri

Produksi bahan makanan dalam negeri tidak tumbuh secepat pertumbuhan penduduk dan pendapatan per kapita. Hal ini menyebabkan harga bahan makanan di dalam negeri cenderung naik sehingga melebihi kenaikan harga barang-barang lain. Dampak yang ditimbulkan adalah munculnya tuntutan karyawan untuk mendapat kenaikan upah atau gaji. Naiknya upah karyawan menyebabkan kenaikan ongkos produksi. Hal ini berarti akan menaikkan harga barang-barang. Kenaikan harga barang-barang tersebut mengakibatkan munculnya kenaikan upah lagi. Kenaikan upah kemudian diikuti oleh kenaikan harga barang-barang, begitu seterusnya.

Inflasi muncul karena adanya tekanan dari sisi penawaran (*cost push inflation*), dari sisi permintaan (*demand pull inflation*), dan dari ekspektasi inflasi. *Cost push inflation* dapat disebabkan oleh depresiasi nilai tukar, dampak inflasi luar negeri terutama negara-negara mitra dagang, peningkatan harga-harga komoditi yang diatur pemerintah (*administered price*), dan terjadi kekurangan penurunan akibat bencana alam dan terganggunya distribusi. Faktor penyebab terjadi *demand pull inflation* adalah

tingginya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaan (output gap). Dalam konteks makroekonomi, kondisi ini digambarkan oleh output riil yang melebihi output potensialnya atau permintaan total (aggregate demand) lebih besar dari pada kapasitas perekonomian. Faktor ekspektasi inflasi dipengaruhi oleh perilaku masyarakat dan pelaku ekonomi apakah lebih cenderung bersifat adaptif. Hal ini tercermin dari pembentukan harga di tingkat produsen dan pedagang terutama pada saat menjelang hari-hari besar keagamaan dan penentuan upah minimum regional (UMR).



Gambar 2.1 Kelompok Inflasi yang Teridentifikasi

Dari Gambar 2.1, kita dapat mengelompokkan inflasi di Indonesia menjadi dua macam, yaitu:

1. Inflasi Inti yaitu inflasi yang dipengaruhi oleh faktor fundamental, yaitu:
 - a. Interaksi permintaan-penawaran.
 - b. Lingkungan eksternal: nilai tukar, harga komoditas internasional, inflasi mitra dagang.
 - c. Ekspektasi inflasi dari pedagang dan konsumen.
2. Inflasi Non-Inti yaitu inflasi yang dipengaruhi oleh selain faktor fundamental. Dalam hal ini terdiri atas:
 - a. Inflasi Volatile Foods
Inflasi yang dipengaruhi shocks dalam kelompok bahan makanan seperti panen, gangguan alam, gangguan penyakit.
 - b. Inflasi Administered Prices
Inflasi yang dipengaruhi shocks berupa kebijakan harga pemerintah, seperti harga BBM, tarif listrik, tarif angkutan, dan lain-lain.

Inflasi mempunyai dampak terhadap individu maupun bagi kegiatan perekonomian secara luas. Dampak yang ditimbulkan dapat bersifat negatif ataupun positif, tergantung pada tingkat keparahannya. Laju inflasi yang terlalu tinggi akan mengganggu pertumbuhan ekonomi dan menyengsarakan masyarakat yang berpenghasilan tetap dan rendah. Berikut ini adalah dampak yang ditimbulkan oleh inflasi.

a. Dampak Positif

Pengaruh positif inflasi terjadi apabila tingkat inflasi masih berada pada persentase tingkat bunga kredit yang berlaku. Misalnya, pada saat itu tingkat bunga kredit adalah 15% per tahun dan tingkat inflasi 5%. Bagi negara maju, inflasi seperti ini akan mendorong kegiatan ekonomi dan pembangunan. Hal ini terjadi, karena para pengusaha di negara maju memanfaatkan kenaikan harga untuk berinvestasi, memproduksi, serta menjual barang dan jasa.

b. Dampak Negatif

Inflasi yang terlalu tinggi membawa dampak yang tidak sedikit terhadap perekonomian, terutama tingkat kemakmuran masyarakat. Dampak inflasi tersebut, antara lain:

a) Dampak Inflasi terhadap Pemerataan Pendapatan

Inflasi akan merugikan orang yang berpendapatan tetap, seperti pensiunan dan pegawai negeri. Kerugian lain akibat inflasi juga akan dialami oleh mereka yang menyimpan kekayaan dalam bentuk uang kas (uang tunai) atau mereka yang menyimpan uang kas di rumah (hoarding). Adapun pihak-pihak yang mendapat keuntungan dengan adanya inflasi adalah orang yang persentase kenaikan pendapatannya melebihi persentase kenaikan inflasi, mereka yang memiliki kekayaan dalam bentuk barang atau emas, dan buruh yang tergabung dalam serikat pekerja yang kuat sehingga mereka dapat menuntut kenaikan upah melebihi kenaikan laju inflasi. Inflasi memberi dampak yang berbeda. Ada masyarakat yang diuntungkan dan ada pula yang dirugikan maka dengan adanya inflasi, kesenjangan pendapatan masyarakat akan semakin terlihat. Kekuatan ekonomi pihak-pihak tersebut diuji dengan kondisi inflasi yang memengaruhi kegiatan ekonomi mereka.

b) Dampak Inflasi terhadap Output (Hasil Produksi)

Dampak inflasi terhadap hasil produksi akan terjadi dua kemungkinan, yaitu dapat meningkatnya hasil produksi. Dalam keadaan inflasi, biasanya kenaikan harga barang mendahului upah/gaji sehingga keuntungan yang diperoleh para pengusaha akan meningkat.

- c) Mendorong Penanaman Modal Spekulatif
Inflasi menyebabkan para pemilik modal cenderung melakukan kegiatan spekulatif. Hal ini dilakukan dengan membeli rumah, tanah, dan emas yang nilainya relatif stabil. Cara ini dirasa oleh mereka lebih menguntungkan.
- d) Menyebabkan Tingkat Bunga Meningkatkan dan Akan Mengurangi Investasi
Untuk menghindari kemerosotan nilai uang dari modal yang mereka pinjamkan, lembaga keuangan akan menaikkan suku bunga pinjaman. Apabila tingkat inflasi tinggi, suku bunga juga tinggi. Tingginya suku bunga pinjaman akan mengurangi penanaman modal untuk membuka usaha-usaha produktif.
- e) Menimbulkan Ketidakpastian Keadaan Ekonomi di Masa Depan
Tingkat inflasi yang cukup parah dan gagal dikendalikan oleh pemerintah akan berdampak pada ketidakpastian ekonomi. Selanjutnya, arah perkembangan ekonomi sulit diramalkan. Keadaan ini akan mempersulit masyarakat (konsumen) maupun pengusaha. Konsumen cenderung melakukan penimbunan barang karena takut barang tidak tersedia. Produsen akan sulit memperhitungkan biaya produksi karena harga bahan baku terus berubah.
- f) Menimbulkan Masalah Neraca Pembayaran
Inflasi di dalam negeri menyebabkan harga barang-barang impor menjadi lebih murah sehingga masyarakat lebih menyukai barang impor. Hal ini berpengaruh pada terjadinya defisit neraca pembayaran dan kemerosotan nilai mata uang dalam negeri.

Inflasi ternyata memiliki dampak yang merugikan masyarakat, terutama masyarakat miskin dan golongan berpenghasilan tetap. Dalam tingkat yang tinggi, inflasi dapat mengganggu jalannya perekonomian suatu negara. Oleh karena itu, pemerintah melalui Bank Indonesia memiliki kebijakan untuk mengendalikan inflasi. Upaya mengendalikan inflasi bukan berarti menghilangkan inflasi sama sekali, tetapi berusaha mencapai tingkat inflasi yang ideal (diharapkan). Berikut ini, beberapa kebijakan pemerintah untuk mengendalikan inflasi.

1. Kebijakan Moneter

Menurut teori moneter klasik, inflasi terjadi karena penambahan jumlah uang beredar. Dengan demikian, secara teoretis relatif mudah untuk mengatasi inflasi, yaitu dengan mengendalikan jumlah uang beredar itu sendiri. Kebijakan moneter adalah tindakan yang dilakukan oleh Bank Indonesia untuk

mengurangi atau menambah jumlah uang beredar. Ketika jumlah uang beredar terlalu berlebihan sehingga inflasi meningkat tajam, Bank Indonesia akan segera menerapkan berbagai kebijakan moneter untuk mengurangi peredaran uang. Jenis-jenis kebijakan moneter tersebut antara lain penetapan persediaan kas, politik diskonto, dan operasi pasar terbuka. Pada dasarnya, kebijakan-kebijakan tersebut bertujuan mengurangi jumlah uang beredar.

a. Politik Diskonto

Politik diskonto (discount policy) adalah politik Bank Sentral untuk memengaruhi peredaran uang dengan jalan menaikkan dan menurunkan tingkat bunga. Dengan menaikkan tingkat bunga diharapkan jumlah uang yang beredar di masyarakat akan berkurang karena orang akan lebih banyak menyimpan uangnya di bank. Sebaliknya, Bank Sentral akan menurunkan suku bunga jika timbul deflasi. Dengan diturunkannya suku bunga diharapkan masyarakat akan menarik uangnya dari bank karena bunga tidak memadai.

b. Politik Pasar Terbuka

Untuk memperkuat politik diskonto, Bank Sentral juga menjalankan politik terbuka (open market policy), yaitu dengan jalan membeli dan menjual surat-surat berharga. Dengan membeli surat berharga diharapkan uang yang beredar di masyarakat akan bertambah. Sebaliknya dengan menjual surat berharga diharapkan uang yang beredar di masyarakat akan tersedot.

c. Politik Persediaan Kas (Cash Ratio Policy)

Adalah politik Bank Sentral untuk memengaruhi peredaran uang dengan jalan menaikkan dan menurunkan perbandingan minimum antara uang tunai yang dimiliki oleh bank umum dengan uang giral (cek, giro dan sebagainya) yang boleh dikeluarkan oleh bank yang bersangkutan. Angka perbandingan itu disebut cash ratio.

Misalnya, besar cash ratio adalah 20% berarti untuk setiap Rp1.000,00 uang tunai yang dimiliki bank umum, bank tersebut dapat dan boleh menciptakan uang giral sebanyak maksimum Rp200,00. Jika pemerintah menghendaki jumlah uang yang beredar di masyarakat berkurang, bank sentral dapat menaikkan besarnya cash ratio, dan begitu pun sebaliknya.

2. Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan fiskal dilakukan pemerintah untuk

mengurangi inflasi adalah mengurangi pengeluaran pemerintah, menaikkan tarif pajak dan mengadakan pinjaman pemerintah.

a. Pengaturan Pengeluaran Pemerintah

Pemerintah harus menjaga penggunaan anggaran negara agar sesuai dengan perencanaan. Pembelanjaan negara yang melampaui batas yang ditentukan atau direncanakan akan mendorong pertambahan uang beredar dan sebaliknya.

b. Peningkatan Tarif Pajak

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang utama. Dengan kenaikan tarif pajak maka penghasilan rumah tangga akan berkurang sehingga daya beli masyarakat atas barang dan jasa juga berkurang.

c. Peningkatan Pinjaman Pemerintah

Langkah berikutnya dalam kebijakan fiskal adalah meningkatkan pinjaman pemerintah, dengan jalan tanpa paksaan atau dengan pinjaman paksa. Cara yang paling efektif bagi pelaksanaan pinjaman pemerintah adalah membekukan sebagian simpanan masyarakat di bank. Dapat juga ditempuh cara menggunting uang, tetapi hal ini sangat berbahaya bagi negara berkembang karena inflasi di negara berkembang bukan disebabkan kelebihan uang beredar, tetapi oleh hambatan perekonomian, seperti produksi bergerak jauh di bawah kapasitas sehingga barang-barang yang dibutuhkan masyarakat tidak cukup tersedia.

3. Kebijakan Non-Moneter dan Non-Fiskal

Selain kebijakan moneter dan kebijakan fiskal, pemerintah melakukan kebijakan nonmoneter/nonfiskal dengan tiga cara, yaitu menaikkan hasil produksi, menstabilkan upah (gaji), dan pengamanan harga, serta distribusi barang.

2.5 Indeks Harga dan Peranannya dalam Ekonomi

Angka indeks adalah suatu ukuran statistik untuk menyatakan perubahan-perubahan relatif yang terjadi dari waktu ke waktu terhadap nilai suatu variabel atau sekelompok variabel, yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Angka indeks merupakan suatu angka yang dapat digunakan untuk melakukan perbandingan antara kegiatan yang sama dalam waktu yang berbeda. Contohnya, kegiatan produksi, ekspor, hasil penjualan, dan jumlah uang yang beredar.

Dengan angka indeks, dapat diketahui maju mundurnya suatu usaha atau kegiatan. Oleh karena itu, banyak pihak yang membutuhkan angka indeks untuk mengetahui perubahan-perubahan yang terjadi pada dua waktu yang berlainan.

Pihak-pihak yang berkepentingan atas angka indeks, antara lain, pemilik perusahaan, pejabat pemerintah, ahli ekonomi, dan penegak hukum. Dalam bidang ekonomi, dikenal tiga macam angka indeks yang utama yaitu sebagai berikut.

1. Angka Indeks Harga (Price Relative)

Angka indeks harga adalah suatu ukuran yang menunjukkan tentang perubahan-perubahan yang terjadi pada harga dari waktu ke waktu. Indeks harga yang disusun dari periode ke periode dapat digunakan untuk mengetahui pola perubahan dari tahun ke tahun, yang meliputi:

- a. perubahan biaya hidup,
- b. nilai ekspor dan impor,
- c. siklus perdagangan,
- d. harga emas murni, dan
- e. nilai tukar rupiah terhadap valuta asing.

2. Angka Indeks Kuantita (Quantity Relative)

Angka indeks kuantita yaitu angka indeks yang menunjukkan perubahan-perubahan yang terjadi pada jumlah komoditas yang dihasilkan atau jumlah komoditas yang dikonsumsi dari waktu ke waktu.

3. Angka Indeks Nilai (Value Relative)

Angka indeks nilai yaitu angka indeks yang menunjukkan perubahan nilai uang dari suatu periode ke periode lain, yang diperoleh dengan cara melakukan perkalian antara harga dan kuantitas.

Pemenuhan kebutuhan manusia berupa barang dan jasa tidak terlepas dari faktor harga. Ketegangan-ketegangan produsen sebagai penghasil barang dan konsumen sebagai pembeli dan pemakai barang akan muncul sebagai akibat dari ketidakseimbangan fluktuasi harga barang. Ketidakseimbangan ini antara lain berkenaan dengan harga barang produsen yang harus dibeli konsumen tidak seimbang dengan pendapatan konsumen. Hal-hal inilah yang mendorong para ahli statistik dan ekonomi untuk melakukan penemuan-penemuan baru dalam pengembangan teknik pengukuran perubahan harga dan alat perbandingan tingkat harga dari satu periode ke periode lain. Harga merupakan jumlah unit moneter yang dibutuhkan untuk memperoleh jumlah barang tertentu. Karakteristik dari harga adalah sebagai berikut.

- a. Kenaikan dan penurunan harga tergantung pada jumlah permintaan dan penawaran barang di masyarakat;
- b. Harga dijadikan sebagai alat penentuan nilai suatu barang dibandingkan barang lain; dan
- c. Harga dapat dipengaruhi jumlah barang yang tersedia di masyarakat.

Adapun ciri-ciri indeks harga adalah sebagai berikut.

- a. Indeks harga digunakan sebagai alat pengukur perubahan harga;
- b. Indeks harga merupakan ukuran perbandingan dari suatu harga;
- c. Indeks harga merupakan alat untuk memperlihatkan perubahan-perubahan harga pada satu atau berbagai jenis barang.

Indeks harga merupakan barometer kondisi ekonomi secara umum. Para pemimpin atau manajer selalu dihadapkan pada data yang harus diolah sehingga dapat digunakan sebagai input untuk pengambilan keputusan. Dengan indeks harga, para pemimpin atau manajer dapat mengelola data yang ada sehingga dapat mengetahui perkembangan usaha atau kegiatan yang dilakukan. Saat ini kebutuhan para pemimpin atau manajer akan indeks harga berbagai barang sangat besar sekali yang disebabkan oleh persaingan-persaingan yang sangat ketat pada zaman globalisasi ekonomi. Dilihat dari fungsinya, peranan indeks harga dalam kegiatan ekonomi adalah:

- a. Alat bagi pemerintah untuk menetapkan kebijaksanaan-kebijaksanaan harga di masa yang akan datang, agar tidak terjadi adanya penetapan harga secara sewenang-wenang oleh produsen yang dapat menyebabkan terjadinya kondisi yang tidak seimbang antara harga barang dan jasa yang harus dibayar konsumen dengan kemampuan membeli konsumen;
- b. Indeks harga dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan kemajuan ekonomi dan faktor-faktor yang menghambat kemajuan ekonomi; dan
- c. Indeks harga dapat dijadikan sebagai dasar perbandingan untuk mengukur tingkat kemajuan ekonomi masa sekarang dengan masa-masa sebelumnya;
- d. Indeks harga dapat dijadikan sebagai dasar untuk menetapkan pola-pola kebijaksanaan ekonomi secara keseluruhan, dan kebijaksanaan moneter.

Secara konseptual indeks berarti urutan data atau angka-angka. Indeks harga dapat diartikan sebagai kumpulan data berupa harga-harga secara berurutan, yang berfungsi untuk menentukan perubahan harga rata-rata yang berlaku pada suatu periode tertentu. Saat ini terdapat tiga indeks harga, yaitu indeks harga konsumen (Customer Price Index = CPI), indeks harga produsen (Producer Price Index = PPI) dan Pedeflasi PDB (GDP Deflator). Ketiga indeks ini dapat digunakan untuk menunjukkan tingkat inflasi pada satu periode tertentu. Dalam ilmu ekonomi, pedeflasi PDB, atau GDP Deflator dalam bahasa Inggris, adalah rasio antara PDB riil dengan PDB nominal, dikalikan 100. Deflator PDB menunjukkan

besarnya perubahan harga dari semua barang baru, barang produksi lokal, barang jadi, dan jasa. PDB merupakan singkatan dari produk domestik bruto (PDB)—jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara (domestik) selama satu tahun.

Indeks Harga Produsen mengukur arah gerakan harga pada pasar primer, baik mengenai barang-barang maupun golongan barang-barang tertentu. Harga yang digunakan untuk menyusun indeks ini adalah harga produsen dan bukan harga perdagangan besar. Indeks ini digunakan untuk mengukur perubahan harga selama dua periode dan bukan perubahan oleh kualitas, kuantitas, atau penjualan. Barang-barang yang diukur meliputi barang-barang dari jenis bahan mentah dan barang jadi yang diperjualbelikan di pasar primer.

Jenis barang-barang yang digunakan bagi penyusunan indeks ini diklasifikasikan dalam sektor-sektor tertentu dan pada tiap sektor dapat dibagi dalam subsektor. Contohnya adalah sebagai berikut. Sektor pertanian dengan subsektor bahan makanan, tanaman perdagangan, peternakan, kehutanan, perikanan, dan perikanan. Sektor pertambangan dan penggalian dengan subsektor batubara, aspal, batu kali, pasir, kerikil, dan garam. Sektor industri dengan subsektor tekstil, pakaian jadi, barang-barang kulit, makanan, minuman, kertas, barang-barang logam dasar, barang cetakan, karet, plastik, mesin-mesin, semen, kapur, barang-barang dari tanah liat, barang-barang kimia, hasil pengilangan minyak, hasil industri logam dan tembakau. Biro Pusat Statistik (BPS) secara periodik menerbitkan laporan indeks harga produsen di sektor bahan ekspor, barang impor, dan bahan bangunan.

Indeks harga konsumen menggambarkan perubahan-perubahan harga barang dan jasa yang dibeli konsumen. Pada umumnya indeks harga konsumen merupakan ukuran statistik perubahan harga eceran barang-barang dan jasa-jasa konsumtif. Indeks ini bukan merupakan indeks biaya hidup dalam arti yang sebenarnya karena tidak mengukur perubahan dalam jumlah dan jenis barang dan jasa yang dibeli oleh konsumen atau jumlah pengeluaran total guna biaya hidup konsumen. Dalam indeks harga konsumen, data tentang harga barang dan jasa harus dikumpulkan dari berbagai kota yang benar-benar menggambarkan keluarga konsumen yang membelanjakan pendapatannya. Indeks Harga Konsumen (IHK) mengubah harga berbagai barang dan jasa menjadi sebuah indeks tunggal yang mengukur seluruh tingkat pembelian. Berikut ini ciri-ciri IHK.

- a. Hanya mengukur harga barang dan jasa yang dibeli konsumen.
- b. IHK mencakup barang dan jasa yang domestik dan barang-barang impor.
- c. Dalam IHK, komponen biaya-biaya bunga mewakili biaya perumahan.

IHK dihitung dengan menggunakan data harga konsumen. Harga konsumen adalah harga barang-barang yang diperdagangkan dalam eceran untuk dikonsumsi sendiri, bukan untuk dijual. Harga konsumen diambil dari data empat kelompok, yaitu kelompok makanan, sandang, perumahan, dan aneka barang dan jasa. Untuk dapat menghitung IHK diperlukan data dan informasi yang luas, yang diperoleh dari survei biaya hidup berdasarkan harga pasar untuk berbagai macam barang dan jasa yang mencerminkan pola konsumsi masyarakat. Barang dan jasa tersebut dikelompokkan menjadi tujuh kelompok, yaitu: bahan makanan; makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau; perumahan; sandang; kesehatan; pendidikan; transportasi dan komunikasi.

IKHTISAR

1. Pendapatan nasional adalah jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam periode tertentu yang dihitung berdasarkan nilai pasar. Setiap negara memiliki suatu sistem perhitungan pendapatan nasional.
2. Manfaat perhitungan pendapatan nasional adalah mengetahui struktur ekonomi suatu negara dan membandingkan perekonomian antardaerah hingga unit terkecil yaitu keluarga dari suatu waktu ke waktu lainnya;
3. Konsumsi, tabungan dan investasi merupakan faktor-faktor yang memengaruhi pendapatan nasional. Pendapatan yang diterima oleh rumah tangga digunakan untuk kegiatan konsumsi, menabung maupun berinvestasi;
4. Inflasi mengandung tiga unsur keadaan yaitu adanya kenaikan harga, kenaikan harga tersebut bersifat umum dan berlangsung terus-menerus. Inflasi mempunyai dampak terhadap individu maupun bagi kegiatan perekonomian secara luas. Hal tersebut tergantung pada tingkat keparahannya;
5. Angka indeks adalah suatu ukuran statistik untuk menyatakan perubahan-perubahan relatif yang terjadi dari waktu ke waktu terhadap nilai suatu variabel atau sekelompok variabel, yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Angka indeks merupakan suatu angka yang dapat digunakan untuk melakukan perbandingan antara kegiatan yang sama dalam waktu yang berbeda.

BAB 3

UANG, PERBANKAN DAN KEBIJAKAN MONETER

KOMPETENSI DASAR

Menjelaskan jenis dan peredaran uang serta faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran uang, bentuk lembaga keuangan perbankan, lembaga keuangan bukan bank, dan ruang lingkup kebijakan moneter.

INDIKATOR

1. Mahasiswa menjelaskan definisi uang dan jenis – jenis uang
2. Mahasiswa menjelaskan penawaran dan permintaan uang yang terjadi sehubungan dengan peredaran uang dalam kegiatan ekonomi serta pelaku yang berperan untuk memengaruhi peredaran uang di masyarakat.
3. Mahasiswa menjelaskan bentuk – bentuk lembaga keuangan perbankan
4. Mahasiswa menjelaskan bentuk – bentuk lembaga keuangan bukan bank
5. Mahasiswa menjelaskan pengertian dan tujuan dari kebijakan moneter yang dilakukan oleh Bank Indonesia.

Kegiatan konsumsi, tabungan dan investasi adalah kegiatan ekonomi yang melibatkan uang sehingga hal tersebut memunculkan kegiatan peredaran uang dan kegiatan perbankan untuk mengaturnya yang biasa disebut dengan kebijakan moneter. Menurut konsep pasar, keberadaan penjual dan pembeli yang melakukan transaksi menunjukkan adanya penawaran dan permintaan. Penjual merupakan pihak yang melakukan penawaran barang, sedangkan pembeli merupakan pihak yang melakukan permintaan barang. Bila di pasar barang yang dijadikan sebagai objek transaksi adalah barang, sedangkan di pasar uang yang dijadikan sebagai objek transaksi adalah uang sehingga memunculkan konsep permintaan dan penawaran uang.

3.1 Uang

Sebelum ada uang, pertukaran dilakukan dengan cara barter yaitu pertukaran antara barang satu dengan barang yang lain. Pertukaran secara barter dapat dilakukan jika ada kebutuhan yang timbul secara bersama-sama. Hal ini akan sulit dilakukan, karena harus menemukan orang yang membutuhkan barang miliknya dan orang tersebut memiliki barang yang dibutuhkan oleh orang yang pertama. Dengan demikian, pertukaran dengan cara barter mempunyai banyak kesulitan.

Untuk mengatasi kesulitan tersebut, orang mulai mengalihkan barter dengan menggunakan alat yang lebih praktis yaitu uang. Uang adalah benda yang disepakati oleh masyarakat luas sebagai alat perantara untuk mengadakan pertukaran atau perdagangan. Jadi dapat kita katakan bahwa uang merupakan hasil yang timbul sendiri dari perkembangan tukar-menukar, dan bukan merupakan sesuatu yang ditemukan atau sesuatu yang diputuskan oleh seseorang. Sejarah mencatat pertama-tama yang memakai uang sebagai alat pembayaran adalah orang Assyria, Phunisia, dan Mesir.

Uang yang pertama kali tidaklah seperti uang yang kita kenal sekarang, pada waktu itu uang berupa benda-benda yang istimewa. Artinya, benda yang digemari dan diinginkan oleh semua oranglah yang dijadikan sebagai alat penukaran dan alat pengukur nilai. Benda itu yang disebut uang barang, seperti besi, batu, garam, kapas, dan kulit binatang. Demikian juga dengan asal nama uang. Adakalanya jenis benda yang dijadikan uang merupakan sumber inspirasi untuk asal nama uang, contoh gulden mata uang Belanda yang berarti emas. Money sebutan untuk uang, berasal dari Monate nama Gereja Manter di Perancis yang pernah dipakai sebagai tempat menyimpan dan membuat uang.

Uang benda yang disebut uang barang tidak dapat dipertahankan karena uang ini tidak mempunyai ukuran, berat, bentuk, dan identitas yang pasti. Orang akhirnya menggunakan logam terutama emas dan perak karena emas dan perak tidak mudah rusak, memiliki nilai yang tinggi, mudah dipindah, mudah dipecah tanpa menurunkan nilainya, dan tetap digemari orang. Uang yang terbuat dari emas dan perak disebut uang logam. Uang logam emas dan perak disebut juga full bodied money karena nilai uang ini dijamin penuh (100%) oleh body-nya. Artinya, nilai nominal yang tercantum pada mata uang itu sama dengan nilai intrinsiknya. Uang logam yang terbuat dari emas dan perak juga tidak bertahan, sebab pada umumnya di seluruh negara banyak taken money. Taken money adalah mata uang yang nilai nominalnya lebih tinggi dari nilai intrinsiknya (bahan) contoh taken money adalah rupiah (Rp) uang yang bahan dasarnya dari kertas dan dikenal dengan uang kertas.

Uang sebagai alat tukar-menukar yang sah harus memenuhi persyaratan/kriteria. Ada dua syarat, yaitu syarat psikologis dan syarat teknis. Syarat psikologis, bahwa uang harus dapat memuaskan keinginan orang yang memilikinya. Orang akan terlihat lebih tenang dan puas jika membawa uang daripada membawa barang. Syarat teknis, yaitu :

- a. Mudah dibawa
- b. Tahan lama, artinya tidak mudah rusak.
- c. Nilainya stabil, artinya nilai sekarang sama dengan nilai yang akan datang. Dengan demikian orang percaya bahwa penyimpanan uang tidak akan merugikan.
- d. Terdiri dari berbagai nilai nominal, artinya dapat dibagi-bagi sehingga dalam transaksi sekecil apapun tetap dapat dilakukan.
- e. Jumlahnya mencukupi dan tidak berlebihan.

Di Indonesia, uang kertas dan uang logam merupakan uang yang berlaku umum, yang pencetakan dan pengedarannya menjadi wewenang Bank Indonesia. Uang digunakan sebagai alat perantara di perdagangan. Dalam ilmu ekonomi fungsi uang dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu fungsi asli dan fungsi turunan. Fungsi asli disebut juga fungsi primer uang. Berdasarkan fungsi asli ini uang berperan sebagai alat tukar dan alat satuan hitung.

a. Alat Tukar (Medium of Exchange)

Uang dapat digunakan sebagai alat untuk mempermudah pertukaran. Agar uang dapat berfungsi dengan baik, diperlukan kepercayaan masyarakat yang bersedia untuk menerimanya. Sebagai alat tukar, uang memungkinkan seluruh transaksi dapat dilakukan dengan mudah.

b. Sebagai Alat Satuan Hitung (Unit of Count)

Satuan hitung diperlukan untuk menentukan harga suatu barang. Dengan demikian, orang dapat melihat besarnya uang yang harus dibayarkan guna memperoleh suatu barang atau jasa. Dengan adanya satuan hitung ini kita pun dapat melakukan perbandingan harga suatu barang terhadap barang yang lain. Selain fungsi asli, uang memiliki fungsi sebagai fungsi turunan yang dijelaskan seperti berikut.

a. Alat Pembayaran yang Sah

Kebutuhan manusia akan barang dan jasa yang semakin bertambah dan beragam tidak dapat dipenuhi melalui cara tukar menukar atau barter. Guna mempermudah untuk mendapatkan barang dan jasa yang diperlukan, manusia memerlukan alat pembayaran yang dapat diterima semua orang, yaitu uang.

b. Alat pendorong Kegiatan Ekonomi

Apabila nilai uang stabil orang lebih bergairah untuk melakukan investasi. Dengan adanya kegiatan investasi kegiatan ekonomi akan semakin meningkat.

c. Alat Penimbun Kekayaan

Sebagian orang biasanya tidak menghabiskan semua uang yang dimilikinya untuk keperluan konsumsi. Ada sebagian uang yang disisihkan dan ditabung untuk keperluan di masa datang.

d. Alat Pemindah Kekayaan

Seseorang yang hendak pindah dari suatu tempat ke tempat lain dapat memindahkan kekayaannya yang berupa tanah dan bangunan rumah ke dalam bentuk uang dengan cara menjualnya. Di tempat yang baru dia dapat membeli rumah yang baru dengan menggunakan uang hasil penjualan rumah yang lama.

e. Standar Pencicilan Utang

Uang dapat digunakan untuk mengukur pembayaran pada masa yang akan datang.

Pada dasarnya nilai uang dapat dilihat dari tiga sudut pandang, yaitu nilai uang dilihat dari bahan pembuatannya, dilihat dari penggunaannya dan dilihat dari lembaga yang menerbitkan. Nilai uang dilihat dari bahan pembuatannya terdiri dari nilai intrinsik dan nilai nominal

a. Nilai Intrinsik

Nilai intrinsik uang adalah nilai uang berdasarkan bahan-bahan pembuatan uang. Contohnya, untuk membuat uang logam Rp100,00 diperlukan logam perak seberat 1 gram. Dengan demikian, uang sebesar Rp100,00 sama dengan harga yang senilai dengan 1 gram perak. Inilah yang disebut nilai intrinsik uang.

b. Nilai Nominal

Pada uang Rp100.000,00 tertera angka seratus ribu rupiah maka nilai nominal uang tersebut adalah seratus ribu rupiah. Nilai nominal uang adalah nilai yang tertera pada setiap mata uang yang bersangkutan.

Dari dua nilai uang yang telah disebutkan sebelumnya telah menimbulkan dua istilah fiducier money dan full bodied money. Fiducier money, yaitu uang yang memiliki nilai nominal lebih besar daripada nilai intrinsiknya. Misalnya adalah semua uang kertas. Full bodied money, yaitu uang yang memiliki nilai nominal sama dengan nilai intrinsiknya. Misalnya adalah semua jenis mata uang logam sehingga uang logam disebut juga full bodied money. Nilai uang yang dilihat dari penggunaannya meliputi dua bentuk, yaitu nilai internal dan nilai eksternal.

- a. Nilai internal adalah kemampuan suatu mata uang apabila ditukarkan dengan barang. Dengan kata lain, nilai internal uang adalah daya beli uang terhadap barang dan jasa. Contoh uang sebesar Rp200.000,00 dapat ditukarkan dengan 1 gram emas. Ini berarti nilai internal uang Rp200.000,00 adalah sebesar 1 gram emas.
- b. Nilai eksternal adalah kemampuan uang dalam negeri apabila dibandingkan dengan mata uang asing (valuta asing). Dengan kata lain yang dimaksud nilai eksternal uang adalah daya beli uang dalam negeri terhadap mata uang asing atau lebih dikenal dengan istilah kurs. Contohnya, uang Rp100.000,00 mampu ditukarkan dengan 10 Dollar Amerika Serikat (US\$ 10 = Rp100.000,00). Ini berarti uang Rp100.000,00 mempunyai nilai eksternal sama dengan 10 Dollar Amerika Serikat.

Berdasarkan lembaga yang menerbitkan, uang dibedakan menjadi uang kartal dan uang giral.

- a. Uang Kartal

Uang kartal adalah uang yang beredar sehari-hari sebagai alat pembayaran yang sah dan wajib diterima oleh semua masyarakat. Uang kartal ini terdiri atas uang logam dan uang kertas. Uang kartal sering disebut uang primer. Dilihat dari bahan pembuatannya, uang kartal dibagi menjadi dua, yaitu:

- a) Uang Logam

Uang logam emas dan perak adalah salah satu jenis uang yang sudah sejak berabad-abad digunakan oleh masyarakat di berbagai negara di dunia. Kedua jenis uang logam tersebut digunakan sebagai uang karena disukai dan dinilai tinggi oleh masyarakat pada umumnya. Uang logam yang beredar di Indonesia adalah uang logam yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang bertindak sebagai bank sirkulasi, di antaranya uang logam yang beredar saat ini adalah uang yang nominalnya Rp25,00, Rp50,00, Rp100,00, Rp500,00 dan Rp1.000,00.

- b) Uang Kertas

Uang kertas adalah jenis uang yang terbuat dari kertas. Uang kertas ini berlaku dalam pertukaran di masyarakat karena dijamin oleh Undang-Undang bahwa uang kertas tersebut berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Untuk pembayaran dalam jumlah yang besar, penggunaan uang kertas lebih mudah dan disukai daripada uang logam. Uang kertas yang berlaku di Indonesia, seperti halnya logam juga dikeluarkan oleh bank sentral (Bank Indonesia) sebagai bank sirkulasi yang mempunyai hak

tunggal (hak aktroi) untuk mencetak dan mengedarkan uang kartal. Adapun uang kertas yang beredar di Indonesia saat ini adalah uang kertas yang bernominal uang pe-cahan Rp100,00; Rp500,00; Rp1.000,00; Rp5.000,00; Rp10.000,00; Rp20.000,00; Rp50.000,00; dan Rp100.000,00.

b. Uang Giral

Uang giral adalah saldo tagihan di bank. Uang giral bukan merupakan alat pembayaran yang sah dan orang boleh menolak pembayaran dengan uang giral. Dengan kesepakatan kedua belah pihak, yaitu pihak yang berhutang dan yang punya piutang, uang giral sewaktu-waktu dapat dijadikan alat pembayaran yang sah. Pembayaran dengan uang giral dapat dilakukan dengan mengeluarkan cek dan atau giro. Cek adalah surat perintah tertulis dari orang yang memiliki tabungan atau simpanan di bank atau orang yang namanya tertera dalam cek. Sedangkan yang dimaksud dengan giro adalah simpanan pada suatu bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek atau dengan menggunakan cara pemindahbukuan. Uang giral dapat terjadi apabila orang menitipkan uang kartal kepada bank dan pihak bank membukukan setoran uang tersebut ke dalam rekening atas nama penyimpan yang bersangkutan. Uang giral seperti ini sering disebut demand deposito. Uang giral juga dapat terjadi apabila orang melakukan pinjaman kepada bank tetapi pinjaman tersebut tidak langsung diambil melainkan dititipkan lagi di bank dalam rekening atas nama peminjam. Uang giral yang demikian disebut loan deposito.

3.2 Permintaan dan Penawaran Uang

Penawaran dan permintaan uang terjadi sehubungan dengan peredaran uang dalam kegiatan/transaksi ekonomi antara kelompok kreditor atau pihak yang menawarkan uang dan pihak debitor atau pihak yang mencari/membutuhkan dana. Bila diperhatikan ada tiga pelaku yang berperan untuk memengaruhi peredaran uang di masyarakat, yaitu :

a. Otoritas Moneter

Dalam hal ini bank sentral/Bank Indonesia sebagai sumber penawar (supply) uang kartal karena kewenangan penyedia uang ada pada Bank Indonesia maka Bank Indonesia merupakan sumber atau awal perjalanan peredaran uang.

b. Lembaga Keuangan

Lembaga Keuangan, baik bank maupun bukan bank juga disebut sebagai penawar karena mereka juga menggunakan dana yang bersumber dari

cadangan bank untuk menawarkan produk-produk perbankan, baik dalam bentuk uang giral, deposito berjangka, simpanan tabungan, dan lain-lain.

c. Masyarakat (rumah tangga dan perusahaan)

Masyarakat rumah tangga, baik perseorangan maupun perusahaan adalah pihak yang membutuhkan dan pengguna uang yang ditawarkan oleh Lembaga Keuangan.

Dalam ilmu ekonomi permintaan uang memiliki arti berbeda. Permintaan uang merupakan keinginan masyarakat untuk mewujudkan kekayaannya dalam bentuk uang kas. Menurut J.M. Keynes, permintaan uang oleh masyarakat dikategorikan menjadi:

a. Keinginan untuk Bertransaksi (Transaction Motive)

Individu yang memerlukan uang tunai untuk membeli barang atau memenuhi kebutuhannya. Perusahaan membutuhkan uang kas untuk membiayai pembelian mesin dan bahan baku. Pengeluaran ini sering terjadi lebih dahulu sebelum pemasukan/pendapatan sehingga sangat diperlukan adanya uang kas di tangan. Kebutuhan untuk melakukan transaksi menyebabkan masyarakat ingin memegang uang kas. Ketika pendapatan seseorang meningkat maka mereka mampu membeli barang dan jasa lebih banyak. Jadi, permintaan uang kas untuk tujuan transaksi tergantung dari besar kecilnya pendapatan. Semakin tinggi tingkat pendapatan seseorang, makin besar keinginan menyimpan uang kas untuk kebutuhan transaksi. Jumlah uang yang dipakai untuk transaksi-transaksi ini sering disebut uang aktif. Hal ini karena uang itu dipakai untuk dibelanjakan dan dengan demikian selalu ada peredaran dan perputaran untuk menggerakkan proses produksi, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan menciptakan kesempatan kerja.

b. Keinginan untuk Berjaga-jaga (Precautionary Motive)

Dalam kenyataan, tidak semua uang akan digunakan untuk tujuan transaksi. Tentu ada sebagian uang yang ditahan dalam bentuk uang kas dengan tujuan tidak untuk dibelikan barang pada saat itu, tetapi untuk berjaga-jaga. Kondisi masa depan yang tidak terduga mendorong orang untuk menyimpan uang kas berdasarkan motif berjaga-jaga. Motif ini juga dipengaruhi oleh tinggi rendahnya pendapatan seseorang. Semakin tinggi pendapatan seseorang maka kemampuan menyimpan uang kas untuk berjaga-jaga semakin tinggi. Hal tersebut akan membawa kebutuhan yang semakin tinggi akan perlunya uang untuk berjaga-jaga. Secara keseluruhan, semakin tinggi pendapatan maka kebutuhan masyarakat terhadap uang untuk berjaga-jaga juga semakin tinggi.

c. Keinginan untuk Berspekulasi (Speculative Motive)

Uang dapat digunakan sebagai alat untuk mendapatkan ke-untungan. Motivasi menyimpan uang untuk memperoleh keuntungan disebut motif spekulasi. Motif spekulatif diwujudkan dalam pembelian surat-surat berharga, seperti saham dan obligasi (surat utang). Motif ini dipengaruhi oleh tingkat bunga. Pendapatan dari memegang obligasi adalah pendapatan bunga dan dari selisih harga penjualan obligasi. Pada tingkat bunga yang terlalu tinggi, permintaan uang kas menjadi rendah. Bila tingkat bunga yang berlaku dianggap terlalu rendah, masyarakat menganggap lebih menguntungkan jika memegang uang kas sehingga keinginan untuk berspekulasi turun.

Ada dua faktor utama yang memengaruhi permintaan uang, yaitu pendapatan dan tingkat bunga. Selain itu, permintaan uang dipengaruhi oleh:

a. Kepastian tentang Pendapatan yang Diharapkan

Bila masyarakat memiliki kepastian tentang pendapatan yang diharapkan di masa mendatang maka permintaan uang cenderung turun. Sebaliknya, bila masyarakat tidak yakin bahwa pendapatan yang diharapkan kemungkinan tidak menjadi kenyataan maka permintaan uang kas cenderung naik.

b. Harapan tentang Harga

Bila masyarakat menganggap bahwa di kemudian hari harga-harga barang dan jasa akan turun mereka akan cenderung menahan uang kas dan menunda pembelian barang. Sebaliknya, bila diperkirakan harga akan naik, permintaan uang oleh masyarakat cenderung turun.

c. Selera Masyarakat

Selera masyarakat akan memengaruhi permintaan uang. Misalnya, peningkatan selera masyarakat terhadap barang-barang impor yang mahal akan meningkatkan permintaan terhadap uang kas untuk tujuan transaksi.

d. Sistem/Cara Pembayaran yang Berlaku

Cara pembayaran ini berhubungan erat dengan sistem atau proses produksi barang. Bila proses produksi mulai dari bahan mentah sampai barang jadi dan distribusinya dilakukan oleh beberapa perusahaan berbeda dengan pembayaran kontan maka permintaan uang kas semakin besar.

e. Kekayaan dari Masyarakat

Bila suatu masyarakat semakin kaya maka permintaan terhadap uang cenderung meningkat. Meski demikian tidak selalu bahwa kenaikan kekayaan yang cukup besar akan secara otomatis meningkatkan permintaan uang kas.

Mungkin ada sebagian yang diwujudkan dalam bentuk tabungan atau surat berharga jangka pendek.

f. Tersedianya Fasilitas Kredit

Dengan makin banyak serta mudahnya fasilitas kredit seperti kartu kredit dan pembayaran angsuran maka permintaan uang kas semakin kecil.

Pada dasarnya, jumlah uang yang beredar dalam suatu perekonomian ditetapkan oleh bank sentral melalui pengaturan kredit perbankan. Perkembangan jumlah uang yang beredar mencerminkan perkembangan ekonomi. Apabila perekonomian tumbuh dan berkembang, jumlah uang yang beredar juga berubah termasuk komposisinya. Beberapa faktor yang memengaruhi penawaran uang, di antaranya:

a. Tingkat Bunga

Tingkat bunga merupakan faktor utama yang menentukan jumlah uang beredar. Ketika tingkat bunga tinggi, permintaan uang kas akan turun karena masyarakat menganggap jika uang disimpan (tidak dibelanjakan) akan lebih menguntungkan. Akibatnya, permintaan terhadap barang dan jasa pun mengalami penurunan serta kegiatan perekonomian menjadi lesu. Oleh karena itu, Bank Indonesia akan menambah jumlah uang beredar melalui kebijakan moneter (menurunkan suku bunga SBI).

b. Tingkat Inflasi atau Deflasi

Pada kondisi inflasi, bank sentral akan cenderung mengurangi penawaran uang. Tujuannya adalah untuk mengurangi atau meredam agar inflasi tidak semakin memburuk. Deflasi pun membawa dampak negatif bagi perekonomian. Karena penurunan harga secara terus-menerus akan melemahkan gairah berusaha dan berinvestasi.

c. Tingkat Produksi atau Pendapatan Nasional

Pada tingkat produksi atau pendapatan nasional yang rendah, pemerintah cenderung akan memperbanyak jumlah uang yang beredar. Tujuannya adalah untuk meningkatkan permintaan agregat sehingga dunia usaha dapat meningkatkan kegiatan produksi.

3.3 Lembaga Keuangan Perbankan

Bank adalah lembaga kepercayaan yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi, membantu kelancaran sistem pembayaran dan yang tidak kalah pentingnya adalah sebagai lembaga yang menjadi sarana dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah yaitu kebijakan moneter.

Definisi, pengertian, dan cakupan kegiatan bank sebagaimana diatur oleh ketentuan yang berlaku dapat bervariasi antara satu negara dengan negara yang tampak pada sumber pendanaannya yang berasal dari simpanan masyarakat dan pada penyaluran dananya dalam bentuk kredit pada dunia usaha dan alternatif investasi lainnya. Di Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana tersebut kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pembagian jenis-jenis bank dapat dikelompokkan menurut fungsinya, kepemilikannya, bentuk hukum, dan organisasinya. Jenis bank menurut fungsinya.

1. Bank Sentral

Pada awalnya bank sentral disebut sebagai bank of issue atau bank sirkulasi karena tugasnya untuk menerbitkan uang kertas dan logam sebagai alat pembayaran yang sah di suatu negara dan mempertahankan konversi uang dimaksud terhadap emas atau perak atau keduanya. Bank Indonesia berawal dari De Javasche Bank N.V yang merupakan salah satu bank milik pemerintah Belanda. De Javasche Bank N.V kemudian dinasionalisasi pemerintah RI tanggal 6 Desember 1951 dengan UU No. 24 Tahun 1951 menjadi bank milik pemerintah RI. Tujuan dan tugas Bank Indonesia sebagai bank sentral Republik Indonesia diatur secara jelas dalam UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2004. Tujuan Bank Indonesia ditetapkan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah yang dimaksudkan dalam Undang-Undang tersebut adalah kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa serta terhadap mata uang negara lain. Kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa dapat diukur dengan atau tercermin pada perkembangan laju inflasi. Kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain diukur berdasarkan atau tercermin pada perkembangan nilai tukar rupiah (kurs) terhadap mata uang negara lain. Penetapan tujuan tunggal pemeliharaan stabilitas nilai tukar rupiah dalam Undang-Undang menjadikan sasaran yang harus dicapai dan batas tanggung jawab Bank Indonesia akan semakin jelas dan terfokus. Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan Undang-Undang Bank Indonesia mempunyai tiga tugas, yaitu sebagai berikut.

- a. menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter;
- b. mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran; dan
- c. mengatur dan mengawasi bank.

Pelaksanaan ketiga tugas tersebut mempunyai keterkaitan dan karenanya harus dilakukan secara saling mendukung guna tercapainya tujuan Bank Indonesia secara efektif dan efisien. Tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter dilakukan Bank Indonesia antara lain melalui pengendalian jumlah uang yang beredar dan suku bunga dalam perekonomian. Efektivitas pelaksanaan tugas ini memerlukan dukungan sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman, dan handal yang merupakan sasaran dari pelaksanaan tugas mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Sistem perbankan yang sehat selain mendukung kinerja sistem pembayaran akan mendukung pengendalian moneter mengingat pelaksanaan kebijakan moneter dan efektivitasnya untuk memengaruhi kegiatan ekonomi riil dan mencapai stabilitas nilai rupiah terutama berlangsung melalui sistem perbankan. Dengan keterkaitan pelaksanaan ketiga tugas secara saling mendukung tersebut maka pencapaian tujuan Bank Indonesia akan berhasil dengan baik. Bank Indonesia diberi kewenangan penuh untuk menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memerhatikan sasaran laju inflasi dan untuk melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan berbagai instrumen kebijakan moneter. Sesuai dengan UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2004, sasaran laju inflasi sebagai sasaran akhir kebijakan moneter yang semula ditetapkan oleh pemerintah setelah berkoordinasi dengan Bank Indonesia. Pelaksanaan kebijakan moneter juga tidak dapat dilepaskan dari sistem devisa yang dianut. Untuk Indonesia, sesuai UU No. 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Nilai Tukar dianut sistem devisa bebas, yang berarti masyarakat dapat secara bebas memperoleh dan menggunakan devisa. Akan tetapi, agar lalu lintas devisa tersebut dapat mendukung pembangunan ekonomi dan tidak menyulitkan pelaksanaan kebijakan moneter, sesuai dengan UU Bank Indonesia diberi kewenangan untuk melakukan monitoring dan mengeluarkan ketentuan kehati-hatian terhadap lalu lintas devisa yang masuk dan keluar Indonesia.

2. Bank Umum

Bank umum atau bank perdagangan adalah bank yang bukan saja dapat meminjamkan atau menginvestasikan berbagai jenis tabungan yang diperolehnya, tetapi juga dapat memberikan pinjaman dari menciptakan sendiri uang giral. Bank umum merupakan lembaga keuangan yang paling penting dan berpengaruh di kegiatan ekonomi. Ini disebabkan bank umum mempunyai beberapa keistimewaan yang tidak dimiliki oleh lembaga-lembaga keuangan lainnya, di antaranya adalah sebagai berikut.

- a. Tabungan dapat diambil dengan cek

Salah satu keistimewaan itu adalah kesanggupan bank umum untuk menciptakan tabungan yang dapat sewaktu-waktu diambil dengan menggunakan cek, yaitu tabungan giral.

- b. Menciptakan daya beli

Keistimewaan yang kedua dari bank umum bersumber dari kemampuannya untuk menciptakan daya beli baru untuk menghapuskan daya beli yang ada di perekonomian. Kegiatan mencipta atau menghapuskan uang ini dilakukan oleh bank umum bila telah memberikan atau membatalkan pinjaman kepada para nasabahnya.

- c. Memberi pinjaman jangka pendek

Keistimewaan yang ketiga dari bank umum bersumber dari corak kegiatannya, yaitu meminjamkan uang yang dilakukannya. Bank umum terutama memberikan pinjaman jangka pendek. Ini berarti bank umum merupakan suatu badan yang berperan penting bagi perusahaan-perusahaan untuk menyesuaikan keadaan keuangan dengan gerak naik-turunnya kegiatan ekonomi.

Sebagai organisasi bisnis, bank umum dapat memiliki wewenang melalui usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk menjalankan fungsinya, seperti berikut:

- a. memberi dan menerima pinjaman dari perusahaan lain atau masyarakat;
- b. melayani jasa pengiriman uang (transfer) antar bank;
- c. menerima titipan barang-barang berharga;
- d. melakukan giro dan inkaso antarbank;
- e. melakukan kegiatan valuta asing;
- f. tidak boleh melakukan usaha asuransi tetapi boleh mendirikan anak perusahaan yang melakukan usaha asuransi.

Seperti telah dibahas sebelumnya, kegiatan pokok lembaga perbankan adalah menarik dana dari masyarakat (kredit pasif), menyalurkan dana ke masyarakat yang membutuhkan (kredit aktif), dan memberikan jasa-jasa keuangan lainnya. Ada beragam bentuk produk perbankan dari bank umum.

- a. Anjungan Tunai Mandiri (ATM)

Melalui ATM Anda dapat mengambil uang yang disimpan di bank dalam jumlah yang dikehendaki (tetapi ada batas maksimum pengambilan dalam sehari) setiap saat (selama 24 jam sehari). Selain untuk menarik uang tunai, melalui ATM juga dapat dilihat saldo rekening atau tabungan di bank. Mesin ATM banyak dijumpai di tempat-tempat keramaian atau pusat perbelanjaan.

Fasilitas ATM ini memang mempermudah nasabah untuk mendapatkan dana tunai. Namun dampak negatifnya, nasabah menjadi sulit membatasi diri untuk mengambil uang dan cenderung konsumtif.

b. Tabungan

Tabungan adalah simpanan pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dapat dipersamakan dengan itu. Penarikan tabungan dapat dilakukan sewaktu-waktu (tidak terikat waktu).

c. Giro

Giro adalah simpanan pada bank yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan mempergunakan cek, surat perintah pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindahbukuan. Simpanan giro disebut pula simpanan rekening koran. Penarikan rekening dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek atau bilyet giro.

d. Deposito Berjangka

Deposito berjangka adalah simpanan pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian yang dibuat antara penyimpan/nasabah dengan bank yang bersangkutan. Seseorang dapat membuka rekening deposito dengan jangka waktu simpanan 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, atau 12 bulan. Bunga deposito untuk masing-masing jangka waktu tersebut berlainan. Bukti/sertifikat kepemilikan deposito dapat diperdagangkan.

e. Sertifikat Deposito

Sertifikat deposito pada dasarnya sama dengan deposito berjangka, hanya saja bukti/sertifikat simpanannya dapat diperdagangkan.

f. Deposits on Call

Deposits on Call adalah simpanan yang tetap di bank selama deposan tersebut tidak memerlukannya. Jika deposan tersebut akan mengambil uangnya, ia harus memberitahukan pihak bank terlebih dahulu.

g. Loan Deposits

Loan deposits adalah pinjaman yang dititipkan lagi di bank dan dapat diambil sewaktu-waktu.

h. Kiriman Uang

Kiriman uang adalah suatu jasa dalam pengiriman uang antarbank atas permintaan seseorang atau perusahaan yang ditujukan kepada penerima (perorangan/perusahaan) di tempat lain. Alat atau sarana yang digunakan

bermacam-macam, yaitu faksimile, telepon, dan EFT. EFT (Electronic Funds Transfer) adalah sistem kiriman uang dengan alat elektronik dari salah satu kantor cabang bank yang telah online/otomatis ke kantor cabang bank lainnya yang juga telah otomatis.

i. Safe Deposit Box (SDB)

SDB adalah suatu jasa yang disediakan dalam bentuk tempat penitipan (box), yaitu tempat-tempat khusus yang digunakan untuk menyimpan barang-barang yang berharga, misalnya perhiasan berupa emas dan berlian, ijazah, surat-surat berharga (surat tanah/rumah), dan lain-lain. Meskipun jenis barang tersebut dapat disimpan dalam brankas di rumah, namun dengan menyimpan di SDB, masyarakat mengurangi risiko akibat pencurian, kebakaran, atau bencana.

Contoh dari bank umum seperti Bank Mandiri, BNI 1946, BCA, dan Bank Mega.

3. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Perbedaan utama antara bank umum dengan BPR terletak pada pemberian jasa lalu lintas pembayaran. Bank Umum dapat memberikan jasa lalu lintas pembayaran karena bank umum diperbolehkan menerima simpanan masyarakat dalam bentuk rekening giro, yang penarikannya dapat dilakukan dengan menggunakan cek atau alat pembayaran lalu lintas giral lainnya dan ikut serta dalam kegiatan kliring. Terkait dengan hal ini, bank umum dapat menciptakan uang giral sehingga bank umum juga disebut Bank Pencipta Uang Giral (BPUG). BPR tidak diperkenankan menerima simpanan masyarakat dalam bentuk rekening giro dan juga tidak dapat ikut serta kegiatan kliring sehingga disebut bank yang tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Usaha yang dapat dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah sebagai berikut.

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito.
- b. Memberikan pinjaman kepada masyarakat.
- c. Menyediakan fasilitas pertukaran valuta asing.

Tidak seperti bank umum, kegiatan BPR terbatas oleh beberapa larangan seperti :

- a. menerima simpanan dalam bentuk giro;
- b. melakukan lalu lintas moneter, seperti transfer, kliring, atau wesel;
- c. melakukan pembayaran ke luar negeri;
- d. melakukan usaha asuransi.

4. Bank Syariah

Bank syariah atau bank yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil, sebenarnya bukanlah bank baru di Indonesia. Bank syariah sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1992, yaitu dengan beroperasinya bank Muamalat Indonesia. Namun, bank syariah diatur secara formal sejak di amendemennya UU No. 7 Tahun 1992 dengan UU No. 10 Tahun 1998 dan UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Sejak itu mulai berkembanglah bank dengan prinsip bagi hasil di Indonesia. Berbeda dengan bank yang beroperasi secara konvensional yang mempergunakan suku bunga, bank syariah beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil. Seorang penabung di bank syariah tidak menerima pendapatan bunga dari uang yang ditabung, tetapi menerima pendapatan bagi hasil dari dana yang ditanamkan di bank. Demikian juga dengan pembiayaan berdasarkan bagi hasil (bilau bank umum disebut sebagai kredit), bank tidak mendapatkan pendapatan bunga kredit, tetapi memperoleh pendapatan bagi hasil. Pengaturan dan pengawasan terhadap bank syariah berbeda karena terdapat perbedaan dalam cara operasinya. Peranan Bank Indonesia dalam pengembangan bank syariah adalah untuk mewujudkan iklim yang kondusif bagi perkembangan bank syariah yang sehat dan konsisten (istiqomah) terhadap prinsip-prinsip syariah sehingga mewujudkan perbankan syariah yang mampu menggerakkan sektor riil melalui kegiatan pembiayaan yang berbasis ekuitas dalam kerangka tolong-menolong dan menuju kebaikan untuk mencapai kemaslahatan umat. Prinsip-prinsip bank syariah adalah sebagai berikut.

a. Prinsip Mudharabah

Perjanjian antara pemilik modal dengan pengusaha. Bank memberikan modal, para nasabah memberikan keahliannya, sedangkan laba dibagi menurut rasio nisbah yang disetujui.

b. Prinsip Murabahah

Persetujuan jual beli suatu barang dengan harga sebesar harga pokok ditambah keuntungan yang disepakati bersama. Persetujuan tersebut juga meliputi cara pembayaran sekaligus. Para nasabah bank membeli suatu produk komoditi menurut rincian tertentu dan menghendaki agar bank mengirimkannya kepada mereka berdasarkan imbalan harga tertentu menurut persetujuan awal antara kedua belah pihak.

c. Prinsip Musharakah

Perjanjian kerja sama antara dua pihak atau lebih pemilik modal membiayai suatu usaha. Baik bank maupun klien menjadi mitra usaha

dengan menyumbang modal di berbagai tingkat dan mencapai kata sepakat terhadap rasio laba di muka untuk waktu tertentu.

d. Wadi'ah

Perjanjian antara pemilik barang dengan menyimpan di mana pihak penyimpan bersedia untuk menyimpan dan menjaga keselamatan barang yang dititipkan kepadanya.

e. Bai' Bithaman Ajil

Persetujuan jual beli suatu barang dengan harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati bersama. Persetujuan ini termasuk jangka waktu pembayaran dan jumlah angsuran.

f. Ijarah

Perjanjian antara pemilik barang dengan penyewa yang membolehkan penyewa untuk memanfaatkan barang tersebut dengan membayar sewa sesuai dengan persetujuan kedua belah pihak.

g. Ta'jri

Sama seperti ijarah, namun setelah berakhir masa sewa, pemilik barang menjual barang tersebut kepada penyewa dengan harga yang disetujui kedua belah pihak.

h. Sharf

Kegiatan jual beli suatu mata uang dengan mata uang lainnya.

i. Al Qarol ul Hasan

Perjanjian pinjam meminjam uang untuk membantu menerima pinjaman.

j. Al Bai'al Dayan

Perjanjian jual beli secara diskonto atas piutang tagihan yang berasal dari jual beli barang dan jasa.

k. Kafalah

Jaminan yang diberikan kepada suatu pihak lain, di mana pihak pemberi jaminan bertanggung jawab atas pembayaran kembali suatu utang.

l. Rahan

Menjadikan barang-barang berharga sebagai agunan untuk menjamin dipenuhinya suatu kewajiban.

m. Hiwalah

Pengalihan kewajiban dari suatu pihak yang mempunyai kewajiban kepada pihak lain.

n. Wakalah

Perjanjian pemberian kuasa kepada pihak lain untuk mewakilinya untuk melaksanakan suatu tugas atas nama pemberi kuasa.

Untuk produk-produk yang dipasarkan bank syariah pada umumnya sama dengan jenis produk bank konvensional. Jenis produk yang dipakai oleh bank syariah berupa giro, tabungan, deposito berjangka, dan penerimaan dana lainnya. Perkembangan bank syariah di Indonesia cukup menggembirakan. Selain menggembirakan Bank Muamalat Indonesia (BMI), bank syariah milik pemerintah juga didirikan, seperti Bank Syariah Mandiri (BSM). Sekarang ini telah banyak didirikan bank syariah sebagai cabang dari bank konvensional, seperti Bank BNI, IFI, dan BPD.

Menurut kepemilikannya, bank dikelompokkan menjadi bank milik negara, bank milik swasta, bank koperasi dan bank asing.

1. Bank milik negara adalah bank yang modalnya sebagian besar atau keseluruhan berasal dari negara. Misalnya, BRI, BNI 1946, dan Bank Mandiri.
2. Bank milik swasta adalah bank yang modalnya berasal dari perorangan atau swasta. Misalnya, BCA, Bank Lippo, Bank Danamon, Bank Mega, dan lain-lain.
3. Bank koperasi adalah bank yang modalnya berasal dari perkumpulan koperasi. Misalnya, Bukopin (Bank Umum Koperasi Indonesia)
4. Bank Asing merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri. Contoh: ABN Amro, Bank of America

Menurut bentuk hukumnya bank dikelompokkan menjadi (1) bank berbentuk perseorangan terbatas (PT); (2) bank berbentuk firma (Fa); (3) bank berbentuk badan usaha perseorangan; dan (4) bank berbentuk koperasi. Menurut organisasinya bank dikelompokkan menjadi (1) unit banking adalah bank yang hanya mempunyai satu organisasi dan tidak memiliki cabang di daerah lain; (2) *branco banking* adalah bank yang memiliki cabang-cabang di daerah lain; dan (3) *correspondenc banking* adalah bank yang dapat melakukan pemeriksaan dokumen ekspor-impor dan kegiatan utamanya di luar negeri.

3.4 Lembaga Keuangan Bukan Bank

Lembaga keuangan bukan bank (LKBB) adalah badan usaha yang melakukan kegiatan dalam bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dan menyalurkannya ke masyarakat untuk membiayai investasi perusahaan. LKBB bertujuan mendorong perkembangan pasar uang dan pasar modal serta membantu permodalan sejumlah perusahaan. LKBB meliputi pihak-pihak berikut.

1. Lembaga Pembiayaan Pembangunan dan Lembaga Perantara Penerbitan dan Perdagangan Surat Berharga

Lembaga pembiayaan pembangunan dan lembaga perantara penerbitan dan perdagangan surat-surat berharga mempunyai kegiatan menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan surat berharga, sebagai perantara untuk mendapatkan partner dari dalam dan luar negeri, serta melakukan usaha sebagai makelar, komisioner dan pedagang efek dalam pasar uang dan pasar modal. Misalnya PT Pembangunan Usaha Indonesia (PT Bahana), PT Private Development Finance Company of Indonesia Limited (PT PDFCI), PT Indonesia Investment International (PT Indovert), PT Merchant Investment Cooperation (Merincop) dan PT Sarana Bersama Pembiayaan Indonesia. Selain kegiatan-kegiatan tersebut, lembaga-lembaga melakukan kegiatan khusus berupa pemberian kredit pembelian rumah. Contoh lembaga yang melakukan kegiatan seperti itu adalah PT Papan Sejahtera.

2. Asuransi

Asuransi merupakan salah satu jenis lembaga keuangan selain bank. Kegiatan asuransi itu sendiri mencakup bidang yang luas, bahkan hampir semua aspek kehidupan manusia dapat diasuransikan. Asuransi pada prinsipnya memberikan perlindungan kepada masyarakat dari bahaya-bahaya yang tak terduga dan mengambil risiko dari pihak lain. Praktek suatu perusahaan asuransi tergantung dari premi yang diterima dari tertanggung. Secara umum asuransi dan kehadirannya di negara sedang membangun seperti di Indonesia merupakan usaha untuk menggerakkan dana masyarakat. Karena kemajuan kegiatan asuransi akan berdampak kepada penyediaan dana pembangunan. Penyelenggara asuransi dapat berbentuk perusahaan pemerintah maupun swasta. Badan hukum dari perusahaan itu dapat perseroan terbatas, perseroan komanditer dan firma. Peranan perusahaan asuransi antara lain sebagai berikut.

- a. Menambah lapangan dan kesempatan kerja di masyarakat.
- b. Mengurangi kekhawatiran dalam kehidupan.
- c. Mengurangi atau memperkecil kerugian yang ditanggung.
- d. Memperlancar kegiatan-kegiatan ekonomi di masyarakat.
- e. Menyediakan kebutuhan keuangan di masyarakat.
- f. Menjamin stabilitas usaha.

Bidang usaha asuransi dapat dikembangkan dalam berbagai bentuk, di antaranya adalah sebagai berikut.

- a. Asuransi jiwa
- b. Asuransi pengangkutan
- c. Asuransi kesehatan

- d. Asuransi sosial
 - e. Asuransi mobil
 - f. Asuransi tenaga kerja
3. Leasing
- Leasing adalah setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan, dengan jangka waktu tertentu dan berdasarkan pembayaran berkala. Usaha leasing ini juga sering disebut sewa guna usaha. Artinya, barang-barang modal disewa dan sekaligus dibeli secara kredit.
4. Dana Pensiun
- Dana pensiun dibentuk karena dua kepentingan, yaitu dari sisi perusahaan atau pemberi kerja dan dari sisi pegawai atau karyawan. Pegawai tentunya menginginkan adanya jaminan secara ekonomi pada hari tuanya pada saat mereka tidak bekerja lagi. Sedangkan dari pihak perusahaan atau pemberi kerja ingin meningkatkan kesejahteraan para karyawannya. Penyelenggara dana pensiun harus seizin dari menteri keuangan. Berdasarkan UU No. 11 tahun 1992 tentang dana pensiun, yang dimaksudkan dana pensiun adalah salah satu lembaga keuangan selain bank yang berusaha menghimpun dana untuk jangka panjang dan untuk menjamin kelanjutan penghasilan hari tua karyawan yang sudah berhenti bekerja setelah umur pensiun dan keluarganya. Dana pensiun mempunyai peran ganda, baik bagi pembangunan secara umum maupun bagi peserta yang bersangkutan secara khusus, di antaranya sebagai berikut.
- a. Dana pensiun merupakan lembaga atau badan hukum yang dapat menciptakan lapangan kerja atau kesempatan kerja di masyarakat.
 - b. Dana pensiun merupakan penghimpun dana yang berguna untuk memelihara kesinambungan pembangunan ekonomi.
 - c. Dana pensiun memberi kelanjutan penghasilan setelah pesertanya pensiun atau berhenti kerja.
 - d. Dana pensiun memberi motivasi kerja bagi para pesertanya karena hari tua yang terjamin.
 - e. Dana pensiun menghilangkan kekhawatiran di hari tua.
 - f. Dana pensiun mendorong peningkatan produktivitas kerja.
- Dengan peranan yang mulia itu, perlu dilakukan pengelolaan dana pensiun secara sungguh-sungguh dan dilindungi Undang-Undang.
5. Pegadaian
- Perusahaan umum pegadaian merupakan adalah satu jenis lembaga keuangan nonbank yang diselenggarakan oleh pemerintah. Kegiatan utama dari

pegadaian adalah menyalurkan pinjaman berdasarkan hukum gadai untuk membantu masyarakat yang berpenghasilan rendah. Selain itu, pegadaian diharapkan dapat turut membantu atau setidaknya menghilangkan praktik ijon, pegadaian gelap dan pinjaman dengan persyaratan yang memberatkan dan tidak sewajarnya. Selain memberi layanan pinjaman dengan sistem gadai, pegadaian juga menyelenggarakan jasa taksiran untuk perhiasan dan jasa penitipan barang dan surat-surat berharga. Pada perkembangannya lebih lanjut, pegadaian juga menyelenggarakan penjualan emas, baik berupa emas perhiasan maupun emas batangan di beberapa kantor cabang pegadaian tersebut. Penyelenggaraan pinjaman melalui pegadaian adalah dengan menggunakan jaminan benda-benda bergerak, seperti perhiasan emas, sepeda, mesin jahit, televisi dan sepeda motor. Selain dipakai untuk menutup kebutuhan konsumtif jangka pendek, ada juga pinjaman yang digunakan untuk keperluan usaha produktif terutama untuk membantu permodalan nasabah di bidang pertanian dan usaha-usaha kecil lainnya. Jangka waktu pinjaman melalui pegadaian biasanya satu tahun atau kurang. Ini berarti pegadaia cenderung melayani pinjaman jangka pendek. Apabila peminjam tidak menebus barang yang digadaikan sampai batas waktu yang disepakati, pihak Perum Pegadaian berhak melelang barang-barang jaminan tersebut kepada masyarakat umum. Apabila harga jual dalam lelang lebih tinggi dari nilai pinjaman, kelebihan tersebut akan dikembalikan kepada peminjam. Hal ini mungkin terjadi karena pemberian pinjaman selalu lebih rendah di harga taksir barang-barang yang dijaminakan tersebut.

6. Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi simpan pinjam atau koperasi kredit merupakan salah satu jenis koperasi yang anggota-anggotanya mempunyai kepentingan langsung di bidang kredit atau pinjaman. Koperasi simpan pinjam menjalankan kegiatan tabungan dan pinjaman. Prinsip dasar koperasi ini tidak berbeda dari koperasi pada umumnya. Tujuan dari Koperasi Simpan Pinjam adalah sebagai berikut.

- a. Membantu keperluan kredit kepada para anggota yang sangat membutuhkan dengan syarat-syarat yang ringan.
- b. Mendorong para anggota untuk hidup hemat, karena didorong untuk menabung.
- c. Mendidik para anggota supaya dapat memupuk modal dengan tabungan secara teratur, dengan maksud modal sendiri dan modal koperasi menjadi semakin kuat.

- d. Mendorong sikap hidup setia kawan dan saling membantu dalam kegiatan simpan pinjam.
- e. Menambah pengetahuan tentang perkoperasian Indonesia dan berkoperasi.

Kehadiran koperasi simpan pinjam di pembangunan ekonomi sangat penting karena koperasi simpan pinjam ikut mempercepat perputaran modal di masyarakat dan mendorong kegiatan-kegiatan usaha kecil yang lebih banyak dikerjakan di desa-desa dan membantu penyebaran dan pemerataan pendapatan masyarakat. Untuk mencapai tujuan pemberian kredit, yang perlu mendapat perhatian adalah pengawasan penggunaan kredit tersebut agar terhindar dari penyelewengan penggunaannya dan berdaya hasil yang maksimal.

3.5 Kebijakan Moneter

Di zaman perekonomian global seperti sekarang, interaksi ekonomi antar negara merupakan salah satu aspek penting dari perkembangan ekonomi suatu negara yang semakin terbuka. Dengan semakin besarnya keterkaitan antar negara maka semakin terbuka pula perekonomian negara yang bersangkutan seperti yang tercermin pada peningkatan transaksi perdagangan dan arus dana antarnegara.

Keterbukaan perekonomian suatu negara akan membawa konsekuensi pada perencanaan dan pelaksanaan kebijakan ekonomi makro, termasuk kebijakan moneternya. Indonesia sebagai salah satu negara yang menganut keterbukaan ekonomi mau tidak mau juga harus memiliki strategi tersendiri untuk melaksanakan kebijakan moneternya. Istilah kebijakan moneter banyak dipakai untuk menyebutkan seluruh tindakan untuk memengaruhi jumlah uang beredar dan atau harga uang (yaitu tingkat bunga). Lembaga yang berwenang untuk menjalankan tindakan memengaruhi jumlah uang yang beredar adalah bank sentral di setiap negara yang di Indonesia wewenang itu dipegang Bank Indonesia.

Pasang surut perkembangan perekonomian di Indonesia terlebih dengan adanya krisis ekonomi yang berkepanjangan membawa konsekuensi tersendiri bagi arah kebijakan perekonomian secara makro khususnya arah kebijakan moneter itu sendiri. Bank Indonesia sebagai otoritas moneter berusaha melakukan langkah-langkah strategis guna meningkatkan upaya pemulihan perekonomian Indonesia yang mengalami keterpurukan akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan.

Kebijakan moneter bertujuan untuk mencapai kestabilan ekonomi yang diwujudkan dalam kestabilan harga-harga barang sehingga iklim berusaha terkondisi sedemikian rupa dan pada gilirannya tercapai peningkatan kegairahan berusaha. Tujuan kebijakan moneter meliputi hal-hal berikut.

a. Stabilitas ekonomi

Stabilitas ekonomi adalah suatu keadaan pertumbuhan ekonomi berlangsung secara terkendali dan berkelanjutan. Artinya pertumbuhan arus barang/ jasa dan arus uang berjalan seimbang.

b. Kesempatan kerja

Kesempatan kerja akan meningkat apabila produksi meningkat. Peningkatan produksi biasanya diikuti dengan perbaikan nasib para karyawan ditinjau dari segi upah maupun keselamatan kerja. Perbaikan upah dan keselamatan kerja akan meningkatkan taraf hidup karyawan dan akhirnya kemakmuran dapat tercapai.

c. Kestabilan harga

Kestabilan harga ditandai dengan stabilitas harga barang dari waktu ke waktu. Harga yang stabil menyebabkan masyarakat percaya bahwa membeli barang pada tingkat harga sekarang sama dengan tingkat harga yang akan datang atau daya beli uang dari waktu ke waktu adalah sama.

d. Neraca pembayaran internasional

Neraca pembayaran dapat dikatakan dalam keadaan seimbang bila jumlah nilai barang yang diekspor sama dengan nilai barang yang diimpor. Untuk mendapatkan neraca pembayaran yang seimbang, pemerintah sering menjalankan kebijakan moneter. Misalnya, dengan melakukan devaluasi.

Kebijakan moneter adalah tindakan pemerintah untuk memengaruhi perekonomian dengan menentukan jumlah uang yang beredar. Perubahan jumlah uang yang beredar akan memengaruhi tingkat suku bunga. Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, Bank Indonesia sebagai bank sentral mempunyai wewenang untuk melaksanakan kebijakan moneter. Dalam rangka pelaksanaan kebijakan moneter dan untuk menjaga kestabilan nilai rupiah, Bank Indonesia berwenang :

a. Menetapkan sasaran moneter dengan memerhatikan laju inflasi yang ditetapkan.

b. Melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan cara-cara: operasi pasar terbuka di pasar uang, baik rupiah maupun valas; menetapkan tingkat diskonto (suku bunga); penetapan cadangan wajib minimum, dan pengaturan kredit dan pembiayaan.

Ada dua jenis kebijakan moneter, yaitu tight money policy dan easy money policy. Kebijakan uang ketat, kebijakan ini dimaksudkan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar, misalnya dengan menaikkan suku bunga atau cara penyaluran kredit yang selektif sehingga jumlah uang yang beredar dapat terkendali.

Kebijakan uang longgar, adalah kebijakan untuk mempercepat peredaran uang, misalnya dengan mempermudah pemberian kredit. Sedangkan dilihat dari instrumen kebijakan dapat dibagi dalam dua macam yaitu:

a. Kebijakan kuantitatif

Kebijakan kuantitatif adalah kebijakan yang bertujuan untuk memengaruhi jumlah peredaran uang dan tingkat suku bunga dalam perekonomian. Ada empat jenis kebijakan kuantitatif, yaitu:

a) Operasi pasar terbuka dan tingkat suku bunga

Kebijakan ini merupakan kebijakan pemerintah untuk memengaruhi jumlah uang yang beredar dengan cara membeli atau menjual surat-surat berharga milik pemerintah. Pada saat perekonomian mengalami inflasi maka pemerintah akan menjual surat-surat berharga milik pemerintah ke masyarakat. Hal ini akan menarik uang yang beredar di masyarakat masuk ke kas negara sehingga inflasi dapat teratasi. Begitu sebaliknya jika uang yang beredar sedikit maka pemerintah akan membeli surat-surat berharga tersebut sehingga uang kas negara akan keluar dan jumlah uang yang beredar akan bertambah. Agar operasi pasar terbuka dapat berjalan dengan efektif maka harus memenuhi dua persyaratan, yaitu: bank-bank perdagangan tidak memiliki kelebihan cadangan, dan dalam perekonomian tersedia cukup banyak surat-surat berharga yang dapat diperjualbelikan.

b) Kebijakan Diskonto

Kebijakan diskonto merupakan suatu kebijakan untuk memengaruhi jumlah uang dan kredit dengan menaikkan atau menurunkan tingkat bunga. Jika pemerintah menginginkan jumlah uang yang beredar di masyarakat sedikit maka pemerintah dapat menaikkan suku bunga. Tingkat suku bunga tinggi akan menjadikan masyarakat banyak untuk menabung di bank. Jika banyak yang menabung berarti banyak jumlah uang beredar di masyarakat masuk ke kas negara. Dengan demikian hal itu akan mengurangi peredaran uang yang ada di masyarakat. Sebaliknya jika pemerintah mengharapkan jumlah uang yang beredar di masyarakat banyak maka pemerintah dapat menurunkan tingkat suku bunga. Dengan tingkat suku bunga rendah menyebabkan masyarakat banyak yang melakukan pinjaman atau mengajukan kredit sehingga jumlah uang yang beredar di masyarakat semakin banyak.

c) Mengubah cadangan minimum

Dengan mengubah cadangan minimum maka Bank Indonesia dapat menambah atau mengurangi uang yang beredar di masyarakat. Untuk

mengubah cadangan minimum Bank Indonesia dapat menaikkan atau menurunkan CAR (Capital Adequacy Ratio), yaitu perbandingan antara uang tunai ditambah deposito yang dimiliki bank umum yang terdapat pada bank sentral dengan jumlah uang giral yang boleh diciptakan. Misalnya Bank Indonesia menetapkan CAR sebesar 10 %, sedangkan bank umum memiliki cadangan kas 1 miliar maka kesempatan menciptakan uang giral adalah sebesar $10\% : 1 \text{ miliar} = 10 \text{ miliar}$.

d) Kebijakan Devaluasi dan Revaluasi

Devaluasi adalah kebijakan bank sentral untuk menurunkan nilai rupiah terhadap mata uang asing. Hal ini bertujuan untuk memperbaiki neraca pembayaran luar negeri. Dengan devaluasi, harga barang ekspor akan menjadi murah di luar negeri sehingga nilai ekspor dapat meningkat. Harga barang impor (dalam mata uang domestik/ rupiah) menjadi lebih mahal sehingga dapat mengurangi besarnya impor. Peningkatan ekspor dan penurunan impor ini akan mendorong neraca perdagangan surplus, artinya ekspor lebih besar daripada impor. Revaluasi merupakan kebijakan bank sentral untuk menaikkan kembali nilai rupiah terhadap mata uang asing.

b. Kebijakan kualitatif

Kebijakan kualitatif bertujuan agar uang/pinjaman langka/sulit atau mudah diperoleh. Kebijakan kualitatif dapat ditempuh dengan dua cara yaitu:

a) Pengawasan Pinjaman Selektif

Bank Indonesia selaku bank sentral menentukan bentuk pinjaman yang boleh diberikan. Tujuannya untuk memastikan bahwa bank yang memberikan pinjaman dan melakukan investasi yang sesuai dengan harapan pemerintah. Dalam kebijakan ini, penawaran yang dilakukan bukan untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar, tetapi pengawasan dalam hal bentuk peminjaman dan investasi keuangan.

b) Pendekatan Moral

Kebijakan ini merupakan kebijakan bank sentral untuk mengadakan pertemuan langsung dengan bank-bank untuk meminta bank melakukan langkah-langkah tertentu. Dengan melalui persuasi moral, bank sentral dapat meminta bank umum untuk mengurangi atau menambah keseluruhan pinjaman, mengurangi atau menambah pinjaman kepada sektor tertentu, atau membuat perubahan atas suku bunga yang ditetapkan atau pinjaman yang diberikan.

Standar uang atau yang lebih dikenal dengan standar moneter adalah standar yang digunakan oleh otoritas moneter dalam hal ini bank sentral uang mengeluarkan uang. Ada dua jenis standar moneter, yaitu standar kertas dan standar emas.

a. Standar Kertas

Standar Kertas adalah suatu standar di mana pemerintah tidak perlu memelihara nilai kesatuan uang yang dikeluarkannya dengan nilai logam tertentu (emas maupun perak). Dalam standar ini pemerintah juga tidak mempunyai kewajiban untuk membeli maupun menjual emas atau perak dengan harga tertentu. Dalam standar kertas bank sentral selalu dapat mengeluarkan uang sampai batasan tertentu tanpa harus memerhatikan jaminan emas. Saat ini banyak negara yang menggunakan standar kertas sebagai standar moneter, termasuk Indonesia.

b. Standar Emas

Standar Emas adalah suatu keadaan di mana suatu negeri memelihara perbandingan nilai kesatuan uangnya dengan seberat emas tertentu. Setiap pencetakan uang, bank sentral harus menyimpan emas dalam persediaannya sebagai jaminan. Untuk memelihara nilai kesatuan uang tersebut terhadap seberat emas tertentu ada syarat tertentu yang harus dipenuhi, yaitu :

- a) Pemerintah harus selalu bersedia menjual dan membeli emas dalam jumlah tak terbatas dengan harga yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang.
- b) Pemerintah harus memberikan izin kepada setiap orang untuk melebur, membuat, dan memperjualbelikan mata uang emas.

Ada dua macam standar emas antara lain :

a) Standar Emas Penuh (Full Gold Standard)

Standar Emas Penuh adalah suatu sistem di mana mata uang emas sepenuhnya beredar di masyarakat atau uang kertas yang nilai nominalnya dijamin dengan emas sepenuhnya, artinya jika sewaktu-waktu kita menginginkan uang kertas tersebut menjadi emas seharga nominal uang kertas tersebut pemerintah siap menggantinya.

b) Standar Inti Emas (Gold Bullion Standard)

Standar Inti Emas adalah sistem di mana uang yang beredar bukan uang emas melainkan uang kertas yang nilai nominalnya telah dijamin dengan harga seberat emas tertentu yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang. Dalam standar ini orang tidak punya hak untuk melebur, mencetak, atau memperjual-belikan uang emas.

Dalam standar emas menandakan bahwa logam yang dijadikan standar bagi pemerintah untuk mengeluarkan uang adalah logam emas, namun beberapa negara menjadikan perak sebagai standar untuk mengeluarkan uang sehingga muncul istilah standar tunggal, standar kembar, dan standar pincang.

a) Standar Tunggal

Keadaan di mana suatu negara mendasarkan nilai uangnya dengan nilai satu logam tertentu saja (emas atau perak). Misal sampai pada pertengahan abad 19, negara-negara di dunia umumnya menggunakan standar perak, tetapi setelah pertengahan abad 19 beralih ke standar emas.

b) Standar Kembar

Keadaan di mana suatu negara mendasarkan nilai uangnya dengan nilai logam emas dan perak yang bertujuan untuk mencegah kekurangan uang yang beredar di masyarakat jika hanya menggunakan standar emas saja. Pemerintah harus memelihara nilai kesatuan mata uangnya, baik dengan seberat emas tertentu maupun dengan seberat perak tertentu.

c) Standar Pincang

Standar pincang ini hanya mungkin terjadi di negara yang menggunakan standar kembar. Standar pincang ini terjadi bilamana pemerintah gagal untuk memelihara kestabilan nilai mata uangnya dengan seberat emas atau seberat perak tertentu.

IKHTISAR

1. Uang sebagai alat tukar-menukar yang sah harus memenuhi syarat psikologis dan syarat teknis. Penawaran dan permintaan uang terjadi sehubungan dengan peredaran uang di kegiatan ekonomi yang melibatkan otoritas moneter, lembaga keuangan, dan masyarakat
2. Bank adalah lembaga kepercayaan yang berfungsi sebagai mediator, membantu kelancaran sistem pembayaran dan sebagai lembaga yang menjadi sarana dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah, yaitu kebijakan moneter.
3. Lembaga keuangan bukan bank (LKBB) adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang menghimpun dana dan menyalurkannya ke masyarakat untuk membiayai investasi perusahaan.
4. Kebijakan moneter mengarah pada seluruh tindakan untuk memengaruhi jumlah uang beredar dan atau harga uang yaitu tingkat bunga, dan Bank Indonesia sebagai bank sentral adalah lembaga yang berwenang untuk menjalankan tindakan tersebut.

BAB 4

KETENAGAKERJAAN DAN PENGANGGURAN

KOMPETENSI DASAR

Menjelaskan peran penduduk yang berkaitan dengan ketenagakerjaan sebagai sumber daya di pembangunan ekonomi serta dampak dari pengangguran.

INDIKATOR

1. Mahasiswa menyebutkan peran penduduk sebagai sumber daya di pembangunan ekonomi
2. Mahasiswa menjelaskan perihal kesempatan kerja dan bentuknya
3. Mahasiswa menyebutkan penggolongan angkatan kerja
4. Mahasiswa menyebutkan jenis pengangguran
5. Mahasiswa menjelaskan penyebab pengangguran
6. Mahasiswa menjelaskan dampak pengangguran dan cara mengatasinya.
7. Mahasiswa menjelaskan indikator ketenagakerjaan dan sistem upah

Tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi menjadi pondasi bagi pembangunan. Jumlah penduduk yang terus meningkat dan tidak diimbangi dengan pertumbuhan angkatan kerja akan memunculkan permasalahan di bidang ketenagakerjaan. Resiko meningkatnya pengangguran merupakan konsekuensi dari pertumbuhan angkatan kerja. Setiap negara selalu mengalami permasalahan tentang ketenagakerjaan. Krisis ekonomi yang pernah terjadi di Indonesia pada tahun 1997 telah menyebabkan ledakan tingkat pengangguran dikarenakan perusahaan yang memberhentikan (PHK) karyawannya dalam jumlah besar. Permasalahan tentang ketenagakerjaan merupakan salah satu fokus dari ekonomi makro karena berhubungan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi selalu diharapkan memberikan pengaruh positif terhadap terbukanya kesempatan kerja.

4.1 Penduduk sebagai Sumber Daya di Pembangunan Ekonomi

Penduduk berkedudukan sebagai sumber daya manusia di pembangunan. Adanya jumlah penduduk dalam jumlah besar, tidak menjadikannya sebagai modal yang besar bagi pembangunan suatu negara. Hal ini mungkin justru menjadi beban bagi penduduk yang lainnya. Indonesia sebagai negara keempat di dunia yang memiliki penduduk paling banyak dan hal tersebut akan terus bertambah jumlahnya setiap waktu.

Berdasarkan konsep pendapatan nasional, jumlah penduduk akan memengaruhi pendapatan per kapita suatu negara. Hal ini dikarenakan pendapatan per kapita dihitung dari jumlah pendapatan nasional dibagi dengan jumlah penduduk. Dengan demikian memunculkan kemungkinan bahwa jumlah penduduk yang meningkat pesat dapat memunculkan pula masalah bagi pembangunan.

Perkembangan jumlah penduduk yang tidak diimbangi dengan peningkatan kesempatan kerja akan menimbulkan pengangguran. Pengangguran mengakibatkan menurunnya pendapatan nasional sehingga menjadikan pengangguran sebagai permasalahan ketenagakerjaan yang dialami oleh semua negara.

Penanganan pengangguran merupakan tujuan pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah di seluruh dunia sehingga menurunkan angka pengangguran merupakan upaya yang harus segera dilakukan oleh pemerintah. Salah satu indikator keberhasilan pembangunan adalah keberhasilan pemerintah untuk mengurangi pengangguran.

Pembangunan ekonomi merupakan salah satu bidang pembangunan yang diselenggarakan pemerintah. Pembangunan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui peningkatan pendapatan per kapita dan pendapatan nasional. Angka pengangguran yang tinggi menjadi hambatan untuk mewujudkan tujuan tersebut.

Pengangguran menimbulkan masalah perekonomian, sosial, dan yang lainnya. Untuk itulah, pembangunan ekonomi juga bertujuan untuk mengurangi jumlah pengangguran. Dengan pembangunan ekonomi, pemerintah berusaha untuk meningkatkan investasi. Peningkatan investasi akan memperluas dan menciptakan kesempatan kerja baru. Upaya tersebut diharapkan memberikan ruang bagi angkatan kerja yang belum mendapatkan kesempatan kerja. Mereka memiliki peluang untuk dapat terserap seluruhnya.

4.2 Kesempatan Kerja

Keadaan kesempatan kerja pada suatu negara merupakan salah satu faktor yang terkait dengan masalah pengangguran. Kesempatan kerja merupakan peluang bagi penduduk untuk melaksanakan fungsinya sebagai sumber ekonomi di proses produksi untuk mencapai kesejahteraan. Pada pembahasan sebelumnya dikatakan bahwa permasalahan tentang tenaga kerja berhubungan dengan kesempatan kerja. Jumlah tenaga kerja yang tinggi harus dapat diikuti oleh kesempatan kerja yang luas. Jumlah tenaga kerja yang banyak yang tidak diikuti oleh kesempatan kerja yang luas, akan menyebabkan peningkatan jumlah pengangguran.

Tenaga kerja merupakan faktor produksi yang sangat penting. Manusia bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Setiap orang yang hendak bekerja memerlukan kesempatan kerja.. Di kegiatan produksi, tenaga manusia merupakan faktor produksi yang penting. Dengan bekerja, orang akan memperoleh uang atau imbalan jasa untuk membiayai kebutuhan hidupnya. Untuk itu, semua anggota masyarakat yang sudah dewasa harus memperoleh kesempatan kerja dan dapat memilih pekerjaan tertentu sesuai dengan bakat dan keahliannya.

Kesempatan kerja dalam arti sempit menunjukkan banyak sedikitnya tenaga kerja yang mempunyai kesempatan untuk bekerja, sedangkan dalam arti luas, kesempatan kerja menunjukkan banyak sedikitnya faktor-faktor produksi yang terlibat di proses produksi. Kesempatan kerja (demand for labour) adalah jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia untuk angkatan kerja atau jumlah lowongan kerja yang tersedia di dunia kerja. Kesempatan kerja juga diartikan sebagai ketidakseimbangan antara angkatan kerja dengan lapangan pekerjaan, dan hal inilah yang menyebabkan terjadinya pengangguran. Ruang lingkup dari kesempatan kerja meliputi kesempatan untuk bekerja, kesempatan untuk bekerja sesuai dengan pendidikan dan keterampilan, dan kesempatan untuk mengembangkan diri. Semakin banyak orang yang bekerja berarti semakin luas kesempatan kerja. Kesempatan kerja dibedakan menjadi dua golongan, yaitu kesempatan kerja permanen, artinya kesempatan kerja yang memungkinkan orang bekerja secara terus-menerus sampai mereka pensiun atau tidak mampu lagi untuk bekerja; dan kesempatan kerja temporer, artinya kesempatan kerja yang hanya memungkinkan orang bekerja dalam waktu relatif singkat, kemudian menganggur untuk menunggu kesempatan kerja baru. Pengangguran terjadi bila membandingkan antara jumlah angkatan kerja dan jumlah kesempatan kerja yang tersedia; dan menemukan bahwa angkatan kerja lebih besar daripada kesempatan kerja.

Di Indonesia masalah kesempatan kerja dijamin di UUD 1945 pasal 27 ayat 2 yang berbunyi "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak". Jadi pemerintah Indonesia bertanggung jawab atas penciptaan kesempatan kerja serta perlindungan terhadap tenaga kerja. Hal ini dimaksudkan agar melalui pekerjaannya setiap warga negara dapat hidup layak.

Luasnya kesempatan kerja berhubungan erat dengan kemampuan tenaga kerja untuk dapat mengisi kesempatan kerja yang tersedia, serta perusahaan-perusahaan untuk menyerap sumber daya manusia di proses produksi. Pemerintah Indonesia sebenarnya telah melakukan berbagai cara untuk memperluas kesempatan kerja, seperti upaya membentuk atau meningkatkan kompetensi diri melalui penyelenggaraan kursus-kursus keterampilan yang dilakukan pemerintah maupun masyarakat. Upaya lain adalah dengan peningkatan sumber daya manusia melalui wajib belajar 9 tahun dan meningkatkan kualitas pendidikan maupun pendirian berbagai macam usaha seperti usaha industri, jasa, maupun perdagangan.

4.3 Angkatan Kerja

Ada beberapa istilah yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, seperti penduduk, tenaga kerja, pengangguran dan angkatan kerja. Penduduk suatu negara dapat dibagi menjadi dua kelompok berdasarkan fungsinya sebagai faktor produksi. Pertama adalah tenaga kerja. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Mereka sebagai penduduk yang dianggap sanggup bekerja bila ada permintaan kerja. Mereka adalah penduduk yang berusia antara 15 tahun sampai dengan 64 tahun. Kedua adalah bukan tenaga kerja. Mereka adalah penduduk yang dianggap tidak mampu bekerja. Mereka adalah penduduk yang berusia di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun, anak-anak dan lansia (lanjut usia) termasuk dalam golongan ini.

Tenaga kerja dibagi menjadi dua golongan (usia 15 tahun sampai dengan 64 tahun), yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja adalah golongan tenaga kerja dalam rentang usia 15 sampai dengan 64 tahun yang ingin bekerja. Mereka selalu berusaha mencari pekerjaan dan secara aktif melakukan kegiatan ekonomis. Kedua adalah bukan angkatan kerja. Mereka adalah golongan tenaga kerja yang tidak bersedia bekerja meski ada kesempatan kerja. Misalkan adalah para pelajar atau mahasiswa. Selain itu juga para ibu rumah tangga yang lebih mengutamakan kualitas kehidupan keluarganya dibandingkan bekerja untuk mendapatkan penghasilan.

Dari golongan angkatan kerja selanjutnya dibagi menjadi dua golongan, yaitu pekerja dan pengangguran. Pekerja (employment) adalah golongan angkatan kerja yang sudah mendapat pekerjaan. Sebaliknya, pengangguran (unemployment) adalah golongan angkatan kerja yang belum mendapat pekerjaan.

Selanjutnya, golongan pekerja dibagi menjadi dua golongan, yaitu pekerja penuh dan setengah menganggur. Pekerja penuh (full employment) adalah pekerja yang bekerja dengan ketentuan minimal 40 jam per minggu bekerja; memiliki pendapatan minimal sama dengan UMR (Upah Minimum Regional); dan jenis pekerjaan sesuai dengan pendidikan atau keahliannya. Setengah menganggur adalah pekerja yang bekerja tapi tidak memenuhi kriteria pekerja penuh. Golongan ini dibagi menjadi tiga golongan, yaitu (1) setengah menganggur menurut jam kerja, yaitu pekerja yang bekerja kurang dari 40 jam per minggu; (2) setengah menganggur berdasar pendapatan, yaitu pekerja yang menerima pendapatan lebih kecil dari UMR tempat dia bekerja; dan (3) setengah menganggur menurut produktivitas, yaitu pekerja yang produktivitasnya di bawah standar perusahaan. Pada umumnya, pekerja yang baru masuk dan pekerja dengan cacat tertentu termasuk golongan ini.

4.4 Jenis Pengangguran

Ada beberapa macam pengangguran yang digolongkan berdasarkan lama waktu kerja dan penyebab terjadinya. Ada dua jenis pengangguran berdasarkan lama waktu kerja, yaitu pengangguran terbuka, setengah menganggur dan pengangguran terselubung.

Penganggur terbuka (open unemployment) meliputi seluruh angkatan kerja yang mencari pekerjaan pertama kali maupun yang pernah bekerja sebelumnya. Pengangguran terbuka biasanya terjadi pada generasi muda yang baru menyelesaikan pendidikan menengah dan perguruan tinggi. Ada kecenderungan mereka yang baru menyelesaikan pendidikan berusaha mencari pekerjaan yang sesuai dengan keinginan. Mereka biasanya bekerja di sektor-sektor modern. Untuk mendapatkan pekerjaan yang diinginkan, mereka bersedia menunggu beberapa waktu atau bahkan mencarinya di kota atau daerah lain yang sektor modernnya telah berkembang. Inilah yang menyebabkan pada negara yang sedang berkembang umumnya angka pengangguran terbuka di daerah perkotaan lebih besar daripada di daerah pedesaan. Tingkat pengangguran terbuka di perkotaan lebih tinggi dibandingkan di pedesaan. Hal ini karena terbatasnya kesempatan kerja yang tersedia di perkotaan sehingga terjadi persaingan untuk memperebutkan

lapangan kerja. Selain itu, di Indonesia, fenomena pengangguran terbuka ini juga diakibatkan terdapat perbedaan struktur ekonomi antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI). Struktur ekonomi KBI lebih modern dibandingkan dengan KTI sehingga angka pengangguran terbuka di KBI lebih tinggi jika dibandingkan dengan KTI.

Setengah menganggur (*under unemployment*) adalah tenaga kerja yang bekerja, namun bila diukur dari sudut jam kerja, pendapatan, produktivitas dan jenis pekerjaan tidak optimal.

Pengangguran terselubung (*disguised unemployment*) adalah pekerja yang bekerja dengan jam kerja rendah (di bawah sepertiga jam kerja normal atau kurang dari 35 jam dalam seminggu), namun masih mau menerima pekerjaan. Ada dua jenis penganggur terselubung, yaitu pekerja yang memiliki jam kerja kurang dari 35 jam per minggu karena sukarela (*kemauan sendiri*) dan ada juga yang terpaksa. Mereka yang memiliki jam kerja rendah ini biasanya bekerja pada jabatan yang lebih rendah dari pada tingkat pendidikan, memperoleh upah yang rendah, yang mengakibatkan produktivitas kerja mereka rendah. Sedangkan yang terpaksa adalah tenaga kerja yang bekerja tapi tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan atau keahliannya. Misalnya, seorang lulusan S1 dari Teknik Sipil bekerja sebagai tenaga administrasi, atau seorang Sarjana Hukum bekerja sebagai sopir taksi.

Pengangguran berdasarkan penyebab terjadinya meliputi pengangguran struktural, pengangguran konjungtural, pengangguran friksional, dan pengangguran musiman.

Pengangguran struktural adalah pengangguran yang disebabkan oleh terjadinya perubahan struktur perekonomian. Misalnya, perubahan struktur dari agraris ke industri, perubahan ini menuntut tenaga kerja memiliki keterampilan tertentu (misal keterampilan mengoperasikan mesin teknologi modern) untuk dapat bekerja di sektor industri. Tenaga kerja yang tidak memiliki keterampilan tersebut akan ditolak oleh sektor industri sehingga terjadilah pengangguran.

Pengangguran konjungtural adalah pengangguran yang disebabkan oleh pergerakan naik turunnya kegiatan perekonomian suatu negara. Ada masa pertumbuhan (naik), masa resesi (turun) dan masa depresi (turun). Pada masa resesi dan depresi, masyarakat mengalami penurunan daya beli sehingga permintaan terhadap barang dan jasa juga menurun. Penurunan ini mengharuskan produsen mengurangi produksi barang dan jasa, di antaranya dengan cara mengurangi jumlah pekerja sehingga terjadilah pengangguran. Contohnya adalah PHK yang terjadi karena krisis ekonomi tahun 1997 di Indonesia.

Pengangguran friksional adalah pengangguran yang terjadi karena seseorang yang sebenarnya masih mampu bekerja tetapi secara sukarela tidak mau bekerja dengan alasan merasa sudah mempunyai kekayaan yang cukup. Dengan demikian pengangguran ini disebabkan oleh pergeseran (friksi) pekerja yang ingin bergeser (berpindah) dari satu perusahaan ke perusahaan lain untuk mencari pekerjaan yang lebih bagus dan sesuai dengannya. Mereka menganggur untuk sementara waktu sambil mencari pekerjaan yang diinginkan. Oleh karena itu, pengangguran friksional disebut juga pengangguran sukarela (voluntary unemployment), karena terjadi karena keinginan pekerja sendiri.

Pengangguran musiman adalah pengangguran yang disebabkan oleh perubahan musim atau perubahan permintaan tenaga kerja secara berkala. Pada umumnya, setelah panen, petani akan menganggur sambil menunggu masa tanam. Contoh lain misalnya pada masa pembangunan gedung, tukang bangunan dapat bekerja. Saat gedung telah selesai dibangun, tukang bangunan menjadi pengangguran musiman sambil menunggu pembangunan berikutnya.

4.5 Penyebab Pengangguran

Penyebab terjadinya pengangguran di suatu negara, di antaranya adalah sebagai berikut.

- a. Pertumbuhan ekonomi yang jauh lebih kecil daripada pertumbuhan angkatan kerja.
- b. Jumlah lapangan kerja yang tersedia lebih kecil dari jumlah pencari kerja.
- c. Kompetensi pencari kerja tidak sesuai dengan pasar kerja.
- d. Tekanan demografis dengan jumlah dan komposisi angkatan kerja yang besar.
- e. Kurang efektifnya informasi pasar kerja bagi para pencari kerja.
- f. Terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) yang disebabkan, antara lain perusahaan yang menutup atau mengurangi bidang usahanya akibat krisis ekonomi atau keamanan yang kurang kondusif, peraturan yang menghambat investasi, hambatan di proses ekspor-impor, dan sebagainya.
- g. Berbagai regulasi dan perilaku birokrasi yang kurang kondusif bagi pengembangan usaha.
- h. Masih sulitnya arus masuk modal asing.
- i. Iklim investasi yang belum kondusif.
- j. Tekanan kenaikan upah di tengah dunia usaha yang masih lesu.
- k. Kemiskinan.
- l. Ketimpangan pendapatan.
- m. Urbanisasi.

- n. Stabilitas politik yang tidak stabil.
- o. Perilaku proteksionis sejumlah negara maju untuk menerima ekspor dari negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.
- p. Keberadaan pasar global.

4.6 Dampak Pengangguran

Pengangguran sangat berdampak pada kehidupan perekonomian dan kehidupan sosial masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang menurun, dan bahkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang menurun adalah salah satu dampak pengangguran. Berikut ini beberapa dampak pengangguran terhadap perekonomian dan kehidupan sosial:

1. Menurunkan Kegiatan Perekonomian

Pengangguran menyebabkan turunnya daya beli masyarakat. Daya beli masyarakat yang menurun menyebabkan turunnya permintaan terhadap barang dan jasa. Hal ini mengakibatkan para pengusaha dan investor tidak bergairah melakukan perluasan dan pendirian industri baru sehingga aktivitas perekonomian menjadi turun. Adapun dampak pengangguran terhadap kegiatan ekonomi antara lain sebagai berikut.

- a. Kegiatan produksi terhambat, karena menurunnya output yang dihasilkan dan kualitas dari output tersebut sehingga dapat menurunkan pendapatan nasional dan pendapatan per kapita.
- b. Kegiatan distribusi kurang lancar, karena bila output yang dihasilkan oleh suatu perusahaan kualitasnya rendah maka barang tersebut tidak laku di pasaran dalam negeri maupun luar negeri sehingga pertumbuhan ekonomi menjadi rendah.
- c. Kegiatan konsumsi berkurang, karena barang yang diperlukan oleh konsumen tidak terpenuhi oleh produsen. Bila produsen tidak mampu untuk memproduksi suatu barang maka akan terjadi kelaparan.

2. Menurunkan Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Per Kapita

Salah satu faktor penting yang menentukan kemakmuran suatu masyarakat dalam kaitannya dengan kegiatan ekonomi adalah tingkat pendapatan. Pendapatan masyarakat atau negara akan mencapai maksimum bila tingkat penggunaan tenaga kerja penuh dapat diwujudkan (full employment).

Orang yang tidak bekerja (menganggur) tidak akan menghasilkan barang dan jasa. Itu berarti semakin banyak orang yang menganggur maka PDB (Produk Domestik Bruto) yang dihasilkan akan menurun. PDB yang menurun akan

menyebabkan turunnya pertumbuhan ekonomi sekaligus turunnya pendapatan per kapita. Bila pendapatan per kapita turun maka tingkat kesejahteraan masyarakat juga ikut menurun. Adanya pengangguran akan mengurangi pendapatan masyarakat sehingga berakibat tingkat kemakmuran negara juga berkurang. Pengangguran juga dapat menimbulkan berbagai masalah ekonomi dan sosial, masalah konsumsi, kesehatan, serta prospek pembangunan di masa yang akan datang.

3. Menurunkan Tingkat Keterampilan

Dengan menganggur, tingkat keterampilan seseorang akan menurun. Semakin lama menganggur, semakin menurun pula tingkat keterampilan seseorang.

4. Meningkatkan Biaya Sosial

Pengangguran ternyata mengakibatkan meningkatnya biaya sosial karena pengangguran mengharuskan masyarakat memikul biaya-biaya seperti biaya perawatan pasien yang stres (depresi) karena menganggur, biaya keamanan dan biaya pengobatan akibat meningkatnya tingkat kriminalitas yang dilakukan oleh penganggur, serta biaya pemulihan dan renovasi beberapa tempat akibat demonstrasi dan kerusuhan yang dipicu oleh ketidakpuasan dan kecemburuan sosial para penganggur.

5. Menurunkan Penerimaan Negara

Orang yang menganggur tidak memiliki penghasilan (pendapatan). Itu berarti semakin banyak orang yang menganggur, semakin turun pendapatan nasional dan pula penerimaan negara yang diperoleh dari pajak penghasilan. Penduduk yang menganggur berarti menurunkan tingkat produktivitas secara nasional.

4.7 Cara Mengatasi Pengangguran

Kenyataan menunjukkan bahwa masalah pengangguran merupakan masalah yang berdampak buruk pada kegiatan perekonomian masyarakat pada kegiatan produksi, distribusi, maupun konsumsi. Oleh sebab itu, usaha-usaha untuk mengatasi pengangguran harus dilakukan secara terus-menerus. Adapun cara-cara untuk mengatasi pengangguran antara lain sebagai berikut.

- a. Memperluas kesempatan kerja, dengan membuka lapangan kerja baru di bidang pertanian, industri, perdagangan, maupun jasa.
- b. Industrialisasi karena dengan berdirinya banyak pabrik industri berarti lebih banyak tenaga kerja yang dapat diserap.

- c. Meningkatkan kualitas pendidikan sehingga para lulusan sudah siap pakai untuk menjadi tenaga yang terampil. Dengan pendidikan yang memadai memungkinkan seseorang untuk memperoleh kesempatan kerja yang lebih baik.
- d. Meningkatkan kualitas tenaga kerja, dengan memberikan pendidikan keterampilan melalui pendidikan formal dan nonformal.
- e. Mendirikan Pusat-pusat Latihan Kerja dengan tujuan melatih orang-orang menjadi manusia yang terampil dan menjadi manusia yang kreatif.
- f. Mendorong tumbuh kembangnya usaha-usaha atau industri rumah tangga.
- g. Memberikan kesempatan kerja ke luar negeri, melalui penyaluran Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Pemerintah memberi kesempatan kepada masyarakat untuk bekerja di luar negeri melalui Departemen Tenaga Kerja dan perusahaan pengarah tenaga kerja. Masyarakat yang berminat dapat mendaftarkan diri, kemudian diberi pelatihan dan dikirim ke luar negeri untuk ditempatkan di berbagai perusahaan atau rumah tangga.
- h. Mengintensifikasi Pekerjaan di Daerah Pedesaan yang Bersifat Padat Karya untuk mengurangi pengangguran tenaga kasar di daerah pedesaan dan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk.
- i. Menggiatkan Pelaksanaan Program Keluarga Berencana (KB) untuk menekan laju pertumbuhan penduduk sehingga mengurangi laju pertumbuhan golongan angkatan kerja. Jika antara pertumbuhan jumlah angkatan kerja seimbang dengan jumlah lapangan kerja yang tersedia maka masalah pengangguran dapat diatasi.
- j. Meningkatkan Transmigrasi ditujukan untuk mengatasi pengangguran di daerah-daerah padat penduduk. Sekaligus untuk mengurangi kepadatan penduduk terutama di Pulau Jawa. Dengan demikian, tenaga kerja di Pulau Jawa dapat lebih dimanfaatkan untuk berproduksi di daerah-daerah di luar Pulau Jawa.

Untuk mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia, pemerintah terus berusaha untuk membuka sebesar-besarnya lapangan kerja baru. Usaha yang ditempuh untuk memperluas lapangan kerja dapat dilakukan di berbagai bidang.

- a. Di bidang pertanian, antara lain membuka lahan-lahan pertanian yang baru dan meningkatkan irigasi yang teratur agar pertanian tidak tergantung pada musim.
- b. Di bidang industri, dengan cara mempermudah syarat-syarat untuk membuka perusahaan industri atau pabrik baru.
- c. Di bidang perdagangan, yaitu dikeluarkannya kebijakan deregulasi dan debirokratisasi sehingga pengusaha dapat meningkatkan perdagangan dan membuka kesempatan kerja baru.

- d. Di bidang jasa, dengan meningkatkan usaha jasa berbagai bentuk, yang nantinya akan dapat membuka lapangan kerja baru.
- e. Di bidang lainnya, antara lain dengan meningkatkan usaha bidang konstruksi, komunikasi, pariwisata, dan sebagainya.

4.8 Indikator Ketenagakerjaan

Struktur penduduk dalam negara kita dapat digambarkan dalam piramida sebagai berikut.



Adapun ratio yang penting dalam hubungannya dengan penduduk dan angkatan kerja antara lain rasio angka ketergantungan, rasio tingkat partisipasi angkatan kerja dan rasio angka pengangguran.

1. Rasio Ketergantungan (Dependency Ratio) adalah tingkat beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk yang produktif.

$$DR = \frac{PDUK}{PUK}$$

- DR = Dependency Ratio
- PDUK = Penduduk di Luar Usia Kerja
- PUK = Penduduk Usia Kerja

2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah perbandingan antara jumlah angkatan kerja dan jumlah seluruh penduduk usia kerja.

$$TPAK = \frac{AK}{PUK}$$

TPAK	=	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
AK	=	Angkatan Kerja
PUK	=	Penduduk Usia Kerja

3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang sedang mencari pekerjaan dan jumlah angkatan kerja.

$$TPT = \frac{PT}{AK}$$

TPT	=	Tingkat Pengangguran Terbuka
PT	=	Penganggur Terbuka
AK	=	Angkatan Kerja

4. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja merupakan nilai tambah Produk Domestik Bruto (PDB) dibagi dengan jumlah penduduk yang bekerja untuk menghasilkan nilai tambah tersebut. Tingkat produktivitas tenaga kerja Indonesia masih kalah dengan negara ASEAN lainnya seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand.

4.9 Sistem Upah

Sistem pengupahan di suatu negara berbeda satu dengan lainnya. Ini tergantung pada sistem ekonomi yang dianut oleh negara tersebut. Di negara RRC yang menganut sistem ekonomi sosialisme berbeda dengan sistem pengupahan di suatu negara yang menganut paham ekonomi pasar/liberal atau campuran. Sistem pengupahan merupakan kerangka bagaimana upah diatur dan ditetapkan. Sistem pengupahan di Indonesia pada umumnya didasarkan pada tiga fungsi upah yaitu: (1) mampu menjamin kehidupan yang layak bagi pekerja dan keluarganya; dan (2) mencerminkan pemberian imbalan terhadap hasil kerja seseorang, dan (3) memuat pemberian insentif yang mendorong peningkatan produktivitas kerja dan pendapatan nasional.

Di negara yang menganut sistem pasar/liberal, tinggi rendahnya gaji/upah tergantung pada beberapa faktor antara lain sebagai berikut.

- a. Jumlah permintaan tenaga kerja

Artinya bila permintaan tenaga kerja lebih besar dari pencari kerja maka biasanya gaji/upah pekerja tinggi dan sebaliknya. Ini sama dengan mekanisme pasar terhadap barang, yaitu bila permintaan tinggi maka biasanya harga barang tersebut akan mahal.

b. Jumlah penawaran tenaga kerja

Artinya bila tenaga kerja jumlahnya lebih besar dari lowongan kerja maka biasanya gaji/upah pekerja rendah dan sebaliknya. Ini sama dengan mekanisme pasar terhadap barang, yaitu bila penawaran tinggi maka biasanya harga barang tersebut akan murah.

c. Kemampuan tenaga kerja

Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan/produktivitas tenaga kerja, biasanya gaji/upah pekerja tinggi dan sebaliknya. Ini terkait dengan faktor penawaran. Biasanya tenaga kerja yang berkualitas tinggi jumlahnya sedikit, sedangkan permintaannya biasanya tinggi. Sesuai dengan mekanisme pasar maka kondisi seperti ini akan mengakibatkan tingginya harga tenaga kerja tersebut.

Upah merupakan kompensasi (balas jasa) yang diberikan kepada pekerja karena telah memberikan tenaganya kepada perusahaan. Pembayaran upah dapat dilakukan harian, mingguan atau bulanan. Di Indonesia, dikenal beberapa sistem pemberian upah, yaitu sebagai berikut.

1. Sistem upah menurut waktu, yaitu pemberian upah berdasarkan waktu (lama) bekerja dari pekerja. Misalnya seorang sopir dibayar per hari Rp170.000,- dan bila dia bekerja 5 hari maka akan dibayar Rp850.000,-.
2. Sistem upah borongan, yaitu pemberian upah berdasarkan kesepakatan pemberian kerja dan pekerja. Misalnya, untuk mengantarkan rombongan wisatawan dari Surabaya ke Bandung disepakati diborongkan dengan upah Rp2.000.000,- sampai tujuan dan kembali lagi ke Surabaya. Jasa tersebut selain diborongkan dapat juga dibayar dengan sistem upah menurut waktu, misalnya harian, dengan tujuan agar pekerja bekerja lebih bagus dan hati-hati untuk melakukan tugasnya. Dengan demikian, umumnya jumlah upah harian yang dibayarkan lebih mahal dibanding upah borongan.
3. Sistem upah menurut prestasi, yaitu pemberian upah berdasarkan prestasi (jumlah barang yang dihasilkan) pekerja. Semakin banyak jumlah barang yang dihasilkan, semakin besar upah yang diterima pekerja.
4. Sistem upah premi, yaitu pemberian upah dengan mengombinasikan sistem upah prestasi yang ditambah dengan premi tertentu. Misalnya bila pekerja mampu menyelesaikan 50 boneka dalam 1 jam akan dibayar Rp25.000,- dan kelebihan dari 50 boneka akan diberi premi misal Rp300,-per boneka. Apabila seorang pekerja mampu membuat 70 boneka dia akan menerima $Rp25.000,- + (Rp300,- \times 20) = Rp31.000,-$.

5. Sistem upah mitra usaha (co Partnership), yaitu pemberian upah seperti sistem upah bonus, bedanya upah tidak diberikan dalam bentuk uang tunai tapi dalam bentuk saham atau obligasi. Dengan memberikan, saham diharapkan pekerja lebih giat dan hati-hati dalam bekerja, karena mereka juga merupakan pemilik perusahaan.
6. Sistem upah partisipasi, yaitu pemberian upah khusus berupa sebagian keuntungan perusahaan pada akhir tahun buku. Upah ini merupakan bonus/(hadiah). Jadi, selain menerima upah seperti biasa, pada sistem upah ini, pekerja akan menerima sejumlah upah lagi setiap akhir tahun buku. Sistem upah partisipasi disebut juga sistem upah bonus.
7. Sistem upah bagi hasil, yaitu pemberian upah dengan memberikan bagian tertentu kepada pekerja dari hasil (keuntungan) yang diperoleh. Sistem ini biasa dipakai di sektor pertanian. Misalnya petani garam yang mengerjakan tambak milik orang lain dengan bagi hasil dua banding tiga yang berarti bila tambak menghasilkan 10 ton garam, petani garam mendapat 4 ton dan pemilik tambak mendapat 6 ton.
8. Sistem upah indeks biaya hidup, yaitu pemberian upah yang didasarkan pada besarnya biaya hidup. Semakin naik biaya hidup, semakin naik pula besarnya upah yang diberikan.
9. Sistem upah skala berubah (sliding scale), yaitu pemberian upah berdasarkan skala hasil penjualan yang berubah-ubah. Bila hasil penjualan bertambah, jumlah upah yang diberikan juga bertambah, demikian pula sebaliknya.
10. Sistem upah produksi (production sharing), yaitu pemberian upah berdasarkan naik turunnya jumlah produksi secara keseluruhan. Bila jumlah produksi naik 10%, upah juga naik 10%, demikian pula sebaliknya.

Di Indonesia, pengusaha dapat memilih sistem upah yang sesuai untuk jenis perusahaannya. Pemerintah memiliki kewajiban menetapkan berapa besarnya upah minimum yang harus diterima pekerja untuk memiliki hidup yang layak. Untuk melindungi kepentingan pekerja, atau untuk melindungi pekerja dari eksploitasi para pengusaha, pemerintah menerapkan kebijakan upah yang disebut upah minimum. Upah minimum adalah upah standar (baku) yang diterima agar mereka dapat mempertahankan kesejahteraan dan hidup layak sehingga tidak hidup di bawah garis kemiskinan. Penentuan upah minimum didasarkan atas dua hal yaitu Kebutuhan Fisik Minimum (KFM) dan Kebutuhan Hidup Minimum (KHM). Kebutuhan fisik minimum ditentukan atas dasar kebutuhan fisik minimum bagi pekerja lajang (standar hidup 2600 kalori per hari). Sedangkan sejak tahun 1995,

upah minimum ditentukan atas dasar kebutuhan hidup minimum (KHM) bagi pekerja lajang. Kebutuhan Hidup Minimum didasarkan atas indeks harga konsumen, kemampuan kelangsungan perusahaan, tingkat upah yang berlaku, keadaan pasar kerja, pertumbuhan ekonomi, dan pendapatan per kapita.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan pemerintah kota/kabupaten tidak boleh menetapkan UMK di daerahnya yang jumlahnya di bawah UMP yang sudah ditetapkan oleh provinsi. Gubernur menetapkan Upah minimum sebagai jaring pengaman. Upah minimum merupakan Upah bulanan terendah yang terdiri atas: Upah tanpa tunjangan; atau upah pokok termasuk tunjangan tetap.

Dalam peraturan pemerintah tersebut dinyatakan pula antara lain: Upah minimum tersebut hanya berlaku bagi Pekerja/Buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun pada Perusahaan yang bersangkutan. (2) Upah bagi Pekerja/Buruh dengan masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih dirundingkan secara bipartit antara Pekerja/Buruh dengan Pengusaha di Perusahaan yang bersangkutan. UMP atau UMK hanya berlaku bagi pekerja yang memiliki masa kerja kurang dari 1 tahun. Itu berarti bagi pekerja yang masa kerjanya lebih dari 1 tahun berhak memperoleh upah di atas UMP atau UMK. Bagi pengusaha yang telah memberikan upah di atas UMP atau UMK dilarang menurunkan upahnya.

Selain itu, pemerintah juga mengatur pajak penghasilan bagi pekerja. Bagi para pekerja yang menerima upah yang jumlahnya kurang atau sama dengan UMP atau UMK maka pemerintah wajib menanggung atau membayar pajak penghasilan para pekerja tersebut. Peraturan ini dikeluarkan dengan maksud mengurangi beban pajak para pekerja yang upahnya kurang atau sama dengan UMP atau UMK.

IKHTISAR

1. Jumlah penduduk memengaruhi pendapatan per kapita suatu negara karena pendapatan per kapita dihitung dari jumlah pendapatan nasional dibagi dengan jumlah penduduk. Dengan demikian memunculkan kemungkinan bahwa jumlah penduduk yang meningkat pesat dapat memunculkan pula masalah bagi pembangunan. Perkembangan jumlah penduduk yang tidak diimbangi dengan peningkatan kesempatan kerja akan menimbulkan pengangguran. Pengangguran mengakibatkan menurunnya pendapatan nasional sehingga menjadikan pengangguran sebagai permasalahan ketenagakerjaan yang dialami oleh semua negara.

2. Kesempatan kerja merupakan peluang bagi penduduk untuk melaksanakan fungsinya sebagai sumber ekonomi di proses produksi untuk mencapai kesejahteraan. Jumlah tenaga kerja yang tinggi harus dapat diikuti oleh kesempatan kerja yang luas. Jumlah tenaga kerja yang banyak yang tidak diikuti oleh kesempatan kerja yang luas, akan menyebabkan peningkatan jumlah pengangguran.
3. Angkatan kerja adalah golongan tenaga kerja dalam rentang usia 15 sampai dengan 64 tahun yang ingin bekerja. Mereka selalu berusaha mencari pekerjaan dan secara aktif melakukan kegiatan ekonomis.
4. Sistem pengupahan di Indonesia didasarkan pada tiga fungsi upah yaitu: (1) mampu menjamin kehidupan yang layak bagi pekerja dan keluarganya; dan (2) mencerminkan pemberian imbalan terhadap hasil kerja seseorang, dan (3) memuat pemberian insentif yang mendorong peningkatan produktivitas kerja dan pendapatan nasional. Di Indonesia, pengusaha dapat memilih sistem upah yang sesuai untuk jenis perusahaannya. Pemerintah memiliki kewajiban menetapkan berapa besarnya upah minimum yang harus diterima pekerja untuk memiliki hidup yang layak. Upah minimum adalah upah standar (baku) yang diterima agar mereka dapat mempertahankan kesejahteraan dan hidup layak sehingga tidak hidup di bawah garis kemiskinan.

BAB 5

KEBIJAKAN FISKAL

KOMPETENSI DASAR

Menjelaskan penerapan dari kebijakan fiskal oleh pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi.

INDIKATOR

1. Mahasiswa menyebutkan cakupan keuangan negara dari sisi pembelanjaan dan pendapatan sebagai peran rumah tangga negara untuk melaksanakan tugasnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Mahasiswa menjelaskan indikator APBN yang digunakan dijalankan pemerintah untuk melaksanakan kegiatan perekonomian nasional.
3. Mahasiswa menjelaskan peran APBD di proses pembangunan daerah.
4. Mahasiswa menjelaskan tujuan dari kebijakan fiskal dan bentuk-bentuk penerapannya

Rumah tangga pemerintah atau negara seperti halnya rumah tangga keluarga, juga memerlukan pendapatan untuk membiayai kebutuhannya. Hal tersebut untuk menjalankan roda pemerintahan. Untuk usaha meningkatkan pembangunan ekonomi, yang biasanya diukur dengan pertambahan pendapatan nasional, terdapat beberapa instrumen kebijakan yang dapat digunakan. Salah satu instrumen kebijakan tersebut adalah kebijakan fiskal yang berhubungan erat dengan masalah anggaran penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan pemerintah. Penerimaan dan pengeluaran negara berkaitan dengan masalah keuangan negara, sedangkan penerimaan dan pengeluaran daerah berkaitan dengan masalah keuangan daerah. Selain itu, melalui anggaran pendapatan dan belanja yang disusun oleh pemerintah dapat melakukan prioritas kegiatan yang

tentu saja bertujuan untuk memakmurkan masyarakat. Anggaran adalah suatu perencanaan mengenai pengeluaran dan penerimaan pada masa yang akan datang, umumnya disusun untuk satu tahun. Negara memerlukan anggaran untuk penerimaan maupun pengeluarannya. Untuk negara Indonesia, anggaran negara tersebut dinamakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pemerintah pusat dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pemerintah daerah.

5.1 Keuangan Negara

Penghasilan dan pengeluaran negara merupakan bentuk keuangan negara. Dengan demikian, keuangan negara merupakan pembelanjaan-pembelanjaan dan penerimaan yang dilakukan oleh rumah tangga negara untuk melaksanakan tugasnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keuangan negara juga dianggap sebagai keseluruhan hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang.

Pembelanjaan rumah tangga negara tidaklah berbeda dengan pembelanjaan di rumah tangga keluarga maupun rumah tangga produsen. Perbedaannya terletak pada motif-motif yang menjadi pendorong pembelanjaan itu. Pembelanjaan pada rumah tangga negara didorong oleh motif sosial ekonomi, yaitu motif mencari penghasilan untuk pembangunan dan kepentingan umum. Adapun pembelanjaan rumah tangga keluarga maupun rumah tangga produsen didorong oleh motif mencari penghasilan untuk kepentingan pribadi.

Semakin baik keuangan negara, semakin stabil pula kedudukan pemerintahan dalam negara tersebut. Begitu pun sebaliknya, memburuknya keuangan negara mengakibatkan kesulitan untuk mempertinggi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Perencanaan keuangan negara merupakan wewenang pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Oleh karena itu, disebut sebagai anggaran pendapatan dan belanja pemerintah.

Keuangan negara merupakan segala sumber penerimaan dan belanja negara. Keuangan negara terdiri dari beberapa unsur sebagai berikut.

1. Sumber Penerimaan Negara

Sumber pendapatan negara terdiri atas pajak, penerimaan bukan pajak, pinjaman, penciptaan uang, dan bantuan luar negeri.

a. Pajak (Tax)

Pajak berbeda dengan retribusi. Pajak adalah sumbangan wajib yang bersifat memaksa dan harus dibayar oleh para wajib pajak kepada

negara tanpa ada balas jasa (imbalan) secara langsung diterima oleh pembayar pajak. Contohnya pajak penghasilan dan pajak kendaraan bermotor. Retribusi dapat dipaksakan dengan sifat ekonomis hanya kepada orang atau badan yang menggunakan atau mendapatkan jasa atau izin yang diberikan oleh pemerintah. Balas jasa kepada wajib retribusi dapat dirasakan langsung. Contohnya retribusi kebersihan (sampah) yang manfaatnya dapat dirasakan langsung dengan diangkutnya sampah wajib retribusi oleh petugas.

b. Penerimaan Bukan Pajak (Nontax)

Penerimaan bukan pajak adalah penerimaan negara dari sumber lain, seperti laba perusahaan negara atau daerah, retribusi, tarif jasa pelabuhan, hasil sitaan atau lelang atau denda, dan hasil kegiatan perdagangan terutama kegiatan ekspor dan impor (diantaranya ekspor minyak dan gas).

c. Pinjaman atau Utang

Pinjaman dapat bersumber dari dalam negeri maupun dari luar negeri, misalnya Sertifikat Bank Indonesia (SBI), obligasi, dan surat-surat berharga lainnya. Adapun pinjaman dari luar negeri, misalnya pinjaman yang diberikan oleh Bank Dunia, Dana Keuangan Internasional (IMF) dan lain-lain.

d. Penciptaan Uang

Penciptaan uang ini sekarang diserahkan kepada Bank Indonesia (BI).

e. Bantuan Luar Negeri

Bantuan luar negeri dapat bersumber dari negara tetangga, lembaga swasta asing, maupun dari lembaga-lembaga internasional. Misalnya UNICEF, CGI, FAO, UNESCO, dan lain-lain. Bantuan luar negeri ini, digunakan untuk membiayai program-program pembangunan dan proyek-proyek pembangunan. Misalnya program KB, imunisasi, bendungan, jalan-jalan kota dan desa, dan lain-lain.

2. Pengeluaran atau Pembelanjaan Negara

Pembelanjaan negara dikelompokkan menjadi dua, yaitu pembelanjaan rutin dan pembelanjaan pembangunan.

a. Pembelanjaan rutin, yaitu pembelanjaan yang dikeluarkan harian maupun bulanan secara tetap. Pembelanjaan rutin dibagi dalam beberapa bentuk pengeluaran, yaitu sebagai berikut.

- a) Belanja pegawai terdiri atas gaji/upah, tunjangan keluarga, tunjangan-tunjangan lainnya, uang lembur, honorium atau vakasi, uang tunggu, dan lain-lain.
 - b) Belanja barang terdiri atas biaya kantor, inventaris kantor, listrik, telepon, gas dan lauk pauk, bahan-bahan, alat-alat dan barang lainnya.
 - c) Belanja pemeliharaan terdiri dari pemeliharaan gedung, jalan atau jembatan, bangunan bersejarah, rumah sakit, dan perlengkapan TNI.
 - d) Belanja perjalanan terdiri atas perjalanan dinas, pindah pegawai negeri di dalam dan di luar negeri, penampungan sementara atau uang pesangon bagi pegawai negeri yang dipindahkan.
 - e) Belanja subsidi atau bantuan terdiri atas sumbangan-sumbangan lembaga, badan-badan sosial lainnya.
 - f) Belanja subsidi daerah otonomi.
 - g) Belanja pensiun terdiri atas pembayaran pensiunan TNI atau sipil, pensiun janda atau pejabat negara, tunjangan veteran, tunjangan perintis kemerdekaan,
- b. Pembelanjaan pembangunan, yaitu pembelanjaan yang tujuannya untuk memajukan pembangunan di segala bidang. Misalnya pertanian, ekonomi, perhubungan, kesehatan, pendidikan, kebudayaan dan lain-lain. Pembelanjaan pembangunan harus disertai dengan Daftar Isi Kegiatan (DIK), Daftar Usulan Proyek (DUP), dan Daftar Isian Proyek (DIP).

5.2 APBN

Kegiatan mengurus rumah tangga negara bukan persoalan mudah, apalagi Indonesia merupakan negara yang besar secara geografis maupun demografis. Untuk dapat menjalankan tugas-tugasnya dengan baik agar tujuan pembangunan dapat tercapai, pemerintah membutuhkan aparat, investasi, sarana dan prasarana, dan sebagainya, yang berarti pemerintah harus melakukan pengeluaran. Untuk menutup pengeluaran tersebut, pemerintah perlu memiliki sumber dana atau penerimaan. Rincian penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahun akan tampak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Melalui indikator APBN dapat dianalisis seberapa jauh peran pemerintah dalam kegiatan perekonomian nasional.

APBN adalah suatu daftar yang memuat rincian pendapatan dan pengeluaran pemerintah pusat dalam jangka waktu satu tahun (1 Januari– 31

Desember) pada tahun tertentu, yang ditetapkan dengan Undang-Undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pada dasarnya tujuan dari penyusunan APBN adalah sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran negara untuk melaksanakan tugas kenegaraan untuk meningkatkan produksi, memberi kesempatan kerja, dan menumbuhkan perekonomian, untuk mencapai kemakmuran masyarakat. Selain itu, penyusunan APBN juga memiliki tujuan untuk:

- a. meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada DPR dan masyarakat luas;
- b. meningkatkan koordinasi antar bagian di lingkungan pemerintah;
- c. membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal;
- d. memungkinkan pemerintah memenuhi prioritas belanja;
- e. membantu menciptakan efisiensi dan keadilan untuk menyediakan barang dan jasa publik melalui proses pemrioritasan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memiliki tiga fungsi.

1. Fungsi alokasi.

APBN memuat rincian penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Pendapatan yang dihimpun pemerintah selanjutnya digunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran pemerintah di segala bidang sesuai dengan kebutuhan. Perolehan pajak, misalnya, dialokasikan pemerintah untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan, jalan, jembatan dan kepentingan umum lainnya.

2. Fungsi distribusi

APBN yang diperoleh dari berbagai sumber penerimaan oleh pemerintah, kemudian didistribusikan kembali kepada masyarakat, berupa subsidi, premi, dan dana pensiun.

3. Fungsi stabilitas

Pelaksanaan APBN yang sesuai dengan alokasi yang telah ditentukan (tertib anggaran) akan dapat menjaga kestabilan arus uang dan arus barang sehingga dapat mencegah fluktuasi di perekonomian nasional. Dengan kata lain, menciptakan kestabilan perekonomian nasional.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara disusun dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut.

1. Prinsip anggaran berimbang, yaitu sisi penerimaan sama dengan sisi pengeluaran, defisit anggaran ditutup bukan dengan mencetak uang baru, melainkan dengan pinjaman luar negeri.
2. Prinsip dinamis
 - a. Anggaran dinamis absolut, yaitu peningkatan jumlah tabungan pemerintah dari tahun ke tahun sehingga kemampuan menggali sumber dalam negeri bagi pembiayaan pembangunan dapat tercapai.
 - b. Anggaran dinamis relatif, yaitu semakin kecilnya persentase ketergantungan pembiayaan terhadap pinjaman luar negeri.
3. Prinsip fungsional, yaitu pinjaman luar negeri hanya untuk membiayai pengeluaran pembangunan, bukan untuk membiayai pengeluaran rutin. Semakin dinamis anggaran dalam pengertian relatif, semakin baik tingkat fungsionalitas terhadap pinjaman luar negeri.

Asas yang digunakan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara meliputi:

- a. asas kemandirian, artinya pembiayaan negara didasarkan atas kemampuan negara, sedangkan pinjaman luar negeri hanya sebagai pelengkap;
- b. asas penghematan atau peningkatan efisiensi dan produktivitas; dan
- c. asas penajaman prioritas pembangunan, artinya mengutamakan pembiayaan yang lebih bermanfaat.

Sejak disahkannya Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pengelolaan APBN mengalami perubahan di proses penganggaran, dari perencanaan hingga pelaksanaan anggaran. Berikut tahapan proses perencanaan dan penyusunan APBN.

1. Tahap pendahuluan
 - a. Tahap awal mempersiapkan rancangan APBN oleh pemerintah meliputi penentuan asumsi dasar APBN, perkiraan penerimaan dan pengeluaran, skala prioritas, dan penyusunan budget exercise. Asumsi dasar APBN meliputi:
 - a) pertumbuhan ekonomi,
 - b) tingkat inflasi,
 - c) nilai tukar rupiah,
 - d) suku bunga SBI tiga bulan,

- e) harga minyak internasional, dan
 - f) lifting.
- b. Mengadakan rapat komisi antarkomisi masing-masing dengan mitra kerjanya (departemen/lembaga teknis).
- c. Melakukan proses finalisasi penyusunan RAPBN oleh pemerintah.
2. Tahap pengajuan, pembahasan, dan penetapan APBN
- Tahapan ini dimulai dengan pidato presiden sebagai pengantar RUU APBN dan Nota Keuangan. Selanjutnya, membahas baik antara menteri keuangan dan panitia anggaran DPR maupun antara komisi-komisi dan departemen/lembaga teknis terkait. Hasil dari pembahasan berupa UU APBN memuat satuan anggaran sebagai bagian tidak terpisahkan dari UU tersebut. Satuan anggaran adalah dokumen anggaran yang menetapkan alokasi dana per departemen/lembaga, sektor, subsektor, program, dan proyek/kegiatan. Untuk membiayai tugas umum pemerintah dan pembangunan, departemen/lembaga mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL) kepada Departemen Keuangan dan Bappenas untuk kemudian dibahas menjadi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan diverifikasi sebelum proses pembayaran. Proses ini harus diselesaikan dari Oktober hingga Desember. Dalam pelaksanaan APBN dibuat petunjuk berupa Keputusan Presiden (Kepres) sebagai Pedoman Pelaksanaan APBN. Untuk melaksanakan pembayaran, kepala kantor/pimpinan proyek di masing-masing kementerian dan lembaga mengajukan Surat permintaan Pembayaran kepada Kantor Wilayah Perbendaharaan Negara (KPPN).
3. Tahap pengawasan APBN
- Fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan APBN dilakukan oleh pengawas fungsional baik eksternal maupun internal pemerintah. Sebelum berakhirnya tahun anggaran (sekitar bulan November), pemerintah melalui Menteri Keuangan membuat laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBN dan melaporkannya dalam bentuk Rancangan Perhitungan Anggaran Negara (RUU PAN) yang paling lambat dilakukan lima belas bulan setelah berakhirnya pelaksanaan APBN tahun anggaran yang bersangkutan. Laporan ini disusun atas dasar realisasi yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa keuangan (BPK). Apabila hasil pemeriksaan perhitungan dan pertanggung jawaban pelaksanaan yang dituangkan dalam RUU PAN

disetujui oleh BPK, RUU PAN tersebut diajukan kepada DPR untuk mendapat pengesahan menjadi UU Perhitungan Anggaran Negara (UU PAN) tahun anggaran bersangkutan.

Format APBN yang sekarang ini sudah disesuaikan dengan format I-Account GFS IMF Standard, yang terdiri dari tiga unsur pokok, yaitu

- a. sisi penerimaan,
- b. sisi pengeluaran, dan
- c. sisi pembiayaan.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, pos penerimaan dan pengeluaran negara dapat diuraikan kembali seperti berikut.

1. Sumber Penerimaan

Penerimaan (pendapatan) negara adalah semua penerimaan dalam negeri dan penerimaan pembangunan yang digunakan untuk membiayai belanja negara. Sumber penerimaan negara terdiri atas penerimaan dalam negeri dan penerimaan pembangunan.

a. Penerimaan Dalam Negeri

Penerimaan dalam negeri adalah semua penerimaan yang diterima negara dalam bentuk migas dan di luar migas.

a) Penerimaan Migas

Penerimaan minyak dan gas alam (migas) adalah penerimaan yang berasal dari penjualan minyak dan gas alam.

b) Penerimaan Nonmigas

Penerimaan nonmigas adalah penerimaan yang berasal dari pajak, bea cukai, nonpajak, dan penerimaan lain-lain.

c) Penerimaan Pajak

Penerimaan pajak terdiri atas pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, bea materai, serta pajak bumi dan bangunan.

d) Penerimaan Bea Masuk dan Cukai

Bea masuk dipungut atas sejumlah barang yang diimpor, sedangkan penerimaan cukai terdiri atas cukai tembakau, gula, bir, dan alkohol sulingan.

e) Penerimaan Bukan Pajak

Penerimaan bukan pajak terdiri dari penerimaan luar negeri, laba perusahaan negara, pengembalian pinjaman yang diberikan, penjualan barang negara, sewa jasa barang negara.

b. Penerimaan Pembangunan

Penerimaan pembangunan adalah penerimaan yang berasal dari bantuan dan atau pinjaman luar negeri. Penerimaan pembangunan terdiri atas penerimaan dalam bentuk bantuan program dan bantuan proyek. Bantuan dari luar negeri di antaranya bantuan pinjaman yang disalurkan melalui IGGI atau CGI.

2. Pengeluaran Negara

Pengeluaran (belanja) negara adalah semua pengeluaran negara untuk membiayai tugas-tugas umum pemerintah dan pembangunan. Belanja negara terdiri atas pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan.

a. Pengeluaran Rutin

Pengeluaran rutin terdiri atas belanja pegawai, belanja daerah, subsidi otonomi, pembayaran bunga dan cicilan utang serta subsidi BBM.

b. Pengeluaran Pembangunan

Pengeluaran pembangunan adalah semua pengeluaran negara untuk membiayai proyek pembangunan, misalnya pembangunan di sektor industri, pertanian dan kehutanan, serta sektor pendidikan.

Kondisi keuangan negara tidak selamanya stabil. Adakalanya pengeluaran lebih sedikit dari penghasilan, atau dapat pula sama, bahkan mungkin lebih besar dibandingkan dengan penghasilan. Untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional sehingga kelancaran roda pembangunan tidak terhambat maka keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran perlu dijaga.

- a. APBN dikatakan surplus apabila pendapatan (penerimaan) negara lebih besar daripada pengeluaran negara.
- b. APBN dikatakan seimbang apabila jumlah pendapatan (penerimaan) negara dapat menutup semua belanja negara yang direncanakan.
- c. APBN dinyatakan defisit apabila pendapatan (penerimaan) negara lebih kecil daripada pengeluaran negara sehingga ditutup dengan pinjaman atau dengan cara lain.

Keseimbangan APBN selain diusahakan dengan anggaran berimbang, diusahakan pula dengan jalan penghematan pengeluaran rutin, penambahan penerimaan negara, penambahan tabungan pemerintah, dan lain-lain.

5.3 APBD

Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah, serta memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi di proses pembangunan, pemerintah Republik Indonesia sejak 1 Januari 2001 menerapkan otonomi daerah. Dengan berlakunya otonomi daerah prinsip pembangunan daerah mengalami pergeseran dari sentralisasi menjadi desentralisasi. Untuk menyelenggarakan pemerintahan, daerah mempunyai hak dan kewajiban yang diwujudkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan dijabarkan dalam bentuk APBD. APBD adalah singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. APBD dapat diartikan sebagai suatu daftar yang memuat perincian sumber-sumber pendapatan daerah dan macam-macam pengeluaran daerah dalam waktu satu tahun. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengartikan APBD sebagai rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi salah satu dari landasan hukum dari penyusunan APBD. Selain itu yang menjadi landasan hukum dari penyusunan APBD adalah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

APBD disusun sebagai pedoman pendapatan dan belanja untuk melaksanakan kegiatan pemerintah daerah. Sehingga dengan adanya APBD, pemerintah daerah sudah memiliki gambaran yang jelas tentang apa saja yang akan diterima sebagai pendapatan dan pengeluaran apa saja yang harus dikeluarkan, selama satu tahun. Dengan adanya APBD sebagai pedoman, kesalahan, pemborosan, dan penyelewengan yang merugikan dapat dihindari. Dengan demikian tujuan penyusunan APBD adalah

- a. membantu pemerintah daerah mencapai tujuan fiskal dan meningkatkan koordinasi antarbagian di lingkungan pemerintah daerah;
- b. membantu menciptakan efisiensi dan keadilan untuk menyediakan barang dan jasa publik melalui proses pemrioritasan;
- c. memungkinkan pemerintah daerah untuk memenuhi prioritas belanja;
- d. meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada DPRD dan masyarakat luas.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, pasal 66, APBD memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Fungsi Otorisasi
Fungsi otorisasi berarti APBD menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
- b. Fungsi Perencanaan
Fungsi perencanaan berarti APBD menjadi pedoman bagi pemerintah daerah untuk merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
- c. Fungsi Pengawasan
Fungsi pengawasan berarti APBD menjadi pedoman untuk menilai (mengawasi) apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah telah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- d. Fungsi Alokasi
Fungsi alokasi berarti APBD dalam pembagiannya harus diarahkan dengan tujuan untuk mengurangi pengangguran, pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
- e. Fungsi Distribusi
Fungsi distribusi berarti APBD dalam pendistribusiannya harus memerhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Selain fungsi-fungsi tersebut, APBD sebagai anggaran sektor publik juga memiliki fungsi sebagai:

- a. alat kebijakan fiskal, artinya APBD digunakan sebagai alat untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi, serta mengetahui arah kebijakan fiskal pemerintah sehingga dapat memprediksi kondisi ekonomi;
- b. alat koordinasi dan komunikasi antarbagian dalam pemerintah sebab proses penyusunan anggaran melibatkan setiap unit kerja pemerintah;
- c. alat penilaian kinerja dari eksekutif sebagai budget holder oleh legislatif pemberi wewenang, kinerja eksekutif dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran dan efisiensi anggaran;
- d. alat motivasi untuk bekerja dengan efektif dan efisien untuk mencapai target dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan, target anggaran hendaknya tidak terlalu tinggi sehingga tidak dapat dipenuhi dan tidak terlalu rendah sehingga terlalu mudah untuk dicapai;
- e. alat politik menjadi dokumen politik sebagai bentuk komitmen eksekutif dan kesepakatan legislatif atas penggunaan dana publik,
- f. alat menciptakan ruang publik baik masyarakat, LSM, perguruan tinggi, dan berbagai organisasi kemasyarakatan lainnya yang memungkinkan untuk terlibat di proses penganggaran.

Cara Penyusunan APBD serta Pelaksanaan, Pengawasan dan Pertanggungjawaban APBD dijelaskan sebagai berikut.

a. Cara Penyusunan APBD

Ada beberapa tahapan dari penyusunan APBD. Pertama, pemerintah daerah menyusun RAPBD (Rancangan APBD). RAPBD disusun pemerintah daerah atas dasar usulan dari setiap perangkat belanja administrasi dan umum daerah yang diusulkan dalam bentuk RASK (Rencana Anggaran Satuan Kerja). Selanjutnya Pemerintah daerah mengajukan RAPBD kepada DPRD untuk dibahas. Sebelum membahas RAPBD, DPRD menyosialisasikan RAPBD kepada masyarakat untuk mendapat masukan. Masukan tersebut dicatat dan akan dibukukan sebagai lampiran. DPRD membahas RAPBD bersama dengan Tim Anggaran Eksekutif. RAPBD yang telah disetujui DPRD disahkan menjadi APBD untuk dilaksanakan.

b. Pelaksanaan, Pengawasan dan Pertanggungjawaban APBD

Berikut ini adalah penjelasan tentang pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban APBD.

(a) Pelaksanaan APBD

Berdasarkan APBD yang sudah disahkan, Kepala Daerah menetapkan RASK (Rencana Anggaran Satuan Kerja) menjadi DASK (Daftar Anggaran Satuan Kerja). DASK yang memuat pendapatan dan belanja setiap perangkat daerah inilah yang akan digunakan sebagai dasar pelaksanaan semua pengguna anggaran.

(b) Pengawasan APBD

Agar tidak terjadi penyimpangan, pelaksanaan APBD harus diawasi. Lembaga yang bertugas mengawasi pelaksanaan APBD adalah DPRD dan pejabat internal yang diangkat oleh kepala daerah.

(c) Pertanggungjawaban APBD

Ada dua macam laporan pertanggungjawaban APBD yang dilakukan Kepala Daerah. Yaitu laporan pelaksanaan APBD Triwulanan yang disampaikan setiap tiga bulan sekali, dan laporan pelaksanaan APBD Tahunan, yang disampaikan setiap akhir tahun.

Sumber-Sumber Pendapatan Daerah dan Jenis-Jenis Pembelanjaan Daerah terdiri dari beberapa rincian sebagai berikut.

a. Sumber-Sumber Pendapatan Daerah yang terdiri dari

(a) Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai pendapatan asli yang diperoleh dari daerah tersebut, meliputi: (1) pajak daerah; (2) retribusi daerah; (3)

hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan (4) lain-lain PAD yang sah seperti: pendapatan bunga, jasa giro, komisi dan potongan.

- (b) Dana Perimbangan adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari APBN, meliputi: (1) dana Bagi Hasil, yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu dari pajak dan SDA (Sumber Daya Alam) untuk mendanai kebutuhan daerah; (2) Dana Alokasi Umum, yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah; (3) Dana Alokasi Khusus, yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus daerah yang sesuai dengan prioritas nasional.
 - (c) Lain-Lain Pendapatan Lain-lain pendapatan terdiri dari: (1) Hibah, yaitu bantuan yang tidak mengikat dari pihak lain; dan (2) Dana darurat, yaitu dana dari APBN yang diberikan kepada daerah untuk keperluan mendesak, seperti bencana alam atau peristiwa luar biasa lainnya.
- b. Jenis-Jenis Pembelanjaan Daerah terdiri dari :
- (a) Belanja Aparatur Daerah, yang meliputi: (1) Belanja Administrasi Umum; (2) Belanja Operasi dan Pemeliharaan; dan (3) Belanja Modal
 - (b) Belanja Pelayanan Publik, yang meliputi: (1) Belanja Administrasi Umum; (2) Belanja Operasi dan Pemeliharaan; (3) Belanja Modal
 - (c) Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan
 - (d) Belanja Tidak Tersangka

Seperti APBN, keberadaan APBD juga berpengaruh besar terhadap perekonomian. Misalnya, di era otonomi daerah, setiap pemerintah daerah di Indonesia pernah berkompetisi meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) dengan menciptakan atau menaikkan berbagai pungutan (pajak, retribusi, dan lain-lain) yang berakibat terjadi high cost economy (ekonomi biaya tinggi). Ekonomi biaya tinggi sangat merugikan sektor perekonomian karena dapat menaikkan harga barang dan jasa. Kenaikan harga, menjadikan barang dan jasa Indonesia tidak dapat bersaing dengan barang dan jasa dari luar negeri.

Untuk mengantisipasi kenaikan harga barang, akhirnya pemerintah merevisi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah yang pada pasal 7 melarang pemerintah daerah untuk: menetapkan peraturan

daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan peraturan daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, serta kegiatan ekspor dan impor. Uraian tersebut hanyalah satu contoh bahwa APBD memiliki dampak terhadap perekonomian. Selengkapnya, dampak (pengaruh) APBD terhadap perekonomian adalah sebagai berikut:

- a. APBD mampu memberikan pedoman bagi kegiatan pembangunan ekonomi di daerah. Dengan adanya APBD, pemerintah daerah memiliki pedoman yang jelas untuk melaksanakan pembangunan ekonomi sehingga semua kegiatan dapat terarah dan perekonomian daerah diharapkan dapat meningkat.
- b. APBD dapat digunakan sebagai alat perbaikan perekonomian. Jika daerah mengalami gejala ekonomi yang buruk, misalnya mengalami ekonomi biaya tinggi, APBD dapat digunakan sebagai alat untuk memperbaiki perekonomian. Caranya, pada penyusunan APBD tahun berikutnya, pemerintah daerah harus mengurangi atau bahkan menghapuskan beberapa pungutan yang memberatkan.
- c. APBD dapat memengaruhi perubahan harga di daerah, misalnya: untuk meningkatkan PAD, pemerintah daerah menaikkan tarif beberapa pungutan, seperti tarif pendaftaran rumah sakit, tarif pengujian kendaraan bermotor, pajak hotel, pajak hiburan dan pajak batu bara. Semua kenaikan tarif tersebut tentu akan berpengaruh terhadap harga barang dan jasa. Meski demikian kenaikan-kenaikan tersebut diupayakan agar tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- d. APBD mampu memengaruhi tingkat produktivitas perusahaan. Apabila pemerintah daerah menetapkan peraturan yang menghambat lalu lintas barang dan jasa antar daerah, hal itu akan memengaruhi produktivitas perusahaan-perusahaan tertentu, seperti perusahaan yang menjual produknya ke daerah lain atau perusahaan yang mendatangkan bahan bakunya dari daerah lain.
- e. APBD dapat memengaruhi tingkat pemerataan distribusi pendapatan. Misalnya, di Kalimantan banyak sekali pengusaha batu bara yang telah membuat kaya para pelakunya. APBD mungkin menganggarkan pajak batu bara agar kekayaan mereka tidak bertumpuk dan menimbulkan kecemburuan sosial serta menciptakan ketimpangan distribusi pendapatan. Pajak yang dikenakan pada pengusaha batu bara akan digunakan pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat banyak. Dengan demikian, distribusi pendapatan di masyarakat diharapkan lebih merata.

5.4 Kebijakan Fiskal

Pemerintah memiliki peran yang sangat menentukan untuk mengendalikan perekonomian nasional untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Untuk mengatur kegiatan perekonomian nasional, pemerintah menggunakan berbagai perangkat kebijakan. Salah satu perangkat kebijakan tersebut adalah kebijakan fiskal, yang dikenal pula dengan kebijakan anggaran karena berkaitan dengan pengaturan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah kadang perlu mengubah pengeluaran dan penerimaan dalam APBN untuk menyesuaikan dengan kondisi pada waktu itu. Kebijakan yang dilakukan dengan cara mengubah pengeluaran dan penerimaan negara yang bertujuan untuk menciptakan stabilitas ekonomi, kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi, serta keadilan dalam distribusi pendapatan kita kenal dengan kebijakan fiskal.

Secara umum, tujuan yang ingin dicapai melalui kebijakan fiskal adalah kestabilan ekonomi yang lebih mantap, artinya tetap mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi yang layak tanpa adanya pengangguran yang berarti, dan terjaganya (kestabilan) harga-harga umum.

Pencegahan timbulnya pengangguran merupakan tujuan yang paling utama dari kebijakan fiskal. Hal ini karena suatu perekonomian dapat mencapai laju pertumbuhan yang dikehendaki melalui tingkat penggunaan tenaga kerja penuh (full employment). Full employment dapat diartikan sebagai suatu keadaan yang menunjukkan seluruh angkatan kerja mendapat pekerjaan. Kondisi ini dapat terwujud bila pemerintah mampu menambah lapangan kerja sehingga dapat menampung seluruh tenaga kerja. Kebijakan yang dilakukan pemerintah, dalam hal ini, antara lain, dengan mengundang investor asing untuk berinvestasi di Indonesia. Dari dalam negeri, pemerintah penambah pengeluaran untuk membuka lapangan kerja padat karya melalui proyek-proyek pembangunan fisik; di bidang moneter pemerintah mempermudah kredit usaha.

Penurunan yang tajam dari dalam harga-harga umum (deflasi) jelas akan mendorong timbulnya pengangguran karena sektor usaha swasta akan kehilangan harapan untuk mendapat keuntungan. Demikian pula sebaliknya, harga-harga umum yang meningkat terus (inflasi) juga mempunyai akibat yang tidak baik bagi perekonomian. Karena penghasilan yang diterima oleh masyarakat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang harganya terus naik.

Inflasi yang berkepanjangan akan melemahkan perekonomian karena para pemilik modal akan beralih dari investasi produktif ke investasi dalam bentuk barang-barang tahan lama seperti rumah, tanah, dan gedung karena hal ini lebih

menguntungkan daripada investasi produktif. Untuk mengatasi kondisi deflasi maupun inflasi, kebijakan fiskal dilaksanakan melalui kebijakan berikut ini.

a. Mengubah Pengeluaran Pemerintah

Dalam kondisi inflasi, uang yang beredar melebihi dari yang diperlukan dalam perekonomian. Untuk itu pemerintah mengurangi pengeluaran sehingga mengakibatkan tabungan (pendapatan lebih besar daripada pengeluaran).

b. Mengubah Tingkat Pajak

Menaikkan tarif pajak pendapatan masyarakat sehingga mengakibatkan turunnya tingkat konsumsi masyarakat.

c. Pinjaman Paksa

Pemerintah memotong gaji pegawai negeri sebagai pinjaman pemerintah untuk mengurangi jumlah uang yang beredar.

Bila ditinjau dari macamnya, kebijakan fiskal ada empat macam, yaitu sebagai berikut.

1. Kebijakan Anggaran Pembiayaan Fungsional (Functional Finance)

Dalam hal ini pengeluaran dan penerimaan pemerintah ditentukan dengan melihat akibat-akibat tidak langsung terhadap pendapatan nasional terutama guna meningkatkan kesempatan kerja (employment). Misalnya kebijakan perpajakan. Di satu pihak pajak berfungsi sebagai sumber penerimaan pemerintah, di lain pihak pajak dipakai untuk mengatur pengeluaran swasta maupun individu sehingga dalam kondisi banyaknya pengangguran, pajak sama sekali tidak diperlukan. Lalu, kebijakan apa yang dipakai? Melakukan pinjaman yang dipakai sebagai alat untuk menekan inflasi lewat pengurangan dana yang tersedia di masyarakat.

2. Kebijakan Pengelolaan Anggaran (The Managed Budget Approach)

Pada pendekatan ini pengeluaran pemerintah, perpajakan dan pinjaman senantiasa dihubungkan. Hubungan langsung antara pengeluaran pemerintah dan perpajakan selalu dibuat guna memperkecil ketidakstabilan ekonomi sehingga pada suatu saat dapat terjadi defisit maupun surplus. Kebijakan anggaran defisit adalah pengaturan pengeluaran negara lebih besar daripada penerimaan negara. Kebijakan ini biasa diterapkan dalam keadaan deflasi, yaitu suatu keadaan yang menunjukkan jumlah barang-barang dan jasa berkembang lebih cepat daripada perkembangan jumlah uang. Dalam keadaan deflasi harga-harga menjadi turun, perdagangan menjadi lesu, akibatnya uang sukar diperoleh, daya beli masyarakat berkurang, produksi menurun, dan pengangguran meluas. Sedangkan kebijakan anggaran surplus adalah

pengaturan pengeluaran negara lebih kecil daripada penerimaan. Kebijakan ini biasa diterapkan dalam keadaan inflasi, yaitu suatu keadaan jumlah uang yang beredar berkembang lebih cepat daripada perkembangan jumlah barang dan jasa. Dalam kondisi inflasi ini harga-harga naik secara menyeluruh akibatnya nilai uang menjadi turun, upah riil menurun.

3. Kebijakan Stabilitas Anggaran Otomatis (The Stabilizing Budget)

Dengan kebijakan stabilitas anggaran otomatis, pengeluaran pemerintah akan ditentukan berdasarkan atas perkiraan manfaat dan biaya relatif dari berbagai macam program dan pajak akan ditentukan sehingga menimbulkan surplus dalam periode kesempatan kerja penuh.

Apabila terjadi deflasi, program pengeluaran pemerintah tidak akan diubah, namun penerimaan dari pajak akan diturunkan terutama dari pajak pendapatan. Oleh karena itu, akan terjadi keadaan pengeluaran lebih besar daripada penerimaan (defisit dalam anggaran belanja) dan hal ini akan mendorong perkembangan sektor swasta kembali bergairah sampai tercapainya kesempatan kerja penuh. Sebaliknya, dalam masa inflasi ada kenaikan dalam penerimaan pemerintah yang berasal dari pajak pendapatan dan tidak perlu banyak tunjangan pengangguran sehingga akan ada surplus anggaran belanja.

4. Kebijakan Anggaran Belanja Berimbang (Balanced Budget Approach)

Kebijakan anggaran belanja seimbang adalah pembelanjaan secara seimbang dalam jangka panjang, namun ditempuh defisit pada masa depresi dan surplus pada masa inflasi. Dapat pula ditempuh melalui pendekatan dengan mempertahankan keseimbangan anggaran. Dalam masa depresi, pengeluaran perlu ditingkatkan, diikuti pula dengan peningkatan penerimaan sehingga tidak akan memperbesar utang negara.

Kebijakan fiskal yang dijalankan dengan hati-hati dapat mempercepat proses pembangunan. Adapun usaha-usaha yang dapat dilakukan, antara lain sebagai berikut.

- a. Kebijakan fiskal harus dijalankan dengan lebih konservatif atau hati-hati, yaitu selalu menjaga pengeluaran dan penerimaan dalam keadaan seimbang dan menghindari pengeluaran yang berlebihan.
- b. Kebijakan fiskal dapat dipergunakan untuk memengaruhi sumber daya ekonomi melalui dua cara.
 - (a) Pembelanjaan pemerintah di satu sektor akan dapat menggalakkan penanaman modal di sektor tersebut, sedangkan pajak yang tertinggi yang

dikenakan pada satu sektor akan menurunkan gairah perusahaan untuk memperluas usahanya.

- (b) Pemberian rangsangan fiskal kepada pengusaha tertentu, misalnya pemberian modal dengan syarat yang ringan, pembebasan sementara pajak, pengurangan atau pembebasan pajak impor modal dan bahan baku.
- c. Kebijakan fiskal dapat memacu pembentukan modal yang dibutuhkan dalam pembangunan.

Ada hubungan dari kebijakan fiskal Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Hal ini berpedoman pada tiga asas desentralisasi (dekonsentrasi, desentralisasi, dan tugas perbantuan), pengaturan hubungan fiskal (keuangan) antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah didasarkan atas empat prinsip.

1. Urusan yang merupakan tugas pemerintah pusat di daerah dalam rangka dekonsentrasi dibiayai dari dan atas beban APBN.
2. Urusan yang merupakan tugas pemerintah daerah sendiri dalam rangka desentralisasi dibiayai dari dan atas beban APBD.
3. Urusan yang merupakan tugas pemerintah pusat atau pemerintah daerah tingkat atasnya, yang dilaksanakan dalam rangka tugas perbantuan, dibiayai oleh pemerintah pusat atas beban APBN atau oleh pemerintah daerah tingkat atasnya atas beban APBD sebagai pihak yang menugaskan.
4. Sepanjang potensi sumber-sumber keuangan daerah belum mencukupi, pemerintah pusat memberikan sejumlah sumbangan.

Pada kenyataannya, hubungan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah masih ditandai oleh tingginya kontrol pemerintah pusat terhadap proses pembangunan daerah atau terjadi ketergantungan fiskal. Hal ini tercermin dari (a) rendahnya proporsi pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan daerah dibandingkan dengan besarnya subsidi yang diberikan oleh pemerintah pusat; dan (b) dominannya subsidi dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Adapun penyebab terjadinya ketergantungan fiskal, antara lain: (a) kurang berperannya perusahaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah; (b) tingginya derajat sentralisasi dalam bidang perpajakan. Semua pajak utama yang paling produktif, dari pajak langsung maupun tidak langsung ditarik oleh pemerintah pusat; (c) pajak daerah yang cukup beragam hanya sedikit yang dapat diandalkan sebagai sumber penerimaan; (d) adanya kekhawatiran bila daerah memiliki sumber keuangan yang tinggi, hal itu akan mendorong terjadinya disintegrasi dan separatisme; (e) kelemahan dalam pemberian subsidi dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Ada hubungan antara kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Kebijakan moneter pada dasarnya merupakan suatu kebijakan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan internal (pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, pemerataan pembangunan) dan keseimbangan eksternal (keseimbangan neraca pembayaran) serta tercapainya tujuan ekonomi makro, yaitu menjaga stabilisasi ekonomi yang dapat diukur dengan kesempatan kerja, kestabilan harga serta neraca pembayaran internasional yang seimbang. Apabila kestabilan dalam kegiatan perekonomian terganggu maka kebijakan moneter dapat dipakai untuk memulihkan (tindakan stabilisasi). Pengaruh kebijakan moneter pertama kali akan dirasakan oleh sektor perbankan, yang kemudian ditransfer pada sektor riil.

Kebijakan pemerintah untuk mengurangi ketidakstabilan ekonomi pada mulanya hanya menggunakan kebijakan moneter. Misalnya, dengan memperketat atau memperlonggar jumlah kredit (*tight/easy money policy*) yang diberikan oleh bank-bank umum, mengubah tingkat suku bank (politik diskonto), dan operasi pasar terbuka (membeli atau menjual surat-surat berharga). Dalam kondisi inflasi, pemerintah melakukan kebijakan moneter yang bersifat mengurangi jumlah uang beredar dengan melakukan kebijakan pasar terbuka seperti dengan menjual Sertifikat Bank Indonesia (SBI) atau obligasi negara, menaikkan suku bunga (politik diskonto), menaikkan cadangan kas minimum bank umum, kebijakan kredit selektif, pemotongan nilai mata uang dalam negeri (*sanering*), memusnahkan uang lama, membatasi pencetakan uang baru. Sedangkan dalam keadaan depresi, pemerintah melalui Bank Sentral menambah jumlah uang beredar dengan membeli SBI atau obligasi negara, menekan tingkat suku bunga bank, dan melonggarkan jumlah kredit bank. Dengan demikian maka investasi dalam perekonomian diharapkan akan terus meningkat dan depresi akan teratasi, meski kebijakan moneter saja kadang tidak dapat mengatasi depresi karena tingkat suku bunga yang sudah begitu rendah ternyata tidak dapat mendorong timbulnya investasi karena orang lebih senang menyimpan uang tunai.

Dengan adanya kelemahan kebijakan moneter tersebut maka kebijakan fiskal sangat berperan. Kebijakan fiskal tidak dapat dijalankan secara serta merta (bersifat kaku/kurang fleksibel) karena harus dilakukan melalui serangkaian birokrasi (misalnya perubahan APBN pada pertengahan tahun anggaran) dan pada umumnya kebijakan moneter lebih dapat diterima masyarakat daripada kebijakan fiskal. Untuk itu, kombinasi antara keduanya sangat diperlukan untuk menanggulangi inflasi atau deflasi, misalnya dengan politik harga, pengawasan harga, penjatahan, dan sebagainya.

IKHTISAR

1. Penerapan dan manajemen keuangan negara merupakan penempatan pembelanjaan dan pendapatan yang dilakukan oleh rumah tangga negara untuk melaksanakan tugasnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Rincian pengeluaran dan pendapatan pemerintah setiap tahun disusun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sehingga diketahui kinerja pemerintah di kegiatan perekonomian nasional.
3. APBD dapat diartikan sebagai suatu daftar yang memuat perincian sumber-sumber pendapatan daerah dan macam-macam pengeluaran daerah dalam waktu satu tahun. APBD disusun sebagai pedoman pendapatan dan belanja untuk melaksanakan kegiatan pemerintah daerah
4. Kebijakan fiskal adalah kebijakan anggaran yang berkaitan dengan pengaturan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kebijakan yang dilakukan dengan cara mengubah pengeluaran dan penerimaan negara yang bertujuan untuk menciptakan stabilitas ekonomi, kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi, serta keadilan dalam distribusi pendapatan kita kenal dengan kebijakan fiskal.

BAB 6

PASAR MODAL

KOMPETENSI DASAR

Mendeskripsikan kebijakan - kebijakan yang dikeluarkan pemerintah di bidang ekonomi.

INDIKATOR

1. Mahasiswa menyebutkan definisi pasar modal
2. Mahasiswa menyebutkan bentuk pasar modal
3. Mahasiswa menyebutkan para pelaku dan lembaga yang terlibat di pasar modal
4. Mahasiswa menjelaskan manfaat dari pasar modal dan beragam produknya
5. Mahasiswa menjelaskan mekanisme kerja dari pasar modal

Pasar modal dipandang sebagai salah satu sarana efektif untuk mempercepat pembangunan suatu negara karena pasar modal sebagai wadah untuk mengumpulkan dana jangka panjang dari masyarakat untuk disalurkan ke sektor-sektor produktif. Bila pengaliran dana masyarakat melalui lembaga-lembaga keuangan atau pasar modal telah berjalan baik, dana pembangunan yang bersumber dari luar negeri semakin lama semakin dikurangi. Perusahaan yang telah go public atau menjual sahamnya kepada masyarakat luas melalui bursa efek karena mereka membutuhkan tambahan modal di satu sisi, dan banyaknya penyandang dana yang menyadari peluang memperoleh keuntungan dengan berjual beli efek di pasar bursa di sisi yang lain. Pasar modal merupakan alternatif sumber dana bagi perusahaan swasta, BUMN, maupun perusahaan daerah. Hal tersebut, mengisi peranan perbankan untuk menarik dana serta mengalokasikannya, terkait dengan kebutuhan dari perusahaan itu sendiri.

6.1 Pengertian Pasar Modal

Secara umum pasar terjadi karena bertemunya transaksi jual dan beli. Pasar output terjadi karena bertemunya transaksi menjual dan membeli output, pasar uang terjadi karena bertemunya transaksi menjual dan membeli uang, dan pasar input terjadi karena bertemunya transaksi menjual dan membeli input. Sama seperti pasar-pasar yang lain, pasar modal juga terjadi karena bertemunya transaksi menjual dan membeli modal. Untuk menyebut modal sering juga menggunakan istilah efek, securities, atau stock. Secara fisik, pasar modal disebut dengan bursa efek. Di Indonesia, ada dua bursa efek yang beroperasi yaitu Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan Bursa Efek Surabaya (BES).

Pasar modal adalah wahana untuk mempertemukan pihak-pihak yang memerlukan dana jangka panjang dengan pihak yang memiliki dana tersebut. Dengan demikian pasar Modal adalah pasar yang menampung kegiatan yang berhubungan dengan perdagangan modal, seperti obligasi dan efek. Pasar modal berfungsi menghubungkan investor, perusahaan dan institusi pemerintah melalui perdagangan instrumen keuangan jangka panjang.

Di pasar modal, penjual dan pembeli modal bertemu untuk melakukan transaksi. Penjual di pasar modal merupakan perusahaan yang memerlukan modal atau tambahan modal untuk mengembangkan usahanya. Untuk memperoleh modal tersebut, mereka berusaha menjual efek di pasar modal. Pembeli di pasar modal adalah individu atau organisasi yang bersedia menyisihkan kelebihan dananya untuk membeli efek yang dikeluarkan perusahaan yang menurut mereka menguntungkan.

Untuk memperlancar transaksi jual beli modal, bursa efek memiliki banyak peran terutama yang terkait dengan tersedianya sarana perdagangan efek (saham, obligasi, dan surat berharga lainnya) seperti aturan main di kegiatan bursa efek dan informasi lengkap mengenai bursa efek. Selain itu, bursa efek juga berperan untuk mencegah praktik-praktik yang dilarang di bursa efek seperti kolusi dan sebagainya dan tentu saja bursa efek selalu mengupayakan instrumen pasar modal serta menciptakan instrumen dan jasa baru.

6.2 Bentuk Pasar Modal

Ada dua bentuk pasar yang dikenal di pasar modal, yaitu pasar perdana dan pasar sekunder.

1. Pasar Perdana (Primer)

Pasar perdana merupakan penawaran efek oleh emiten setelah izin emisi keluar sampai dengan pencatatan di bursa. Di pasar perdana terjadi interaksi

permintaan dan penawaran surat berharga yang baru diterbitkan secara langsung antara emiten dan investor tanpa melalui pasar modal. Penawaran efek dari emiten kepada pemodal berlangsung dalam masa tertentu dan efek tersebut belum dicatatkan di bursa. Di pasar perdana, emiten melakukan kegiatan penawaran yang disebut penawaran umum perdana (initial public offering atau IPO). Karakteristik pasar perdana adalah:

- a. hanya untuk pembelian saham;
- b. harga saham tetap;
- c. jangka waktu terbatas;
- d. tidak dikenakan komisi;
- e. pemesanan dilakukan melalui agen penjual;
- f. uang hasil penjualan menjadi milik emiten.

Istilah go public merupakan penawaran surat berharga (saham dan obligasi) kepada masyarakat umum untuk pertama kalinya. Go public adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran efek (surat berharga) yang dilakukan oleh emiten kepada publik (minimal 100 pihak) untuk menjual efek kepada umum/publik (minimal 50 pihak) berdasarkan tata cara yang diatur oleh Undang-Undang. Efek dijual dengan harga emisi (penawaran efek yang dilakukan oleh emiten untuk diperdagangkan) sehingga perusahaan yang menerbitkan emisi hanya memperoleh dana dari penjualan tersebut.

2. Pasar Sekunder

Pasar sekunder dimulai setelah berakhirnya masa pencatatan di bursa perdana. Dalam pasar sekunder perdagangan efek terjadi antara pemegang saham dengan calon pemegang saham. Uang yang berputar di pasar sekunder tidak lagi masuk ke perusahaan yang menerbitkan efek, tetapi berpindah tangan dari satu pemegang saham ke pemegang saham berikutnya. Tidak semua efek dapat diperjualbelikan di bursa efek. Hanya efek yang memenuhi syarat listing (pertama didaftarkan) saja yang dapat diperjualbelikan di bursa efek. Efek yang tidak memenuhi syarat listing hanya dapat dijual di luar bursa efek. Di pasar sekunder terjadi interaksi permintaan dan penawaran surat berharga (efek) yang telah beredar di pasar secara terus-menerus di pasar modal dan harga dibiarkan berfluktuasi sesuai dengan mekanisme pasar. Pasar sekunder adalah pasar tempat sekuritas yang diperdagangkan di pasar primer diperjualbelikan kembali. Transaksi di pasar sekunder berlangsung beberapa saat setelah transaksi di pasar primer selesai dilakukan. Karakteristik pasar sekunder adalah:

- a. harga berfluktuasi sesuai dengan mekanisme pasar;
- b. jangka waktu tidak terbatas;

- c. dikenakan komisi;
 - d. pemesanan dilakukan melalui anggota bursa;
 - e. digunakan untuk pembelian dan penjualan saham;
 - f. uang hasil penjualan menjadi milik pihak penjual atau pemilik sekuritas.
- Sebelum dapat melakukan transaksi, investor harus menjadi nasabah di salah satu perusahaan efek. Perusahaan efek mewajibkan kepada nasabahnya untuk mendepositokan sejumlah uang tertentu sebagai jaminan bahwa nasabah tersebut layak melakukan transaksi saham. Dalam perdagangan saham, jumlah yang diperjualbelikan dilakukan dalam satuan perdagangan yang disebut lot. Satu lot senilai dengan 500 saham, yang merupakan batas minimal pembelian saham.

Tidak semua efek dapat dijualbelikan di bursa efek karena adanya persyaratan listing di bursa efek yang cukup berat dan ketat. Meskipun demikian efek yang tidak dapat dijualbelikan tersebut dapat diperdagangkan di pasar paralel. Bursa paralel diselenggarakan oleh Persatuan Perdagangan Uang dan Efek-efek (PPUE). Di Indonesia, pada awalnya bursa paralel berada di Jakarta (di bursa Efek Jakarta) namun sekarang bursa tersebut diambil alih oleh BES yang beroperasi di Surabaya. Perdagangan efek di pasar sekunder berlangsung secara reguler dan diselenggarakan oleh Bapepam. Pelaksanaannya dilakukan setiap hari kerja, mulai Senin sampai dengan Jumat dan berlangsung dalam dua sesi, yaitu: sesi pertama, pukul 10.00–12.00 WIB; dan sesi kedua, pukul 13.00–14.00 WIB (kecuali Jumat, sesi kedua tidak dilaksanakan). Pada pasar ini, sistem perdagangan efek terbagi menjadi dua bagian, yaitu sistem kol dan sistem terus-menerus. Sistem kol adalah sistem perdagangan yang dipimpin oleh petugas bursa yang disebut pemimpin kol. Efek yang diperdagangkan dalam sistem kol adalah efek yang kali pertama di catat di bursa dan dilakukan selama dua hari berturut-turut. Pada sistem terus-menerus, efek diperdagangkan oleh anggota bursa secara langsung tanpa melalui pemimpin kol, namun ada pejabat bursa yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan sistem ini. Pada sistem kol maupun sistem terus menerus, transaksi perdagangan efek dilakukan secara tunai yang jangka waktu penyelesaiannya dilakukan selambat-lambatnya empat hari terhitung sejak transaksi dilakukan. Secara umum terdapat beberapa kerugian pada pasar modal. Kerugian tersebut, antara lain berkaitan dengan adanya sejumlah risiko dari investasi atas sejumlah produk pasar modal, yaitu sebagai berikut.

- a. Risiko pasar (market risk) yang identik dengan risiko nilai tukar dan tingkat suku bunga, yaitu risiko yang timbul akibat adanya perubahan harga, tingkat suku bunga, nilai tukar yang terus berfluktuasi sesuai dengan konjungtur pasar.

- b. Risiko gagal bayar atau tagih (default risk), yaitu risiko yang timbul karena pembayaran yang harus dilakukan pada saat jatuh tempo tidak terpenuhi.
- c. Risiko penanaman kembali (reinvestment risk), yaitu risiko bagi investor karena terpaksa mengambil investasi yang memberi hasil lebih rendah akibat naiknya tingkat suku bunga.
- d. Risiko fundamental ekonomi (fundamental risk), yaitu risiko yang timbul akibat perubahan-perubahan kondisi perekonomian makro, domestik maupun internasional, moneter, fiskal dan kebijaksanaan pemerintah lainnya.

6.3 Para Pelaku Pasar Modal

Transaksi di pasar modal melibatkan penjual dan pembeli modal. Tanpa ada keduanya tidak mungkin ada transaksi seperti dalam definisi pasar modal yang telah disebutkan di bagian sebelumnya. Penjual dan pembeli di pasar modal biasa disebut pemain di pasar modal. Para pemain terdiri dari pemain utama dan lembaga penunjang yang bertugas melayani kebutuhan dan kelancaran pemain utama. Adapun para pemain utama dan lembaga penunjang yang terlibat langsung di proses transaksi pemain utama adalah:

1. E m i t e n

Emiten adalah perusahaan yang melakukan penjualan surat-efek kepada masyarakat atau melakukan emisi di bursa. Emiten yang melakukan emisi dapat memilih dua bentuk instrumen pasar modal apakah bersifat kepemilikan atau utang. Jika bersifat kepemilikan diterbitkan saham dan jika yang dipilih instrumen utang maka diterbitkan obligasi. Untuk melakukan emisi, emiten memiliki tujuan yang tertuang dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Tujuan melakukan emisi antara lain:

a. Memperoleh tambahan dana

Dana modal yang diperoleh dari investor akan digunakan untuk perluasan bidang usaha, perluasan pasar atau kapasitas produksi.

b. Melakukan pengalihan pemegang saham

Pengalihan ini dapat berbentuk pengalihan dari pemegang saham lama kepada pemegang saham yang baru. Pengalihan dapat pula untuk menyeimbangkan pemegang sahamnya.

c. Mengubah/memperbaiki komposisi modal

Tujuan ini dimaksudkan untuk menyeimbangkan antara modal sendiri dengan modal asing.

Contoh emiten misalnya: Reksadana (Investment Fund/ Mutual Fund) dan perusahaan-perusahaan yang go public.

2. Investor (Pemodal)

Investor/pemodal adalah pihak/badan atau perorangan yang membeli atau menanamkan modalnya di perusahaan yang melakukan emisi. Sebelum membeli efek yang ditawarkan, investor biasanya melakukan penelitian tentang bonafiditas dan prospek usaha emiten. Tujuan investor di pasar modal adalah:

- a. Memperoleh dividen karena tujuan investor hanyalah keuntungan yang akan diperolehnya berupa bunga yang akan dibayar emiten dalam bentuk bunga.
- b. Kepemilikan perusahaan karena semakin banyak saham yang dimiliki investor maka akan semakin besar kekuasaannya terhadap perusahaan.
- c. Berdagang karena tujuan investor adalah menjual kembali efek yang dimiliki pada saat harga tinggi, untuk memperoleh keuntungan dari jual beli efek yang dilakukan.

3. Lembaga Penunjang

Selain pemain utama, pemain lain di pasar modal adalah lembaga penunjang. Sesuai sebutannya fungsi lembaga penunjang antara lain turut mendukung beroperasinya pasar modal agar memudahkan emiten dan investor untuk melakukan kegiatan masing-masing. Lembaga penunjang tersebut antara lain:

- a. Penjamin Emisi (underwriter) merupakan lembaga yang menjamin terjualnya efek yang diterbitkan emiten sampai batas waktu tertentu. Penjaminan emisi dibagi menjadi:

- a) Full Commitment

Penjamin emisi mengambil seluruh resiko tidak terjualnya efek secara penuh sesuai dengan harga penawaran pasar (kesanggupan penuh).

- b) Best Effort Commitment

Penjamin emisi dituntut agar efek yang dikeluarkan semuanya laku dan bila tidak laku maka dikembalikan kepada emiten. Penjamin emisi tidak berkewajiban membeli saham yang tidak laku (kesanggupan terbaik).

- c) Standby Commitment

Bila efek yang dijual tidak laku maka penjamin emisi bersedia membeli dengan ketentuan biasanya harga yang dibeli di bawah harga penawaran untuk umum (kesanggupan siaga).

- d) All or None Commitment

Artinya transaksi resmi akan terjadi jika penjamin emisi dapat menjual semua efek yang ditawarkan, jika ada yang tidak laku maka semua transaksi yang dilakukan oleh penjamin emisi dan investor dibatalkan dan semua efek dikembalikan kepada emiten.

- b. Penanggung (Guarantor) merupakan lembaga penengah antara pemberi kepercayaan dan penerima kepercayaan. Lembaga penanggung biasanya dari lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank yang telah mendapat izin dari Menteri Keuangan untuk memberikan jaminan kepada pihak yang membutuhkan kepercayaan dan pihak yang memberikan kepercayaan. Sebelum membeli efek investor memerlukan jaminan bahwa perusahaan yang mengeluarkan efek akan bersedia membayar haknya pada masa yang akan datang. Jadi dalam hal ini penanggung merupakan lembaga yang dipercaya oleh investor sebelum menanamkan dananya.
- c. Wali Amanat (Trustee)

Wali Amanat merupakan lembaga yang bertindak sebagai wali si pemberi amanat. Pemberi amanat dalam hal ini adalah investor. Jadi wali amanat mewakili pihak investor dalam jual beli obligasi. Kegiatan yang dilakukan wali amanat antara lain menilai kekayaan emiten, menganalisis kemampuan emiten, melakukan pengawasan terhadap emiten, memberi nasihat kepada investor terkait dengan emitan, memonitor pembayaran bunga dan pokok obligasi, dan bertindak sebagai agen pembayaran.
- d. Perantara Perdagangan Efek (Broker, Pialang)

Pialang bertugas menjadi perantara dalam jual beli efek, yaitu perantara antara emiten dan investor. Pialang merupakan pihak yang melakukan jual beli efek namun risiko dan hak atas efek seluruhnya berada pada pihak investor. Pialang akan memperoleh balas jasa dari layanan yang ia berikan kepada investor.
- e. Pedagang Efek (Dealer)

Pedagang efek adalah pihak yang membeli efek atas namanya sendiri. Lembaga yang dapat bertindak sebagai pedagang efek antara lain pialang, lembaga keuangan bank, dan lembaga keuangan bukan bank.
- f. Perusahaan Surat Berharga (Securities Company)

Perusahaan surat berharga adalah perusahaan yang tercatat di bursa efek yang bergerak di bidang perdagangan efek dengan dukungan tenaga profesional seperti underwriter, broker, fund management.
- g. Perusahaan Pengelola Dana (Investment Company)

Perusahaan pengelola dana merupakan perusahaan yang kegiatannya mengelola surat-surat berharga yang akan menguntungkan sesuai keinginan investor. Perusahaan ini memiliki dua unit usaha, yaitu pengelola dana (fund management) dan penyimpanan dana (custodian). Custodian juga melakukan penagihan bunga dan dividen kepada emiten.

Cara perusahaan pengelola dana menarik pemodal dapat dilakukan melalui dana bersama (mutual fund), dan melalui penjualan saham.

h. Biro Administrasi Efek

Biro administrasi efek merupakan kantor yang membantu para emiten maupun investor untuk memperlancar administrasinya. Beberapa kegiatan yang sering dilakukan biro administrasi efek, antara lain adalah:

- a) Membantu emiten dan underwriter dalam rangka emisi.
- b) Penyimpanan dan pengalihan hak atas saham para investor.
- c) Menyusun daftar pemegang saham atas permintaan emiten.
- d) Menyiapkan korespondensi emiten kepada pemegang saham.
- e) Membuat laporan-laporan yang diperlukan.

6.4 Lembaga yang Terlibat di Pasar Modal

Di pasar modal sebenarnya ada banyak lembaga yang saling membutuhkan satu dengan lainnya. Lembaga-lembaga ini mengatur mekanisme kerja pasar modal agar dapat berjalan dengan baik dan lancar. Mereka terdiri dari lembaga pemerintah dan swasta yang memiliki peran sejak perusahaan hendak go public hingga berhasil go public. Lembaga-lembaga tersebut adalah:

1. Pengatur Pasar Modal

Lembaga yang bertindak sebagai pengatur pasar modal di Indonesia adalah Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) atas nama Departemen Keuangan. Bursa Efek Jakarta dikelola oleh BAPEPAM, Bursa Efek Surabaya dikelola oleh PT Bursa Efek Surabaya, dan Bursa Parallel dikelola oleh Persatuan Pedagang Uang dan Efek (PPUE).

2. Instansi Pemerintah

Lembaga-lembaga atau badan pemerintah ditugaskan dan diperbantukan untuk mendukung dan memperlancar proses perdagangan efek di pasar modal sejak rencana emisi hingga penjualan efeknya. Instansi pemerintah yang terlibat dalam mekanisme pasar modal adalah:

a. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

Setiap perusahaan yang akan menanamkan modal di Indonesia harus memperoleh izin dari BKPM terlebih dahulu. Izin tersebut memuat antara lain komposisi dan jumlah dana investasi, besarnya modal dasar perusahaan, batas waktu penyeteroran modal, dan komposisi pemegang saham.

b. Departemen Teknis

Pemberian izin usaha tergantung dari bidang usaha masing-masing. Izin setiap bidang usaha dikeluarkan oleh departemen yang membawahnya. Berikut departemen teknis untuk masing-masing bidang usaha antara lain:

- a) Departemen keuangan melalui Bank Indonesia untuk izin usaha bidang keuangan dan perbankan.
- b) Departemen perhubungan untuk izin usaha bidang pengangkutan.
- c) Departemen perindustrian dan perdagangan untuk izin usaha bidang perdagangan dan industri.
- d) Departemen pertanian untuk izin usaha bidang perkebunan dan peternakan.
- e) Departemen Kehakiman
Bagi perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas, sebelum didirikan, anggaran dasar perusahaannya terlebih dahulu harus disahkan oleh departemen kehakiman.

3. Lembaga Swasta

Ada beberapa lembaga swasta yang memegang peran penting untuk menunjang keberhasilan kegiatan di pasar modal. Lembaga swasta tersebut adalah:

a. Notaris

Rencana untuk menjual saham atau obligasi di pasar modal terlebih dahulu harus disetujui RUPS. Agar persetujuan tersebut sah diperlukan jasa notaris. Catatan-catatan yang perlu disahkan notaris antara lain berita acara RUPS, semua keputusan dalam RUPS, dan perubahan anggaran yang dilakukan.

b. Akuntan Publik

Akuntan publik dibutuhkan untuk melakukan penilaian dan menentukan kelayakan laporan keuangan seperti neraca, laporan rugi laba, dan laporan perubahan modal emiten. Setelah melalui beberapa penilaian, akuntan publik akan mengeluarkan pernyataan atau pendapat terhadap hasil penilaian yang telah dilakukan.

c. Konsultan Hukum

Konsultan hukum bertugas memberikan pernyataan tentang keabsahan dokumen yang diajukan seperti akte pendirian dan anggaran perusahaan, penyertaan modal oleh pemegang saham sebelum go publik, penilaian izin usaha, status kepemilikan dari aktiva perusahaan, perjanjian yang dibuat dengan pihak ketiga, dan kemungkinan gugatan atau tuntutan.

d. Badan Penilai (Appraiser)

Badan penilai bertugas menilai kewajaran nilai aktiva seperti tanah, gedung, mobil, dan aktiva lain sehingga seluruh nilai aktiva dapat diketahui dengan jelas dan benar.

e. Konsultan Efek (Investment Advisor)

Konsultan efek bertugas memberikan pendapat tentang keuangan dan manajemen emiten. Konsultan efek akan memberikan konsultasi tentang jenis dana yang diperlukan, pemilihan sumber dana yang diinginkan, dan struktur permodalan yang tepat.

6.5 Manfaat dari Keberadaan Pasar Modal

Manfaat dari pasar modal bagi masing-masing pihak adalah

1. Bagi emiten, pasar modal memberikan kemanfaatan dalam bentuk: perolehan dana yang lebih besar, adanya fleksibilitas pengelolaan dana bagi perusahaan, memperkecil ketergantungan modal pada pinjaman bank, kesesuaian besar kecilnya dividen yang dibagikan dengan besar kecilnya keuntungan perusahaan, dan ketidakharusan adanya kekayaan yang mesti dijamin.
2. Bagi investor, pasar modal memberikan kemanfaatan dalam bentuk: keuntungan (capital gain) jika ada kenaikan harga saham, dividen bagi pemegang saham dan bunga bagi pemegang obligasi, hak suara dalam RUPS, dan peluang berinvestasi di beberapa perusahaan secara bersama-sama.
3. Bagi pemerintah, pasar modal memberikan kemanfaatan dalam bentuk: hasrat investasi masyarakat yang lebih besar, pembangunan ekonomi yang lebih maju, kesempatan kerja yang lebih luas, dan kemampuan pasar modal sebagai salah satu indikator perkembangan ekonomi nasional.
4. Bagi lembaga penunjang pasar modal, pasar modal memberikan kemanfaatan dalam bentuk: pembentukan harga pada bursa paralel, dan likuiditas efek yang semakin tinggi.

6.6 Produk di Pasar Modal

Untuk melakukan transaksi di pasar selalu ada barang yang dijualbelikan. Begitu pula di pasar modal, barang yang dijualbelikan dikenal dengan istilah instrumen pasar modal. Instrumen pasar modal yang bersifat kepemilikan (saham) maupun hutang (obligasi) dapat diperjualbelikan kembali oleh pemiliknya. Upaya berinvestasi di pasar modal dapat menjaga nilai kekayaan (uang) tidak tergerus oleh inflasi. Dengan Menanamkan investasi di pasar modal, uang yang dimiliki dapat berpotensi untuk berkembang dan memperoleh keuntungan lebih banyak dibandingkan lembaga keuangan lain. Ada beberapa jenis instrumen pasar modal di pasar modal antara lain adalah saham, obligasi, dan surat pernyataan utang lainnya seperti option, warrant, dan right.

1. Saham

Saham merupakan surat berharga yang bersifat kepemilikan dalam arti pemilik saham sebagai pemilik perusahaan. Keuntungan yang diperoleh dari saham disebut dividen yang pembagiannya ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Saham dapat digolongkan ke dalam dua jenis yaitu:

a. Berdasarkan Cara Pengalihannya, saham dibedakan menjadi:

a) Saham atas tunjuk (bearer stocks)

Merupakan saham yang tidak mempunyai nama (nama pemilik tidak tercantum pada saham) sehingga mudah dijual kepada pihak lain.

b) Saham atas nama (registered stocks)

Merupakan saham yang mencantumkan nama pemiliknya. Untuk dialihkan kepada pihak lain diperlukan syarat dan prosedur tertentu.

b. Berdasarkan Hak Tagihnya, saham dibedakan menjadi:

a) Saham biasa (common stock)

Saham biasa adalah tanda penyertaan modal pada suatu perusahaan (Perseroan Terbatas). Keuntungan investor dalam pembelian saham dapat berupa:

(a) Dividen yaitu bagian dari keuntungan yang dibagikan kepada pemilik saham.

(b) Capital gain yaitu keuntungan yang diperoleh dari selisih positif harga beli dan harga jual saham.

b) Saham istimewa (preferred stock)

Saham istimewa merupakan saham yang memberikan prioritas pilihan kepada pemegangnya antara lain sebagai berikut.

(a) Saham istimewa mempunyai hak terlebih dahulu dalam hal menerima dividen.

(b) Dalam hak likuidasi berhak menerima pembayaran maksimum sebesar nilai nominal saham istimewa setelah semua kewajiban perusahaan dilunasi.

(c) Pemegang saham istimewa memperoleh penghasilan dalam jumlah yang tetap.

(d) Saham istimewa yang diterbitkan mempunyai jangka waktu yang tidak terbatas, akan tetapi perusahaan mempunyai hak untuk membeli kembali saham istimewa tersebut dengan harga tertentu.

(e) Pemegang saham istimewa tidak mempunyai suara dalam RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham).

Aktivitas pasar modal saat ini tidak terlepas dari apa yang disebut dengan indeks harga saham. Indeks harga saham adalah suatu angka yang digunakan untuk membandingkan perubahan yang terjadi pada harga suatu saham. Indeks harga saham menjadi indikator untuk mengetahui pergerakan kegiatan ekonomi, baik sedang mengalami kenaikan atau penurunan. Banyak orang akan melihat pergerakan itu dari sisi indeks yang dicapai pada saat itu juga tetapi indeks harga saham masih kurang akurat jika digunakan untuk mengukur kenaikan atau penurunan kegiatan ekonomi. Untuk itu, diperlukan adanya indikator-indikator lain yang mendukung dan saling melengkapi agar dapat menunjukkan pertumbuhan atau penurunan ekonomi yang sebenarnya. Indeks harga secara sederhana adalah suatu angka yang digunakan untuk membandingkan antara suatu peristiwa dan peristiwa lainnya atau merupakan suatu angka yang dibuat sedemikian rupa sehingga dapat dipergunakan untuk melakukan perbandingan antara kegiatan yang sama dalam dua waktu yang berbeda seperti produksi, ekspor, hasil penjualan, dan jumlah uang beredar.

Indeks harga saham, dapat dibedakan menjadi dua, yaitu indeks harga saham individual dan indeks harga saham gabungan. Indeks Harga Saham Individual (IHSI) menunjukkan perubahan dari suatu harga saham suatu perusahaan. Indeks ini tidak dapat mengukur harga dari suatu saham perusahaan tertentu apakah mengalami perubahan, kenaikan, atau penurunan. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menunjukkan pergerakan harga saham secara umum yang tercatat di bursa efek. Indeks inilah yang paling banyak digunakan dan dipakai sebagai acuan tentang perkembangan kegiatan di pasar modal.

Pergerakan angka indeks akan menunjukkan perubahan situasi pasar yang terjadi. Pasar yang sedang bergairah atau aktif, ditunjukkan dengan indeks harga saham yang mengalami kenaikan. Kondisi ini yang biasanya menunjukkan keadaan yang diinginkan. Saat keadaan stabil ditunjukkan dengan indeks harga saham yang tetap. Adapun saat pasar sedang lesu ditunjukkan dengan indeks harga saham yang mengalami penurunan. Keadaan pasar secara umum baru dapat diketahui jika kita mengetahui Indeks Harga Saham Gabungan.

2. Obligasi (Bonds)

Obligasi merupakan instrumen utang suatu perusahaan yang hendak memperoleh modal. Obligasi akan dibayar pada waktu jatuh tempo sebesar nilai nominalnya. Keuntungan membeli obligasi dinyatakan dalam bentuk bunga (kupon). Berbeda dengan saham kepemilikan, obligasi tidak disertai dengan hak terhadap manajemen dan kekayaan perusahaan. Perusahaan yang menerbitkan

obligasi hanya mengakui memiliki utang kepada pemegang obligasi sebesar nilai obligasi tersebut. Jenis-jenis obligasi dapat ditinjau berdasarkan:

- a. Berdasarkan dari cara peralihan, obligasi dibedakan menjadi:
 - a) Obligasi atas tunjuk (bearer bonds) adalah obligasi yang tidak mempunyai nama (nama pemilik tidak tercantum pada obligasi) sehingga mudah dijual kepada pihak lain.
 - b) Obligasi atas nama (registered bonds) adalah obligasi yang mencantumkan nama pemiliknya. Untuk dialihkan kepada pihak lain diperlukan syarat dan prosedur tertentu.
- b. Berdasarkan dari hak klaim, obligasi dibedakan menjadi:
 - a) Obligasi dengan jaminan (secured bonds) adalah obligasi dengan jaminan tertentu, misalnya obligasi dengan garansi (guaranteed bonds), obligasi dengan jaminan harta (mortgage bonds), obligasi dengan jaminan efek (collateral trust bonds), dan obligasi dengan jaminan peralatan (equipment bonds).
 - b) Obligasi tanpa jaminan (unsecured bonds) adalah obligasi yang diberikan atas dasar kepercayaan saja, misalnya debenture bonds yang diterbitkan oleh pemerintah.
- c. Berdasarkan dari cara penetapan dan pembayaran bunga dan pokok, obligasi dibedakan menjadi:
 - a) Obligasi dengan bunga tetap
Merupakan obligasi yang memberikan bunga secara tetap setiap periode tertentu misalnya 16% per tahun.
 - b) Obligasi dengan bunga tidak tetap
Merupakan obligasi yang memberikan bunga tidak tetap dan biasanya mengikuti suku bunga bank yang berlaku pada periode tertentu.
 - c) Obligasi tanpa bunga
Merupakan obligasi yang tidak memberikan bunga kepada pemegangnya. Keuntungan diperoleh dari selisih nilai pembelian dengan nilai saat jatuh tempo.
- d. Berdasarkan dari siapa yang menerbitkan, obligasi dibedakan menjadi:
 - a) Obligasi pemerintah
Obligasi pemerintah merupakan obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau perusahaan milik pemerintah.
 - b) Obligasi swasta
Obligasi swasta merupakan obligasi yang diterbitkan oleh pihak swasta.

- e. Berdasarkan dari saat jatuh tempo, obligasi dibedakan menjadi:
 - a) Obligasi jangka pendek
Merupakan obligasi yang berjangka waktu tidak lebih dari 1 tahun.
 - b) Obligasi jangka menengah
Merupakan obligasi yang memiliki jangka waktu antara 1 - 5 tahun.
 - c) Obligasi jangka panjang
Merupakan obligasi yang memiliki jangka waktu lebih dari 5 tahun.

3. Reksadana

Reksadana merupakan sertifikat yang menyatakan bahwa pemiliknya menitipkan sejumlah dana kepada perusahaan reksadana, untuk digunakan sebagai modal berinvestasi baik di pasar modal maupun di pasar uang. Reksa dana berasal dari kata "reksa" yang berarti menjaga atau memelihara, sedangkan "dana" berarti uang atau sekumpulan uang. Jadi, reksa dana berarti kumpulan uang yang dipelihara bersama untuk suatu kepentingan. Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1995, reksa dana adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Reksa dana dapat dikelompokkan menjadi empat kategori berdasarkan investasinya, yaitu reksa dana saham, obligasi, pasar uang, dan reksa dana campuran. Investor dapat memilih jenis reksa dana yang sesuai dengan tujuan investasinya.

a. Reksa Dana Saham

Reksa dana saham merupakan reksa dana yang menginvestasikan dananya pada saham-saham emiten. Jenis ini memberikan potensi risiko yang besar serta tingkat pengembalian (return) yang besar pula, atau "high risks high returns".

b. Reksa Dana Obligasi

Reksa dana obligasi merupakan jenis obligasi dengan tingkat pengembalian serta risiko yang moderat. Jenis reksa dana ini perlu dipertimbangkan bagi investor yang ingin memperoleh pendapatan yang dapat diprediksi serta stabil.

c. Reksa Dana Pasar Uang

Reksa dana pasar uang merupakan reksa dana yang menginvestasikan dananya pada pasar uang. Reksa dana ini memberikan tingkat risiko dan pengembalian yang rendah karena keuntungan hanya diperoleh dari kegiatan jual beli dan perubahan kurs mata uang asing.

d. Reksa Dana Campuran

Merupakan reksa dana dari berbagai macam efek. Alokasi aktiva didistribusikan pada investasi saham untuk tujuan pertumbuhan, obligasi untuk pendapatan, pasar uang untuk tunai dan stabilitas.

Ada dua tipe dari reksa dana, yaitu tipe perseroan dan tipe kontrak investasi kolektif yang dijelaskan sebagai berikut

a. Tipe Perseroan

Bentuk reksa dana ini adalah Perusahaan Terbatas (PT). Di Indonesia, tipe ini diklasifikasikan menjadi dua, yaitu reksa dana terbuka dan reksa dana tertutup.

b. Tipe Kontrak Investasi Kolektif

Tipe ini merupakan kontrak di antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mewakili legalisasi dari pemilik unit atau investor. Kontrak ini memberikan kewenangan kepada Manajer Investasi untuk mengelola portofolio Investasi Kolektif, dan kewenangan Bank Kustodian untuk bertindak sebagai Kustodi bagi dana kolektif. Di Indonesia, tipe reksa dana ini hanya dalam bentuk reksa dana terbuka yang mendominasi reksa dana yang ada di pasar.

Pengelompokkan reksa dana terdiri dari reksa dana terbuka dan reksa dana tertutup.

a. Reksa Dana Terbuka (Open-End)

Reksa dana ini dimaksudkan bahwa Manajer Investasi selalu siap untuk membeli kembali atau menebus unit penyertaan yang dimiliki investor kapan saja investor tersebut ingin menjualnya sesuai dengan nilai aktiva bersih per saham atau per unit.

Nilai Aktiva Bersih (NAB) sama dengan Nilai pasar aktiva Reksa Dana (sekuritas, kas, dan seluruh pendapatan) dikurangi total kewajiban.

NAB per saham atau sama dengan NAB per Unit adalah jumlah saham yang beredar

b. Reksa Dana Tertutup (Closed-End)

Pada reksa dana tipe ini, jika investor ingin menjual unitnya, ia dapat langsung menjualnya ke bursa. Harga yang terbentuk di bursa juga tergantung pada permintaan dan penawaran yang terjadi.

Seperti halnya bentuk investasi lainnya, reksa dana memberikan manfaat sebagai berikut.

a. Tingkat Pengembalian yang Potensial

Para investor mengharapkan tingkat pengembalian dari investasi pada reksa dana. Dividen dan atau bunga, yang dapat diterima dari manajer investasi. Keuntungan atau capital gain dari peningkatan nilai aktiva bersih (NAB). Contohnya, setahun yang lalu, investor membeli unit Reksa dana dengan harga Rp5.000,00. Pada akhir tahun, diasumsikan bahwa NAB reksa dana meningkat menjadi Rp5.750,00 per unit. Jika investor menjual investasinya pada harga tersebut maka ia akan memperoleh keuntungan atau capital gain sebesar Rp750,00.

b. Diversifikasi

Pemodal tidak hanya berinvestasi di deposito atau tabungan saja tapi dapat mendiversifikasikan dananya ke reksa dana untuk mendapatkan tingkat pengembalian yang relatif lebih tinggi dengan risiko yang masih dapat diterima.

c. Pengelolaan Secara Profesional

Investor tidak perlu melakukan analisis efek karena tugas tersebut sudah dilakukan oleh manajer investasi yang profesional.

d. Likuiditas

Reksa dana terbuka sangat likuid karena investor dapat menjual unit miliknya kapan saja kepada manajer investasi.

e. Minimum Investasi Relatif Murah

Investasi di reksa dana tidak membutuhkan modal yang besar. Saat ini hanya dengan Rp100.000,00 pemodal dapat berinvestasi di reksa dana.

f. Bunga Obligasi yang Tidak Kena Pajak 15%

Reksa dana yang berinvestasi di obligasi tidak dikenakan pajak atas kupon atau bunga obligasi yang diterimanya. Return yang didapat lebih besar dibandingkan bila pemodal membeli sendiri obligasi sehingga hasil investasi optimal.

Reksa dana seperti investasi lainnya juga mengandung unsur risiko. Risiko yang melekat pada reksa dana adalah sebagai berikut.

a. Kerugian yang Potensial

Selain reksa dana merupakan pasar uang yang memberikan tingkat pengembalian dan risiko yang kecil, tipe reksa dana yang lain lebih rentan terhadap risiko.

b. Risiko Likuidasi

Untuk reksa dana tertutup, investor tidak dapat menjual investasinya kapan saja ia inginkan karena penjualannya harus dilakukan di bursa sesuai dengan permintaan dan penawaran yang ada.

4. Surat Berharga Lainnya

Selain saham, obligasi, dan reksadana ada beberapa instrumen utang di bursa efek. Instrumen-instrumen tersebut adalah:

a. Option

Option merupakan surat pernyataan yang dikeluarkan oleh seseorang atau lembaga yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli saham (call option) dan menjual saham (put option) pada harga yang telah ditentukan sebelumnya.

b. Warrant

Warrant merupakan surat berharga yang dikeluarkan oleh perusahaan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli saham perusahaan pada waktu dan harga yang telah ditentukan.

c. Right

Right merupakan surat berharga yang diterbitkan oleh perusahaan yang memberikan hak kepada pemegangnya (pemilik saham biasa) untuk membeli tambahan saham pada penerbitan saham baru.

6.7 Mekanisme Kerja Pasar Modal

Perusahaan yang akan melakukan emisi saham maupun obligasi di pasar modal harus menjalani prosedur tertentu mulai dari persyaratan emisi dan dilanjutkan dengan penjualan saham dan obligasi di pasar perdana dan pasar sekunder.

1. Prosedur Penerbitan Efek (Emisi)

Prosedur dan persyaratan emisi harus dilaksanakan sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan mulai dari masa tahap persiapan sampai berakhirnya emisi.

a. Tahapan Emisi

a) Tahap persiapan

Pada tahap ini perusahaan yang hendak go public melakukan rapat umum pemegang saham (RUPS) untuk membicarakan tujuan mencari modal di pasar modal, jenis modal yang dibutuhkan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan emisi.

b) Menyampaikan Letter of Intent

Hasil rapat yang telah disetujui dalam RUPS dituangkan dalam surat (letter of intent). Letter of Intent merupakan surat pernyataan kehendak perusahaan untuk menerbitkan efek melalui pasar modal. Surat ini diajukan kepada Bapepam. Dalam letter of intent tercakup pernyataan untuk emisi, jenis efek, nominal efek, waktu emisi, tujuan

dan penggunaan dana emisi, berbagai data perusahaan, serta nama dan alamat bank yang menjadi relasi, notaris, akuntan dan penasihat hukum.

c) Penyampaian pernyataan pendaftaran

Pernyataan pendaftaran emisi ditujukan kepada Menteri Keuangan melalui (c.q) Ketua BAPEPAM. Pernyataan pendaftaran memuat informasi-informasi antara lain data tentang manajemen dan komisaris, struktur modal, kegiatan usaha, rencana emisi, dan penjamin pelaksana emisi.

d) Evaluasi oleh BAPEPAM

Evaluasi oleh BAPEPAM meliputi kelengkapan dokumen, penelaahan dokumen apakah telah sesuai dengan keadaan sebenarnya, kelengkapan informasi yang akan diberikan kepada masyarakat umum, dan kemampuan emiten untuk memenuhi persyaratan emisi. Apabila menurut evaluasi BAPEPAM semua hal ini telah layak maka dapat dimajukan ke langkah berikutnya, namun apabila belum, perusahaan diminta untuk melengkapi atau dapat pula ditolak apabila memang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

e) Dengar pendapat terbuka

Dengar pendapat terbuka bertujuan untuk mendapatkan informasi langsung dari pihak yang akan melakukan emisi. Dengar pendapat terbuka diikuti oleh BAPEPAM, perusahaan yang bersangkutan, serta lembaga-lembaga terkait lainnya.

b. Persyaratan Emisi

Izin registrasi dan listing, diberikan oleh BAPEPAM setelah perusahaan memenuhi persyaratan emisi yang ditetapkan sebelumnya. Setelah registrasi di BAPEPAM, emiten harus listing di bursa paling lambat 90 hari setelah izin registrasi dikeluarkan.

c. Pasar Perdana (Primary Market)

Setelah memenuhi persyaratan, ketua BAPEPAM mengeluarkan izin emisi. Penawaran efek setelah pemberian izin emisi sampai dengan pencatatan di bursa disebut pasar perdana.

2. Prosedur Transaksi Efek

Sebelum masuk ke bursa efek, efek yang akan dijual perusahaan harus dijual di pasar perdana terlebih dahulu. Harga efek sudah ditentukan oleh perusahaan (emiten) dan tidak ada tawar menawar. Ada beberapa tahap penawaran efek di pasar perdana yaitu:

- a. Pengumuman dan Pendistribusian Prospektus
Pengumuman dan pendistribusian prospektus dimaksudkan agar calon pembeli mengetahui kehendak emiten dan tawaran pihak emiten berdasar prospektus yang disebarluaskan tersebut.
- b. Masa Penawaran
Setelah menyebarkan prospektus, dilanjutkan dengan penawaran. Jangka waktu penawaran minimum 3 hari kerja dan maksimum 90 hari setelah izin emisi. Pada masa ini, pembeli menghubungi Agen Penjual yang ditunjuk oleh Underwriter untuk mengisi formulir pemesanan. Setelah formulir pemesanan diisi oleh pembeli (investor), kemudian dikembalikan kepada agen penjual, disertai tanda tangan dan fotokopi. Kartu tanda penduduk (KTP) investor tersebut sebanyak satu lembar.
- c. Masa Penjatahan
Penjataan dilakukan apabila jumlah yang dipesan investor melebihi jumlah yang disediakan emiten. Masa penjataan dihitung 12 hari kerja setelah berakhirnya masa penawaran.
- d. Masa Pengembalian
Bila jumlah yang dipesan investor tidak dapat dipenuhi maka emiten harus mengembalikan dana yang tidak dapat dipenuhi dengan batas waktu maksimal 4 hari terhitung sejak berakhirnya masa penjataan.
- e. Penyerahan Efek
Penyerahan efek dilakukan setelah ada kesesuaian antara banyaknya efek yang dipesan investor dengan banyaknya efek yang dapat dipenuhi oleh emiten. Penyerahan efek dilakukan oleh penjamin emisi sesuai pesanan investor melalui agen penjual dengan batas waktu maksimum 12 hari kerja sejak tanggal berakhirnya masa penjataan.
- f. Pencatatan Efek di Bursa
Setelah semua proses tersebut dilakukan maka semua efek dicatat di bursa efek. Pencatatan ini merupakan proses akhir emisi efek di pasar perdana dan secara resmi dapat diperdagangkan di pasar sekunder.
- g. Pasar Sekunder
Pasar sekunder dimulai setelah berakhirnya masa pencatatan di bursa perdana. Dalam pasar sekunder perdagangan efek terjadi antara pemegang saham dengan calon pemegang saham. Uang yang berputar di pasar sekunder tidak lagi masuk ke perusahaan yang menerbitkan efek, tetapi berpindah tangan dari satu pemegang saham ke pemegang saham berikutnya.

Pemegang saham yang tujuan utamanya berdagang, begitu berakhirnya pasar perdana dan dibukanya pasar sekunder dapat menjual lagi sahamnya bila harganya meningkat. Biasanya mereka ini bahkan telah dapat mengantisipasi kenaikan harga saham yang dipilihnya sebelum pasar sekunder dibuka.

Mekanisme perdagangan efek di bursa efek hanya dapat dilakukan oleh anggota bursa efek tersebut. Syarat keanggotaan bursa efek biasanya terkait dengan kemampuan permodalan. Anggota bursa efek terdiri dari Pedagang Efek (PE) dan perantara pedagang efek (PPE). Pedagang Efek (Dealer) bertindak sebagai investor yang menerima konsekuensi untung atau rugi, sedangkan perantara pedagang efek (Broker) bertindak sebagai agen yang melakukan transaksi atas nama klien dengan memperoleh komisi maksimum 1 % dari nilai transaksi.

IKHTISAR

1. Pasar modal adalah wadah untuk mempertemukan pihak-pihak yang memerlukan dana jangka panjang dengan pihak yang memiliki dana tersebut yang berhubungan dengan perdagangan modal, seperti obligasi dan efek. Pasar modal berfungsi menghubungkan investor, perusahaan dan institusi pemerintah melalui perdagangan instrumen keuangan jangka panjang.
2. Ada dua bentuk pasar yang dikenal di pasar modal, yaitu pasar perdana dan pasar sekunder. Pelaku utamanya adalah emiten, investor, dan lembaga penunjang, sedangkan lembaga yang terlibat adalah pengatur pasar modal, instansi pemerintah, dan lembaga swasta.
3. Instrumen pasar modal yang bersifat kepemilikan (saham) maupun hutang (obligasi) dapat diperjualbelikan kembali oleh pemiliknya. Ada beberapa jenis instrumen pasar modal di pasar modal antara lain adalah saham, obligasi, dan surat pernyataan utang lainnya seperti option, warrant, dan right.
4. Perusahaan yang akan melakukan emisi saham maupun obligasi di pasar modal harus menjalani prosedur tertentu mulai dari persyaratan emisi dan dilanjutkan dengan penjualan saham dan obligasi di pasar perdana dan pasar sekunder.

BAB 7

PERDAGANGAN INTERNASIONAL

KOMPETENSI DASAR

Menjelaskan ruang lingkup dan penerapan perdagangan internasional.

INDIKATOR

1. Mahasiswa mendeskripsikan kondisi globalisasi ekonomi
2. Mahasiswa menjelaskan manfaat dan faktor-faktor pendorong terjadinya perdagangan internasional
3. Mahasiswa menjelaskan teori perdagangan internasional
4. Mahasiswa menjelaskan kebijakan perdagangan internasional.
5. Mahasiswa menjelaskan bentuk pembayaran internasional.

Di kajian berjudul *An Inquiry into The Wealth of Nation* yang ditulis oleh Adam Smith (1776) menyatakan bahwa secara alami setiap manusia akan selalu memiliki dorongan untuk meningkatkan kehidupannya lebih baik bagi kepentingan dirinya sendiri. Hal menunjukkan bahwa manusia memiliki keinginan yang tidak terbatas. Untuk memenuhinya, manusia tidak dapat melakukannya sendiri sehingga memerlukan kontribusi dari pihak lain. Keinginan manusia yang beraneka ragam menimbulkan kegiatan tukar-menukar barang dan jasa. Kegiatan tukar-menukar barang dan jasa dikenal dengan istilah pertukaran. Bentuk pertukaran berkembang menjadi perdagangan. Dari kegiatan perdagangan yang berbentuk sederhana dan terbatas, kini telah berkembang menjadi semakin luas cakupan menjadi perdagangan internasional. Tujuan perdagangan yang semula untuk memenuhi kebutuhan manusia, juga telah berkembang untuk memperoleh keuntungan. Perdagangan internasional merupakan penerapan bagaimana kebutuhan dapat berkembang sesuai dengan cara pemenuhannya.

7.1 Globalisasi Ekonomi

Negara Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk yang banyak maka tentunya kebutuhan penduduknya pun besar dan beragam sehingga tidak mampu dipenuhi semuanya di dalam negeri. Untuk itu, sejak lama Indonesia menganut perekonomian terbuka (open economy), yaitu suatu negara yang ekonominya terlibat secara luas dalam perdagangan internasional. Dalam perekonomian terbuka, perdagangan internasional merupakan salah satu bagian penting untuk menggerakkan roda perekonomian negara tersebut. Tolok ukur yang digunakan untuk menilai kadar keterbukaan suatu perekonomian adalah rasio ekspor dan impor terhadap total GNP (Gross National Product). Jika rasio ekspor-impor terhadap GNP melebihi 50% perekonomian dinyatakan lebih terbuka. Dalam perekonomian terbuka, lazimnya kegiatan ekspor menyumbang sekurang-kurangnya 10 % dari GNP suatu negara. Dengan adanya perekonomian terbuka yang menunjukkan bahwa setiap negara berkonsentrasi pada bidang yang memiliki keunggulan komparatif, kehidupan semua orang diharapkan akan menjadi lebih baik.

Dengan semakin berkembangnya perekonomian dunia, mustahil suatu negara saat ini menganut perekonomian tertutup, yaitu perekonomian yang tidak mengenal transaksi perdagangan luar negeri atau bentuk-bentuk lainnya dari hubungan ekonomi antarnegara. Apalagi sejak dasawarsa 1970-an, telah terjadi perubahan yang sifatnya mendasar dan memiliki kecenderungan jangka panjang, yang dikenal dengan globalisasi. Proses globalisasi telah meningkatkan kadar hubungan saling ketergantungan antarnegara, bahkan menimbulkan proses menyatunya ekonomi dunia sehingga batasan antarnegara di berbagai penerapan usaha dan bisnis seolah-olah dianggap tidak berlaku lagi

Globalisasi dalam perekonomian merupakan proses yang memperlihatkan hanya ada satu pasar, dengan keterkaitan dan saling ketergantungan ekonomi antara suatu negara dan negara yang lainnya semakin kuat. Keterkaitan dan saling ketergantungan tersebut terjadi bukan saja di bidang ekonomi, tetapi di bidang lainnya juga. Globalisasi ekonomi ditandai dengan semakin menipisnya batas-batas investasi atau pasar secara nasional, regional, atau pun internasional. Keadaan ini terjadi karena hal-hal berikut.

- a. Ekonomi negara semakin terbuka;
- b. Optimalisasi keunggulan komparatif dan kompetitif setiap negara;
- c. Organisasi manajemen produksi dan perakitan semakin efisien;
- d. Komunikasi dan transportasi semakin canggih;
- e. Lalu lintas devisa semakin bebas; dan
- f. Perkembangan perusahaan multinasional di seluruh dunia semakin pesat.

Globalisasi cenderung memperkaya negara-negara maju yang secara tradisional telah menguasai sumber daya ekonomi strategis, seperti modal, teknologi, dan informasi sehingga kesenjangan semakin melebar antara kelompok negara kaya dan miskin. Tuntutan dari keterlibatan di perekonomian terbuka di era globalisasi adalah kesiapan menghadapi berbagai perubahan secara cepat dari segala bidang, termasuk perdagangan dalam negeri maupun perdagangan internasional. Selain itu, di era globalisasi, ancaman yang dihadapi oleh Indonesia yang memiliki pasar domestik yang sangat besar adalah tekanan dari masuknya produk-produk asing sehingga menyebabkan tingkat persaingan semakin tinggi. Industri terus berkembang dan persaingan di pasar domestik, namun tetap harus berusaha menguasai pangsa pasar global sebesar-besarnya agar tetap menjadi pelaku utama di setiap bidang yang terkena dampak dari globalisasi.

7.2 Manfaat dan Faktor Pendorong terjadinya Perdagangan Internasional

Di masa lampau, perdagangan internasional telah dilakukan bangsa Indonesia bahkan sebelum datangnya para penjajah. Saat itu di zaman kerajaan, saudagar dari Cina, Persia, dan India berdatangan secara damai ke wilayah kerajaan-kerajaan di kepulauan Indonesia. Mereka berlayar ke Indonesia untuk membeli hasil-hasil alam dari Indonesia untuk dijual kembali ke negara mereka dan negara-negara lain. Hingga zaman penjajahan yang dilakukan oleh Spanyol, Inggris, Portugis, Belanda. Indonesia dikuasai mereka hingga berabad-abad lamanya. Produk hasil bumi dari Indonesia dikuasai untuk memperkaya negara mereka dan perdagangan internasional tetap berlangsung meski dalam bentuk imperialisme.

Perdagangan internasional diartikan sebagai perdagangan antarnegara atau lintas negara, yang berbentuk ekspor dan impor. Perdagangan internasional dibagi menjadi dua kelompok, yaitu perdagangan barang (fisik) dan perdagangan jasa. Perdagangan jasa, antara lain, terdiri dari biaya transportasi, perjalanan (travel), asuransi, dan jasa konsultan asing. Ilmu Ekonomi Internasional adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari segala sesuatu mengenai hubungan ekonomi antarnegara. Hubungan ekonomi tersebut meliputi tiga bentuk hubungan, pertama berupa pertukaran hasil atau output negara satu dengan negara lain, kedua berupa pertukaran atau aliran sarana produksi atau faktor produksi, dan ketiga berupa hubungan utang piutang antarnegara atau hubungan kredit.

Bentuk hubungan tersebut merupakan permasalahan ekonomi internasional, yang menyangkut aspek: pola atau bentuk perdagangan, harga ekspor dan impor barang dagangan/barang modal, manfaat perdagangan, pengaruh pendapatan nasional, mekanisme neraca pembayaran, politik

perdagangan luar negeri, persekutuan perdagangan, modal luar negeri (investasi) dan transfer teknologi. Perdagangan internasional dilakukan oleh individu, perusahaan, atau negara. Manfaat perdagangan internasional adalah sebagai berikut.

- a. Setiap negara yang berdagang dapat menikmati semua barang yang dibutuhkan. Meskipun Indonesia tidak memproduksi sendiri pesawat komersial dengan teknologi canggih, namun karena ada perdagangan internasional, Indonesia dapat membelinya dari AS untuk jenis Boeing atau Fokker dari Belanda.
- b. Memungkinkan terjadinya spesialisasi
Indonesia tidak perlu memproduksi sendiri pesawat seperti yang diproduksi Rusia karena bila Indonesia tetap memproduksi sendiri, biaya produksinya justru lebih mahal daripada kalau membeli. Oleh karena itu biarkan Rusia berspesialisasi memproduksi pesawat tempur atau komersial Sukhoi dan Indonesia berspesialisasi memproduksi barang lain yang biaya produksinya murah, misalnya minyak kelapa sawit.
- c. Meningkatkan produktivitas dan efisiensi produksi
Dengan memilih spesialisasi memproduksi barang-barang yang biaya produksinya murah, faktor produksi yang dimiliki dapat digunakan untuk memproduksi barang tersebut sehingga produktivitas input akan meningkat dan proses produksi dapat lebih efisien.
- d. Mendorong munculnya teknologi baru di proses produksi
Spesialisasi akan membuat produsen terus berusaha melakukan penelitian dan pengembangan teknologi baru agar biaya produksi semakin murah.
- e. Memperluas daerah pemasaran
Adanya perdagangan internasional menyebabkan pasar yang dapat dijangkau produsen semakin luas, karena tidak hanya pasar dalam negeri saja namun juga pasar luar negeri.
- f. Memperoleh tambahan devisa bagi negara yang neraca dagangnya surplus. Kegiatan perdagangan internasional menggunakan alat pembayaran yang disebut devisa. Negara yang nilai eksportnya lebih besar dibandingkan nilai impornya akan memperoleh tambahan devisa dari kegiatan perdagangan internasional.
- g. Mempercepat pertumbuhan ekonomi
Spesialisasi produksi, penemuan teknologi baru, dan pasar yang semakin luas karena adanya perdagangan internasional membuat laju perekonomian bergerak lebih cepat sehingga pertumbuhan ekonomi juga akan lebih cepat.

- h. Memperluas lapangan kerja
Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan menyebabkan sebuah negara mampu membuka lapangan kerja yang lebih luas.

Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perdagangan internasional dapat diuraikan sebagai berikut.

- a. Adanya keanekaragaman kondisi produksi
Perdagangan diperlukan disebabkan adanya keanekaragaman kondisi produksi di setiap negara. Misalnya, negara X yang memiliki iklim tropis berspesialisasi dengan memproduksi pisang dan kopi untuk ditukarkan dengan barang dan jasa dari negara lain.
- b. Adanya penghematan biaya
Dengan adanya *increasing returns to scale*, yaitu penurunan biaya pada skala produksi yang besar, artinya proses produksi cenderung memiliki biaya produksi rata-rata yang lebih rendah ketika volume produksi ditingkatkan. Produksi yang dihasilkan selanjutnya akan dijual ke pasar global
- c. Adanya perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi
Perbedaan iptek antara negara satu dengan negara lainnya akan menyebabkan perbedaan jenis barang yang dihasilkan. Negara-negara yang teknologinya sudah lebih maju akan cenderung menghasilkan lebih banyak barang-barang industri, sedangkan negara-negara yang teknologinya masih belum maju atau terbatas akan lebih banyak memproduksi barang agraris.
- d. Adanya Motif Keuntungan dalam Perdagangan
Biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi suatu barang selalu terdapat perbedaan. Adakalanya suatu negara lebih untung melakukan impor daripada memproduksi sendiri. Adakalanya lebih menguntungkan bila dapat memproduksi sendiri barang tersebut, karena biaya produksinya lebih mudah. Oleh karena itu, negara-negara tersebut akan mencari keuntungan untuk memperdagangkan barang hasil produksinya.
- e. Adanya Persaingan Antarpengusaha dan Antarbangsa
Persaingan ini akan berakibat suatu negara meningkatkan kualitas barang hasil produksi dengan biaya yang ringan sehingga dapat bersaing dalam dunia perdagangan.
- f. Adanya perbedaan selera
Dengan adanya perbedaan selera akan memungkinkan suatu negara melakukan perdagangan. Misalnya, negara X dan Y sama-sama menghasilkan daging sapi dan daging ayam dengan jumlah yang hampir

sama. Penduduk negara X tidak menyukai daging sapi, sedangkan penduduk negara Y tidak menyukai daging ayam maka dapat terjadi ekspor yang saling menguntungkan di antara kedua negara tersebut, dengan cara negara X mengimpor daging ayam dan mengekspor daging sapi, sebaliknya negara Y mengimpor daging sapi dan mengekspor daging ayam.

g. Adanya perbedaan kebudayaan dan gaya hidup

Perbedaan kebudayaan dan gaya hidup di setiap negara juga dapat mendorong terjadinya perdagangan antarnegara, misalnya barang-barang seni atau kerajinan yang dihasilkan oleh suatu negara sangat diwarnai oleh kebudayaan dan gaya hidup masyarakat di negara yang bersangkutan.

7.3 Teori Perdagangan Internasional

Manfaat mempelajari teori perdagangan internasional, di antaranya sebagai berikut.

- a. Membantu menjelaskan arah dan komposisi perdagangan antarnegara serta pengaruhnya terhadap struktur perekonomian suatu negara.
- b. Dapat menunjukkan adanya keuntungan yang timbul dari adanya perdagangan internasional (gains from trade).
- c. Dapat mengatasi permasalahan neraca pembayaran yang defisit.

Adapun teori-teori perdagangan internasional dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Teori Merkantilisme

Teori merkantilisme menyatakan bahwa emas dan perak merupakan arus deras kesejahteraan nasional dan penting untuk perdagangan. Pemerintah (bukan individu-individu, yang dianggap tidak dapat dipercaya) harus terlibat dalam transfer barang-barang di antara negara-negara untuk meningkatkan kekayaan negara masing-masing. Langkah yang harus dilakukan pemerintah adalah memfasilitasi semua ekspor sekaligus membatasi impor, dengan cara melakukan monopoli dan intervensi di pasar melalui subsidi industri ekspor domestik dan alokasi hak perdagangan. Negara juga menanggung beban cukai atau kuota untuk membatasi volume impor.

2. Teori Keunggulan Absolut (Adam Smith)

Teori keunggulan absolut menyatakan bahwa negara-negara yang berbeda dapat memproduksi beberapa jenis barang secara lebih efisien daripada negara-negara lainnya sehingga efisiensi global dapat ditingkatkan melalui perdagangan bebas. Suatu negara dikatakan memiliki keunggulan komparatif terhadap negara

lainnya bila untuk memproduksi suatu komoditi dapat mengerjakannya dengan biaya-biaya oportunitas (opportunity cost) yang lebih rendah dibandingkan dengan komoditi alternatif yang tidak diproduksi. Setiap negara memiliki setiap keunggulan komparatifnya. Keunggulan tersebut tergantung pada sumber daya yang dimiliki oleh suatu negara. Dengan demikian setiap negara akan berspesialisasi dalam produksi dan mengekspor barang dan jasa yang biayanya relatif lebih rendah (artinya kurang efisien dibanding negara lain), sebaliknya setiap negara akan mengimpor barang dan jasa yang biaya produksinya relatif lebih tinggi (artinya kurang efisien dibandingkan negara lain). Dengan spesialisasi, negara dapat memperbaiki efisiensi mereka, dengan alasan:

- a. tenaga kerja menjadi lebih cakap karena melaksanakan pekerjaan yang sama secara berulang-ulang;
- b. efisiensi waktu bagi tenaga kerja karena tidak berpindah-pindah produksi;
- c. Dalam jangka panjang, produksi akan memberikan insentif untuk pembuatan metode kerja yang lebih efektif.

3. Teori Keunggulan Komparatif (David Ricardo)

Keunggulan komparatif adalah keunggulan relatif suatu barang di perdagangan internasional yang diukur berdasarkan ratio nilai tukar suatu barang terhadap barang lain yang diproduksi suatu negara dibandingkan dengan nilai tukar barang-barang yang sama yang diproduksi negara lainnya. Teori keunggulan komparatif menyatakan bahwa meskipun sebuah negara sanggup menghasilkan semua barang pada harga-harga yang lebih rendah daripada negara lain, perdagangan masih tetap akan menguntungkan kedua negara tersebut, berdasarkan biaya komparatif. Dengan demikian negara harus berkonsentrasi pada produk dengan keunggulan komparatif paling tinggi atau produk dengan kerugian komparatif paling rendah. Sebaliknya, mengimpor produk dengan keunggulan komparatif paling rendah atau produk dengan kerugian komparatif paling tinggi.

4. Teori Permintaan Timbal Balik (Reciprocal Demand) oleh John Stuart Mill

Teori yang dikemukakan oleh J.S. Mill sebenarnya melanjutkan Teori Keunggulan Komparatif dari David Ricardo, yaitu mencari titik keseimbangan pertukaran antara dua barang oleh dua negara dengan perbandingan pertukarannya atau dengan menentukan Dasar Tukar Dalam Negeri (DTD). Maksud Teori Timbal Balik adalah menyeimbangkan antara permintaan dengan penawarannya karena permintaan dan penawaran menentukan besarnya barang yang diekspor dan barang yang diimpor.

Jadi, menurut J.S. Mill selama terdapat perbedaan dalam produksi konsumsi antara kedua negara maka manfaat dari perdagangan selalu dapat dilaksanakan di kedua negara tersebut. Dan suatu negara akan memperoleh manfaat bila jumlah jam kerja yang diperlukan untuk memproduksi seluruh barang-barang eksportnya lebih kecil daripada jumlah jam kerja yang diperlukan seandainya seluruh barang impor diproduksi sendiri.

5. Teori Faktor Komposisi Produksi (Heckscher-Ohlin)

Teori faktor komposisi produksi berbasis pada adanya berbagai bentuk masukan faktor produksi dan proporsi untuk komoditi-komoditi yang berbeda, diiringi dengan distribusi yang tidak merata dari faktor-faktor tersebut di wilayah dunia yang berbeda. Dengan demikian ketidaksamaan harga relatif merupakan fungsi dari komposisi faktor produksi regional. Keunggulan komparatif ditentukan oleh kelimpahan relatif komposisi faktor-faktor produksi tersebut. Terdapat saling ketergantungan di antara faktor-faktor produksi, perpindahan faktor-faktor produksi, pendapatan, harga, dan perdagangan. Suatu perubahan dalam salah satunya akan mempengaruhi yang lain. Harga dari faktor-faktor produksi dan harga produk selanjutnya di dalam setiap wilayah akan tergantung pada penawaran dan permintaan, yang selanjutnya akan dipengaruhi oleh keinginan konsumen, tingkat pendapatan, kuantitas berbagai faktor, dan kondisi fisik produksi. Negara memiliki komposisi faktor produksi yang beragam, sebuah negara akan memiliki keunggulan relatif dalam sebuah komoditi yang terwujud di beberapa faktor produksi yang relatif melimpah dari negara tersebut, untuk selanjutnya diekspor.

6. Teori Siklus Hidup Produk Internasional (Raymond Vernon)

Teori siklus hidup produk internasional memusatkan diri pada ekspansi pasar dan inovasi teknologi yang relatif kurang diperhatikan dalam teori keunggulan komparatif. Teori ini bermanfaat untuk menjelaskan pola perdagangan dari kalangan manufaktur serta ekspansi penjualan dan produksi dari anak perusahaan multinasional. Teori siklus hidup produk internasional memiliki dua prinsip, yaitu

- a. teknologi merupakan faktor kritis untuk menciptakan dan membuat produk baru;
- b. ukuran dan struktur pasar penting untuk menentukan pola perdagangan.

Siklus hidup produk internasional meliputi tahap-tahap sebagai berikut: pengenalan (ditentukan oleh lokasi inovasi, ekspor, dan tenaga kerja); pertumbuhan; kedewasaan; dan penurunan.

7. Teori Perdagangan Baru

Teori perdagangan baru menyatakan bahwa ada banyak industri dikarenakan skala ekonomis yang substansial sehingga hasilnya lambat laun meningkat untuk spesialisasi. Skala ekonomis terutama berasal dari penyebaran biaya-biaya tetap (seperti biaya pengembangan produk baru) terhadap keluaran yang lebih banyak. Skala ekonomis ditimbulkan oleh peningkatan efisiensi utilisasi sumber daya. Peningkatan efisiensi menghasilkan produktivitas, yang merupakan sumber penting dari keunggulan komparatif. Sebuah negara dapat berperan dominan di kegiatan ekspor sebuah produk hanya karena memiliki sebuah atau beberapa perusahaan yang pertama kali menghasilkan produk tersebut.

8. Teori Similaritas Negara (Steffan Linder)

Teori similaritas negara menyatakan bahwa sebagian besar perdagangan barang-barang pabrikan sebaiknya dilakukan di antara nagara-negara dengan pendapatan perkapita yang serupa dan perdagangan intraindustri dalam barang-barang pabrikan sebaiknya sama. Perusahaan-perusahaan pada mulanya memproduksi barang untuk melayani pasar domestik mereka. Pada saat mereka mengeksplorasi peluang ekspor, mereka menemukan bahwa pasar asing yang paling menjanjikan di negara-negara yang di dalamnya preferensi konsumen mirip dengan yang ada di pasar domestik mereka.

9. Teori Keunggulan Kompetitif Nasional: Berlian Porter (Michael E. Porter)

Teori keunggulan kompetitif nasional menyatakan bahwa terdapat empat atribut dari sebuah negara yang membentuk lingkungan di mana didalamnya perusahaan-perusahaan lokal bersaing, dan keempat atribut ini mempromosikan atau menyumbat penciptaan keunggulan kompetitif. Porter menyebut keempat atribut sebagai membentuk "berlian". Atribut-atribut tersebut adalah

- a. kelebihan faktor –posisi sebuah negara dalam faktor produksi seperti tenaga kerja mahir atau prasarana yang diperlukan untuk terlibat di industri tertentu;
- b. kondisi permintaan–sifat permintaan dalam negeri untuk barang atau jasa industri;
- c. industri-industri yang berkaitan dan mendukung– kehadiran atau absennya industri pemasok dan industri yang berkaitan di sebuah negara yang secara internasional kompetitif;
- d. strategi, struktur, dan persaingan perusahaan–kondisi di sebuah negara yang mengatur bagaimana perusahaan-perusahaan dibentuk, diorganisasikan, dan dikelola, serta sifat saingan domestik.

Porter menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan paling besar kemungkinannya untuk berhasil di industri atau segmen industri di mana "berliannya paling menguntungkan". Berlian itu satu sama lain saling memperkuat sistem yang ada. Selain itu menurut Porter ada dua variabel tambahan yang dapat mempengaruhi berlian nasional, yaitu perubahan dan pemerintah.

7.4 Kebijakan Perdagangan Internasional

Perdagangan internasional dapat mematikan industri dalam negeri yang baru tumbuh sehingga diperlukan kebijakan perdagangan internasional yang tepat. Kebijakan perdagangan internasional yang dianut tiap negara berbeda-beda. Ada negara yang menganut kebijakan perdagangan proteksionis (perlindungan), ada pula yang menganut kebijakan perdagangan bebas (free trade). Negara yang menganut kebijakan perdagangan proteksionis maupun yang menganut kebijakan perdagangan bebas, pada umumnya melakukan kebijakan perdagangan internasional dengan tujuan:

1. Mengendalikan Ekspor dan Impor

Setiap negara dapat menggunakan kebijakan perdagangan internasional untuk mengendalikan ekspor dan impor. Kebijakan perdagangan bebas berusaha meningkatkan ekspor dengan cara menghapus hambatan perdagangan. Kebijakan perdagangan proteksionis berusaha meningkatkan ekspor antara lain dengan cara menurunkan tarif ekspor.

2. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi

Bagi negara maju, perekonomian akan tumbuh dengan baik bila hasil produksi yang melimpah dapat diekspor ke berbagai negara. Sebaliknya, bagi negara berkembang, perekonomian akan tumbuh dengan baik bila negara mampu melindungi industri dalam negeri, di antaranya dengan cara memberlakukan kuota impor (batasan impor) atau bahkan larangan untuk mengimpor barang tertentu.

3. Menyehatkan Neraca Pembayaran

Untuk menghindari defisit (kekurangan) dalam neraca pembayaran, negara dapat menggunakan kebijakan perdagangan proteksionis sebagai salah satu alat. Caranya yaitu dengan berusaha meningkatkan ekspor dan sekaligus menekan impor dengan berbagai cara, seperti pemberlakuan kuota impor, tarif impor dan larangan impor.

Seperti disebutkan sebelumnya, ada dua macam kebijakan perdagangan internasional, yaitu kebijakan perdagangan bebas (free trade) dan kebijakan perdagangan proteksionis.

1. Kebijakan Perdagangan Bebas

Kebijakan perdagangan bebas adalah kebijakan perdagangan yang menginginkan kebebasan dalam perdagangan sehingga tidak ada rintangan yang menghalangi arus produk dari dan ke luar negeri. Kebijakan perdagangan bebas berkembang dengan berpedoman pada ajaran aliran klasik (liberal) yang tidak menghendaki adanya rintangan atau hambatan dalam arus perdagangan internasional. Menurut aliran klasik, perdagangan bebas layak dipakai sebagai sarana untuk meningkatkan kemakmuran, dengan alasan sebagai berikut:

- a. Dapat mendorong persaingan antar pengusaha sehingga tercipta produk yang berkualitas dan berteknologi tinggi.
- b. Dapat mendorong penghematan biaya sehingga produksi dapat dijalankan dengan biaya serendah-rendahnya dan dijual dengan harga bersaing (efisiensi).
- c. Dapat menggerakkan perputaran modal, tenaga ahli dan investasi ke berbagai negara sehingga dapat menumbuhkan perekonomian.
- d. Dapat meningkatkan perolehan laba sehingga memungkinkan para pengusaha berinvestasi lebih luas.
- e. Dapat memperluas pilihan dan variasi bagi konsumen sehingga mereka lebih bebas untuk memilih berbagai produk yang diinginkan.

Harga produk ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran sesuai hukum ekonomi karena dalam perdagangan bebas tidak terdapat rintangan-rintangan atau hambatan-hambatan. Saat ini, perdagangan bebas belum berlaku secara menyeluruh dan masih terbatas pada kawasan-kawasan tertentu. Ini berarti, perdagangan bebas hanya berlaku bagi negara yang ada di kawasan tersebut. Bagi negara yang bukan anggota kawasan tersebut tidak berlaku ketentuan perdagangan bebas sehingga di negara tersebut masih terdapat berbagai rintangan seperti tarif, kuota, diskriminasi harga dan lain-lain.

Contoh organisasi perdagangan bebas di antaranya adalah NAFTA (North America Free Trade Agreement), yaitu perjanjian perdagangan bebas kawasan Amerika Utara, AFTA (Asean Free Trade Agreement) yaitu perjanjian perdagangan bebas kawasan Asia Tenggara dan EETA (European Economic Trade Area) yaitu kawasan perdagangan bebas Eropa.

2. Kebijakan Perdagangan Proteksionis

Kebijakan perdagangan proteksionis adalah kebijakan perdagangan yang melindungi industri dalam negeri dengan cara membuat berbagai rintangan (hambatan) yang menghalangi arus produk dari dan ke luar negeri. Alasan suatu negara menganut kebijakan perdagangan proteksionis adalah sebagai berikut:

- a. Perdagangan bebas hanya menguntungkan negara maju, karena mereka memiliki modal yang kuat dan teknologi yang maju. Selain itu, harga produk industri negara maju dinilai terlalu mahal (tinggi) dibanding harga bahan-bahan mentah yang dihasilkan negara berkembang.
- b. Untuk melindungi industri dalam negeri yang baru tumbuh. Industri seperti ini tidak akan mampu bersaing dengan industri negara lain yang sudah maju dan berpengalaman.
- c. Untuk membuka lapangan kerja. Dengan melakukan proteksi, industri-industri di dalam negeri dapat tetap hidup dan dengan demikian mampu membuka lapangan kerja bagi masyarakat.
- d. Untuk menyehatkan neraca pembayaran. Agar terhindar dari defisit dalam neraca pembayaran, negara dapat menggunakan kebijakan perdagangan proteksionis, caranya dengan meningkatkan ekspor.
- e. Untuk meningkatkan penerimaan negara. Dengan mengenakan tarif tertentu terhadap produk impor dan ekspor, negara dapat meningkatkan penerimaan.

Kebijakan perdagangan proteksionis dapat dilakukan suatu negara dengan membuat berbagai hambatan atau rintangan. Hambatan-hambatan tersebut di antaranya adalah:

a. Kuota impor

Kuota impor adalah kebijakan yang menetapkan batas jumlah barang yang boleh diimpor, dengan tujuan melindungi produksi dalam negeri. Dengan demikian, setelah mencapai jumlah tertentu dalam suatu periode, pengimpor dilarang menambah jumlah barang yang diimpor.

b. Kuota ekspor

Kuota ekspor adalah kebijakan menetapkan batas jumlah barang yang dapat diekspor dengan tujuan menjamin persediaan barang tersebut untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

c. Subsidi

Subsidi adalah kebijakan dengan cara memberikan subsidi (tunjangan) kepada perusahaan yang memproduksi barang ekspor sehingga harga barang dari perusahaan tersebut dapat bersaing dengan barang luar negeri.

Pemberian subsidi akan membuat harga jual barang menjadi lebih murah dan mampu bersaing dengan harga jual barang luar negeri.

d. Tarif impor

Tarif impor adalah kebijakan mengenakan tarif atau bea terhadap barang yang diimpor agar harga barang impor menjadi lebih mahal. Dengan demikian, perusahaan dalam negeri yang menghasilkan barang sejenis dapat bersaing dengan barang impor. Pada umumnya, tarif impor dikenakan dalam bentuk persentase dari nilai barang yang diimpor, misalnya 10% atau 20%. Untuk bahan-bahan baku industri, suatu negara biasanya akan mengenakan tarif impor yang rendah atau bahkan 0%. Tarif impor dikenal dengan istilah pajak impor atau bea masuk.

e. Tarif ekspor

Tarif ekspor adalah kebijakan mengenakan tarif atau bea terhadap barang yang diekspor dengan tujuan untuk merangsang ekspor. Dengan demikian, umumnya tarif dapat dikenakan sangat rendah atau bahkan 0%. Istilah lain dari tarif ekspor adalah pajak ekspor atau bea keluar. Kebijakan tarif ekspor dan tarif impor, selain digunakan sebagai alat proteksi, juga bermanfaat menambah penerimaan negara, karena dengan adanya tarif, negara akan menerima sejumlah uang.

f. Premi

Premi adalah kebijakan berupa pemberian hadiah atau penghargaan kepada perusahaan yang mampu memproduksi barang dengan kualitas tinggi dan kuantitas tertentu. Pemberian premi diharapkan dapat memacu produsen dalam negeri untuk bersaing untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produknya.

g. Diskriminasi harga

Diskriminasi harga adalah kebijakan melalui penetapan harga produk secara berlainan untuk satu negara dengan negara lainnya. Kebijakan ini dilakukan salah satunya dalam rangka perang tarif. Sebagai contoh, bila negara X menganggap barang hasil produksinya yang diekspor ke negara Y dikenakan tarif masuk yang tinggi maka sebagai balasannya bila negara Y mengimpor barang dari negara X, negara X akan memberikan harga jual yang lebih tinggi. Dengan hal tersebut, diharapkan negara Y akan menurunkan tarif masuknya terhadap negara X.

h. Larangan ekspor

Larangan ekspor adalah kebijakan melarang ekspor untuk barang-barang tertentu dengan pertimbangan ekonomi, politik dan sosial budaya. Dengan pertimbangan ekonomi, suatu negara melarang mengekspor bahan-bahan baku industri yang dibutuhkan di dalam negeri. Larangan ekspor dengan

pertimbangan politik misalnya adanya embargo ekonomi dari PBB, di mana Irak dilarang mengekspor minyak bumi ke luar negeri. Sedangkan pertimbangan sosial budaya, misalnya suatu negara melarang ekspor benda-benda bersejarah serta flora dan fauna yang sudah langka.

i. Larangan impor

Larangan impor adalah kebijakan melarang impor untuk barang-barang tertentu dengan beberapa alasan. Alasan-alasan tersebut di antaranya adalah untuk melindungi industri dalam negeri, untuk membalas kebijakan perdagangan negara lain dan untuk menghemat devisa.

j. Dumping

Dumping adalah kebijakan menjual suatu barang di luar negeri dengan harga yang lebih murah dibandingkan harga di dalam negeri. Tujuan kebijakan ini adalah memperluas dan menguasai pasar. Dumping dapat dilakukan bila terdapat aturan yang jelas dan tegas sehingga konsumen di dalam negeri tidak dapat membeli barang (yang di-dumping) dari luar negeri.

7.5 Pembayaran Internasional

Bila ada dua negara yang melakukan perdagangan internasional maka tentu diperlukan suatu alat pembayaran yang dapat diterima oleh semua pihak. Alat pembayaran tersebut sering disebut dengan istilah devisa. Devisa dapat berbentuk, mata uang kuat (hard currency)/valuta asing yaitu mata uang yang dipercaya dan mudah diterima oleh negara lain, emas, wesel asing atau SDR (Special Drawing Rights). Jadi devisa adalah semua barang yang dapat berfungsi sebagai alat pembayaran di perdagangan internasional.

Perdagangan internasional dan berbagai kegiatan yang berskala internasional memerlukan alat pembayaran luar negeri atau devisa. Dengan demikian apabila suatu negara memiliki devisa yang banyak maka akan semakin mudah negara tersebut melakukan hubungan internasional terutama perdagangan internasional. Beberapa sumber perolehan devisa negara antara lain sebagai berikut.

- a. Hasil penjualan/ekspor barang dan jasa seperti ekspor kayu lapis, karet, kopi, minyak tanah dan lain sebagainya. Demikian pula hasil ekspor jasa seperti jasa pengangkutan, komisi jasa perbankan, premi asuransi dan lain sebagainya.
- b. Pinjaman yang diperoleh dari negara lain, badan-badan internasional serta swasta asing, seperti pinjaman dari CGI, kredit dari world bank, ADB atau kredit dari swasta asing.

- c. Hadiah atau grant dan bantuan dari badan-badan PBB seperti United Nations Development Program (UNDP), United Nations Scientific and Cultural Organization (UNESCO) dan pemerintah asing.
- d. Laba dari penanaman modal ke luar negeri, seperti laba yang ditransfer dari perusahaan milik pemerintah dan warga negara yang berdomisili di luar negeri, termasuk transfer dari warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri seperti di Singapura, Timur Tengah dan lain sebagainya.
- e. Hasil dari kegiatan pariwisata internasional, seperti uang sewa angkutan, sewa hotel, penjualan souvenir khas tradisional, uang jasa pramuwisata dan lain sebagainya.

Setiap negara yang terlibat kegiatan ekonomi internasional hanya akan memperoleh devisa bila dapat memenangkan persaingan yang ketat di perdagangan internasional. Komoditi yang ditawarkan haruslah merupakan komoditi unggul, berdaya saing tinggi, dan sesuai dengan selera konsumen.

Setiap negara selalu berusaha untuk mendapatkan devisa sebanyak mungkin. Devisa dapat digunakan negara untuk membiayai kegiatan pembangunan maupun konsumsi. Secara rinci, tujuan penggunaan devisa antara lain sebagai berikut.

- a. Mengimpor barang konsumsi, bahan baku industri dan sektor produksi lainnya, peralatan dan perlengkapan (barang modal, perlengkapan pertahanan keamanan, dan sebagainya).
- b. Melunasi jasa pihak asing seperti jasa perbankan, asuransi, pelayaran, penerbangan, wisatawan Indonesia ke luar negeri, dan sebagainya.
- c. Membayar keuntungan atau dividen terhadap penanaman modal asing.
- d. Melunasi cicilan dan bunga utang luar negeri.
- e. Membiayai kegiatan warga negara di luar negeri, seperti kegiatan kantor perwakilan pemerintah (kedutaan/ konsulat) di luar negeri, biaya studi pelajar atau mahasiswa di luar negeri, kunjungan pejabat ke luar negeri dan lain sebagainya.

7.6 Valuta Asing

Valuta asing merupakan salah satu bentuk devisa (alat pembayaran internasional) yang paling banyak digunakan untuk menyelesaikan transaksi ekonomi internasional. Valuta asing atau mata uang asing adalah jenis mata uang yang dipergunakan di negara lain. Bagi Indonesia, Bath Thailand merupakan valuta asing, sebaliknya rupiah Indonesia bagi Thailand merupakan valuta asing. Nilai mata

uang masing-masing negara tidaklah sama dan nilai mata uang tersebut dalam mata uang negara lainnya terus berubah dari waktu ke waktu. Perbandingan nilai mata uang satu negara dengan negara lain disebut kurs valuta asing. Jadi kurs valuta asing adalah suatu nilai yang menunjukkan jumlah mata uang dalam negeri yang diperlukan untuk mendapatkan satu unit mata uang asing. Di pasar, valuta asing diperdagangkan seperti halnya barang dan jasa oleh penjual valuta asing (money changer).

Penggunaan valuta asing atau mata uang asing sebagai alat pembayaran di perdagangan internasional disyaratkan karena umumnya negara-negara yang melakukan jual beli hanya menginginkan pembayaran atas barang yang diberikannya kepada negara lain dengan menggunakan mata uang negaranya, atau mata uang negara lain yang dianggap perlu, yang telah ditentukan sebagai standar internasional. Adapun mata uang yang jarang digunakan sebagai alat pembayaran dan satuan hitung serta nilainya sering mengalami depresiasi (penurunan nilai) disebut soft currency. Pada umumnya, mata uang ini berasal dari negara-negara yang sedang berkembang, yang perekonomiannya relatif baru dan sedang tumbuh, misalnya Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Mata uang asing tidak diperlukan di pembangunan suatu negara jika negara yang bersangkutan mampu menyediakan sarana dan prasarana pembangunan dari dalam negerinya sendiri berupa bahan baku, manusia dan teknologi. Meski demikian karena perkembangan ilmu pengetahuan yang umumnya tidak merata dan ketersediaan sumber daya alam pada suatu negara sangat terbatas, kurang bermutu dan bahkan hampir tidak ada (sedikit), menyebabkan suatu negara memerlukan negara lain untuk menutupi kekurangan kebutuhannya dalam pembangunan. Dalam rangka memenuhi kebutuhan itulah, diperlukan mata uang asing tersebut, terutama mata uang yang berjenis hard currency.

Secara ekstrem, di dunia ada dua sistem penetapan nilai tukar yang sampai saat ini masih berlaku, yaitu sistem nilai tukar tetap (fixed exchange rate system) dan sistem nilai tukar tidak tetap atau mengambang (flexible atau floating exchange rate system). Dalam perkembangannya, Indonesia pernah menerapkan kedua sistem tersebut dengan segala variasinya. Berikut beberapa sistem nilai tukar yang pernah diterapkan di Indonesia.

1. Sistem Nilai Tukar Tetap (1970–1978)

Sistem nilai tukar tetap sebenarnya mulai diterapkan pada saat dibentuk lembaga dana moneter internasional (IMF) dan Bank Dunia pada 1944 di Bretton Woods, New Hampshire, Amerika Serikat. Semua negara peserta konferensi sepakat akan menggunakan emas atau dollar sebagai bagian terbesar cadangan

devisa mereka. Sistem Bretton Woods pada hakikatnya adalah sistem nilai tukar tetap. Sistem nilai tukar tetap versi Bretton Woods dipergunakan di Indonesia antara periode 1970–1978. Walaupun sampai saat ini masih ada beberapa negara yang menggunakan sistem nilai tukar tetap, seperti Malaysia. Setelah periode tersebut, sistem ini mulai banyak ditinggalkan oleh negara-negara di dunia dan beralih ke sistem nilai tukar mengambang.

2. Sistem Nilai Tukar Mengambang Terkendali (1978–1997)

Pemerintah menyadari bahwa nilai tukar rupiah terhadap dolar yang ditetapkan terlalu tinggi (overvalued). Hal ini dapat mengurangi daya saing produk-produk ekspor Indonesia di luar negeri. Bersamaan dengan kebijakan devaluasi terhadap dolar pada 15 November 1978 yang kemudian terkenal dengan nama KENOP 15 atau Kebijakan November 15, pemerintah meninggalkan sistem nilai tukar tetap dan beralih ke sistem nilai tukar mengambang.

Dengan sistem nilai tukar mengambang terkendali (managed floating) nilai tukar rupiah diambangkan terhadap sekeringjang mata uang (basket of currencies) negara mitra dagang utama Indonesia. Sejak sistem ini dilaksanakan, pemerintah membiarkan nilai tukar domestik bergerak di pasar dengan selisih (spread) tertentu, yaitu menetapkan nilai batas atas dan nilai batas bawah. Interval antara kedua batas ini disebut rentang intervensi (band intervention). Selama Orde Baru telah dilaksanakan lima kali kebijakan penurunan kurs rupiah terhadap dolar (devaluasi) seperti terlihat dalam Tabel berikut.

Tabel 7.1 Perkembangan Kebijakan Devaluasi Rupiah

Tanggal	Sistem Nilai Tukar	Keterangan
9 Desember 1970	Tetap	Devaluasi rupiah dari 1 US\$ = Rp 250 menjadi 1 US\$ = Rp 378
23 Agustus 1971	Tetap	Devaluasi rupiah dari 1 US\$ = Rp 378 menjadi 1 US\$ = Rp 415
15 November 1978	Tetap	Devaluasi rupiah dari 1 US\$ = Rp 415 menjadi 1 US\$ = Rp 625
30 Maret 1983	Mengambang Terkendali	Devaluasi rupiah dari 1 US\$ = Rp 702,5 menjadi 1 US\$ = Rp 970
12 September 1986	Mengambang Terkendali	Devaluasi rupiah dari 1 US\$ = Rp1.134 menjadi 1 US\$ = 1.644

3. Sistem Nilai Tukar Mengambang Bebas (1997–Sekarang)

Dalam Sistem nilai tukar mengambang bebas yaitu sejak 14 Agustus 1997 sampai sekarang, nilai tukar rupiah dibiarkan secara bebas bergerak di pasar uang berdasarkan mekanisme pasar (interaksi kekuatan permintaan dan penawaran di masyarakat). Jika dalam nilai tukar tetap dan nilai tukar mengambang terkendali, orang mengenal istilah devaluasi dan revaluasi. Dalam nilai tukar mengambang bebas tidak dikenal kedua istilah tersebut, yang ada adalah istilah depresiasi dan apresiasi. Pada periode sistem nilai tukar ini, kurs rupiah mengalami tekanan. Melemahnya nilai rupiah diakibatkan oleh krisis ekonomi yang dimulai oleh melemahnya nilai Baht Thailand yang kemudian berpengaruh ke kawasan ASEAN lainnya, termasuk Indonesia. Pada periode ini pula, penurunan nilai tukar rupiah mengalami puncaknya hingga pernah mencapai Rp16.000 per dolar Amerika. Meskipun pada bulan-bulan berikutnya mengalami penguatan, namun tetap memiliki kecenderungan untuk terus melemah.

Ada beberapa faktor atau kondisi yang berbeda menimbulkan pengaruh dan perbedaan kurs di setiap negara. Perubahan nilai tukar terhadap valas dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut dapat berupa faktor ekonomi maupun nonekonomi yang secara langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan tingkat permintaan dan penawaran valas.

1. Faktor Penyebab Nilai Tukar secara Langsung

Secara langsung permintaan dan penawaran valas akan dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut.

- a. Permintaan valas akan ditentukan oleh impor barang dan jasa yang memerlukan dolar atau valas lainnya dan ekspor modal dari dalam ke luar negeri.
- b. Penawaran valas akan ditentukan oleh ekspor barang dan jasa yang menghasilkan dolar atau valas lainnya dan impor modal dari luar negeri ke dalam negeri.

2. Faktor Penyebab Nilai Tukar secara Tidak Langsung

Adapun secara tidak langsung permintaan dan penawaran valas akan dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut.

a. Posisi Neraca Pembayaran

Saldo neraca pembayaran memiliki konsekuensi terhadap nilai tukar rupiah. Jika saldo neraca pembayaran defisit, permintaan terhadap valas akan meningkat. Hal ini menyebabkan nilai rupiah melemah (terdepresiasi).

Sebaliknya, jika saldo neraca pembayaran surplus, permintaan terhadap valas akan menurun, dan hal ini menyebabkan nilai rupiah menguat (terapresiasi).

b. Tingkat Inflasi

Dengan asumsi faktor-faktor lainnya tetap (*ceteris paribus*), kenaikan tingkat harga akan memengaruhi nilai tukar mata uang suatu negara. Sesuai dengan teori paritas daya beli (*purchasing power parity*), yang menjelaskan bahwa pergerakan kurs antarmata uang dua negara bersumber dari tingkat harga di kedua negara itu sendiri. Dengan demikian, menurut teori ini, penurunan daya beli mata uang (yang ditunjukkan oleh kenaikan tingkat harga di negara yang bersangkutan) akan diikuti dengan depresiasi mata uangnya secara proporsional dalam pasar valuta asing. Kenaikan daya beli mata uang domestik (misalnya rupiah) mengakibatkan apresiasi (penguatan nilai tukar) secara proporsional.

c. Tingkat Bunga

Dengan asumsi *ceteris paribus*, adanya kenaikan suku bunga dari simpanan suatu mata uang domestik, akan menyebabkan mata uang domestik itu mengalami apresiasi (penguatan) terhadap nilai mata uang negara lain. Hal ini mudah dipahami karena dengan meningkatnya suku bunga deposito, misalnya, orang yang menyimpan asetnya di lembaga perbankan dalam bentuk rupiah akan mendapatkan pendapatan bunga yang lebih besar sehingga menyebabkan nilai rupiah terapresiasi.

d. Tingkat Pendapatan Nasional

Seperti halnya tingkat bunga, tingkat pendapatan nasional hanya akan memengaruhi nilai tukar melalui tingkat permintaan dolar atau valas lainnya. Kenaikan pendapatan nasional (yang identik dengan meningkatnya kegiatan transaksi ekonomi) melalui kenaikan impor akan meningkatkan permintaan terhadap dolar atau valas lainnya sehingga menyebabkan nilai rupiah terdepresiasi dibandingkan dengan dolar atau valas lainnya.

e. Kebijakan Moneter

Kebijakan pemerintah untuk memengaruhi kegiatan ekonomi dapat memengaruhi pergerakan kurs. Misalnya, kebijakan Bank Indonesia yang bersifat ekspansif (dengan menambah jumlah uang beredar) akan mendorong kenaikan harga-harga atau inflasi. Pada akhirnya menyebabkan rupiah mengalami depresiasi karena menurunkan daya beli rupiah terhadap barang dan jasa dibandingkan dolar atau valas lainnya.

f. Ekspektasi dan Spekulasi

Untuk sistem nilai tukar yang diserahkan kepada mekanisme pasar secara bebas, seperti halnya rupiah dan sebagian besar mata uang negara-negara di

dunia, perubahan nilai tukar rupiah dapat disebabkan oleh faktor-faktor nonekonomi. Ketidakstabilan pada faktor-faktor nonekonomi (misalnya karena ledakan bom atau gangguan keamanan) akan berpengaruh terhadap kondisi perekonomian di dalam negeri.

Setiap negara memiliki mata uang yang nilainya berbeda dengan nilai mata uang negara lain. Oleh karena itu, untuk melakukan transaksi perdagangan internasional, penduduk satu negara harus menukarkan dahulu mata uang negaranya dengan mata uang negara rekan dagangnya atau mata uang lain yang dapat diterima rekan dagangnya tersebut.

Seseorang yang membutuhkan valuta asing dapat menukarkan mata uang yang dimiliki dengan valuta asing yang dibutuhkan di pasar valuta asing. Ada banyak pihak yang membutuhkan valuta asing. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut.

- a. Orang-orang Indonesia yang akan berkunjung ke luar negeri.
- b. Orang Indonesia yang membiayai anggota keluarganya yang hidup di luar negeri.
- c. Para importir yang hendak membayar barang atau jasa yang dibeli dari luar negeri.
- d. Para investor dalam negeri yang ingin membayar kewajiban-kewajibannya terhadap orang di luar negeri.
- e. Pemerintah/orang-orang di dalam negeri yang akan membayar utang atau bunga ke luar negeri.
- f. Pedagang valas yang berspekulasi karena harga valuta asing yang berfluktuasi.
- g. Perusahaan-perusahaan asing (yang ada di dalam negeri) yang akan membayar dividen kepada para pemegang sahamnya di luar negeri.

7.7 Neraca Pembayaran

Perdagangan internasional dan semua transaksi internasional yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain menimbulkan pembayaran internasional. Semua transaksi yang dilakukan tersebut perlu dicatat dalam sebuah neraca pembayaran internasional. Neraca pembayaran internasional (Balance of Payment) merupakan catatan yang tersusun secara sistematis mengenai seluruh transaksi ekonomi internasional yang dilakukan penduduk suatu negara itu dengan penduduk negara lain dalam jangka waktu tertentu, biasanya satu tahun. Pengertian penduduk di dalam

suatu neraca pembayaran internasional meliputi orang perorangan, badan hukum, dan pemerintah. Neraca pembayaran sangat penting dan perlu dibuat oleh suatu negara. Fungsi neraca pembayaran internasional antara lain sebagai berikut.

- a. Sebagai alat pembukuan agar pemerintah dapat mengambil keputusan yang tepat, mengenai jumlah barang dan jasa yang sebaiknya keluar atau masuk dalam batas wilayah suatu negara serta untuk mendapatkan keterangan-keterangan mengenai anggaran alat-alat pembayaran luar negerinya.
- b. Sebagai alat untuk mengukur kondisi ekonomi yang terkait dengan perdagangan internasional dari suatu negara. Sebagai alat untuk melihat gambaran pengaruh transaksi luar negeri terhadap pendapatan nasional negara yang bersangkutan.
- c. Sebagai alat untuk memperoleh informasi rinci terkait dengan perdagangan luar negeri.
- d. Sebagai alat untuk membandingkan pos-pos dalam neraca pembayaran negara tersebut dengan negara tertentu.
- e. Sebagai alat kebijakan moneter yang akan dilaksanakan oleh suatu negara.

Transaksi ekonomi internasional yang dicatat dalam neraca pembayaran internasional dapat digolongkan menjadi dua yaitu transaksi debit dan kredit. Transaksi debit adalah transaksi yang menimbulkan kewajiban bagi penduduk suatu negara untuk melakukan pembayaran kepada penduduk negara lain, sedangkan transaksi kredit adalah transaksi yang menimbulkan hak bagi penduduk suatu negara untuk menerima pembayaran dari penduduk negara lain. Neraca pembayaran internasional terbentuk dari beberapa komponen utama yaitu sebagai berikut.

1. Neraca Berjalan adalah jumlah saldo dari neraca perdagangan dan transaksi unilateral. Neraca perdagangan terdiri atas neraca perdagangan barang dan neraca perdagangan jasa. Ada tiga kemungkinan yang dapat terjadi pada neraca perdagangan suatu negara yaitu surplus, defisit, atau seimbang. Surplus terjadi bila ekspor lebih besar dari impor, defisit bila ekspor lebih kecil dari impor dan seimbang bila ekspor sama dengan impor. Transaksi unilateral merupakan transaksi yang tidak menimbulkan hak atau kewajiban secara yuridis bagi negara yang menerimanya. Contoh transaksi unilateral adalah pemberian bantuan dan hibah (grant).
2. Neraca Lalu Lintas Modal mencatat arus modal pemerintah dan swasta.

Keseimbangan neraca pembayaran akan tercapai apabila devisa/valuta asing yang masuk ke suatu negara sama dengan valuta asing yang keluar dari negara tersebut baik yang berasal dari neraca berjalan maupun neraca lalu lintas modal. Jadi bila arus valuta asing yang masuk lebih besar dari arus valuta asing yang keluar maka neraca pembayaran dikatakan surplus dan sebaliknya bila arus valuta asing yang masuk lebih kecil dari arus valuta asing yang keluar maka neraca pembayaran dikatakan defisit.

Neraca pembayaran yang paling diinginkan adalah neraca pembayaran yang seimbang. Neraca pembayaran yang defisit selama itu terjadi dalam jangka pendek tidak perlu terlalu dirisaukan karena pengaruhnya pada kondisi ekonomi suatu negara tidaklah terlalu besar, namun apabila defisit tersebut terjadi secara berkepanjangan tentu akan menimbulkan dampak negatif. Sebuah negara yang neraca pembayarannya defisit berarti tidak memiliki cadangan devisa padahal devisa sangat diperlukan untuk mengimpor barang dan jasa serta membayar cicilan utang dan bunganya. Demikian juga neraca pembayaran internasional yang surplus. Memang masih lebih menguntungkan apabila sebuah negara mengalami surplus dibandingkan defisit neraca pembayaran internasional. Tetapi surplus yang terus menerus terjadi dalam jangka panjang juga bukan kondisi yang ideal karena devisa yang menumpuk berarti pemanfaatan devisa tersebut menjadi tidak optimal. Tentu hal ini selanjutnya akan berpengaruh bagi kemakmuran masyarakat suatu negara.

Defisit neraca pembayaran yang dialami suatu negara harus dicarikan solusi yang didasarkan pada komponen apa yang menjadi sumber defisit neraca pembayaran internasional tersebut. Apabila defisit neraca pembayaran disebabkan karena defisit transaksi berjalan, solusi yang dapat ditempuh adalah dengan memperbesar penerimaan dari neraca lalu lintas modal, misalnya dengan memperbesar kran penanaman modal asing ke dalam negeri. Sementara itu apabila defisit neraca pembayaran disebabkan karena defisit lalu lintas modal, solusi pemecahannya dapat dilakukan dengan memperbesar penerimaan dari neraca berjalan, misalnya dengan meningkatkan nilai ekspor barang dan jasa.

IKHTISAR

1. Perdagangan internasional adalah kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan antarnegara dengan tujuan memperoleh keuntungan. Ekspor adalah kegiatan menjual barang atau jasa ke luar negeri sedangkan impor adalah kegiatan membeli barang atau jasa dari luar negeri.

2. Kebijakan perdagangan internasional adalah tindakan yang dilakukan pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung memengaruhi arah dan pola perdagangan internasional dan atau pembayaran internasional.
3. Bila ada dua negara yang melakukan perdagangan internasional maka diperlukan suatu alat pembayaran yang dapat diterima oleh semua pihak. Alat pembayaran tersebut disebut devisa. Devisa adalah semua barang yang dapat berfungsi sebagai alat pembayaran di perdagangan internasional.
4. Valuta asing merupakan salah satu bentuk devisa atau alat pembayaran internasional yang paling banyak digunakan untuk menyelesaikan transaksi ekonomi internasional. Valuta asing atau mata uang asing adalah jenis mata uang yang dipergunakan di negara lain.
5. Perdagangan internasional dan semua transaksi internasional yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain menimbulkan pembayaran internasional. Semua transaksi yang dilakukan tersebut perlu dicatat di sebuah neraca pembayaran internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, Euis. 2010. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer*. Gramata Publishing
- Arsyad, Lincoln. 2010. *Ekonomi Pembangunan*. UPP STIM YKPN, Yogyakarta
- Booth, Anne. 1998. *The Indonesian Economy in the Nineteenth and Twentieth centuries*. Macmillan, London
- Case, Karl E. & Fair Ray. G. 2007. *Principles of Economics. 8th Edition*. Pearson Prentice Hall, New Jersey
- Collinson, Diane. 2001. *Lima Puluh Filosof Dunia yang Menggerakkan (terj)*. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Deliarnov. 2005. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Dumairy. 1996. *Perekonomian Indonesia*. Penerbit Erlangga, Jakarta
- Ekelund, Robert. B & R. H. Herbert. 1996. *A History of Economic Theory and Method, 4th Edition*. McGraw-Hill, New York
- Frank, Robert H. 2015. *Microeconomics and Behavior, 9th edition*. McGraw-Hill Education, New York
- Frisdiantara, Christea dan Imam Mukhlis. 2016. *Ekonomi Pembangunan : Sebuah Kajian Teoritis dan Empiris*. Lembaga Penerbitan Universitas Kajuruhan Malang
- Huntington, Samuel P. 2004. *Benturan Antar Peradaban dan Masa Depan Politik Dunia (The Clash of Civilizations and The Remarking of Word Order)*. Terj. M. Sadat Ismail. Cet. VIII, Qalam. Yogyakarta
- Jeffries, M., and D. Mills. 1996. *Freshwater Ecology, Principles and Applications*. John Wiley and Sons. Chicester UK.
- Kuncoro, Mudrajad. 2010. *Dasar-Dasar Ekonomi Pembangunan*. UPP STIM YKPN, Yogyakarta
- Lipsey Richard. G & Colin Harbury. 1992. *First Principles of Economics*. Oxford University Press, 2nd Edition, UK
- Mankiw, N. Gregory. 2011. *Principles of Economics, terjemah : Pengantar Ekonomi Mikro, Edisi 3*. Penerbit Salemba Empat, Jakarta
- Mubyarto. 2000. *Membangun Sistem Ekonomi*. BPFE, , Yogyakarta
- Nicholson, Walter & Christopher M. Snyder. 2010. *Intermediate Microeconomics and Its Application. 11th Edition*, South-Western Cengage Learning, Mason, USA
- Nitisastro, Widjojo. 2010. *Pengalaman Pembangunan Indonesia*. PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta

- Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Pracoyo, Tri Kunawangsih dan Antyo Pracoyo. 2006. *Aspek Dasar Ekonomi Mikro*. PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta
- Prawirokusumo, Soeharto. 2001. *Ekonomi rakyat: konsep, kebijakan, dan strategi*. BPFE, Yogyakarta
- Reksoprayitno, Soediyono. 2015. *Pengantar Ekonomi Mikro*. BPFE, Yogyakarta
- Robbins, Lionel. 2000. *A History of Economic Thought*. Princeton University Press, New Jersey
- Rosyidi, S. 2005. *Pengantar Teori Ekonomi Pendekatan kepada Teori Ekonomi Mikro dan Makro*. Rajawali Pers. Surabaya
- Salvatore, Dominick & Eugene Diulio. 2003. *Principles of economics : based on Schaum's outline of theory and problems of principles of economics, 2nd Edition*. McGraw-Hill, New York
- Samuelson, Paul A. & William D. Nordhaus. 2001. *Macroeconomics, 17th Edition*. McGraw-Hill Higher Education, New York
- Sanderson, K Stephen. 1993. *Sosiologi Makro*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Sanusi, Bachrawi. 2000. *Sistem Ekonomi. Surat Pengantar*. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta
- Soekanto, Soerjono. 2007. *Sosiologi suatu Pengantar*. P.T.Raja Grafindo, Jakarta
- Sugiarto, Tedy Herlambang, Brastoro, Rachmat Sudjana, Said Kelana. 2007. *Ekonomi Mikro : Sebuah Kajian Komprehensif*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Tambunan, Tulus T.H. 2015. *Perekonomian Indonesia*. Ghalia Indonesia, Bogor
- Todaro, Michael P. 1996. *Economic Development*. Edisi keenam, Addison-Well Publishing Company
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
- Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah
- Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah
- Yuswanto. 2012. *Hukum Desentralisasi Keuangan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta